
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah kepala daerah/wakil kepala daerah dilantik.

Mandat ini diperkuat dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa sistem perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Pasal 141 ayat (2) memandatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga memberikan amanah bahwa perencanaan pembangunan juga harus melibatkan masyarakat sebagai bagian pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pembangunan yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan melalui pengembangan sistem penjangkaran aspirasi dari bawah.

Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis. Posisi strategis ini dikarenakan Aceh Tengah berada di Kawasan Ekosistem Leuser yang menjadi paru-paru dunia, disamping Aceh tengah menjadi penghubung beberapa kabupaten di pantai barat selatan Aceh dan kabupaten-kabupaten yang berada di pantai timur Aceh. Sebagai Kabupaten yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser, Aceh Tengah menjadi kawasan penyangga untuk kabupaten/kota lain di Aceh, baik sebagai penyangga sumber daya air, maupun penyangga kawasan lindung dan konservasi agar tidak terjadi berbagai jenis bencana. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Aceh Tengah, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.

RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tengah dan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam RPJMK ini tetap menekankan pada peran Pemerintah Kabupaten sebagai penyangga kehidupan ekonomi dan kelestarian lingkungan dengan cara melanjutkan upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan menghalau kemiskinan menuju masyarakat Aceh Tengah yang sejahtera dan islami.

RPJM Kabupaten Aceh Tengah periode 2012-2017 ini merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Tengah periode 2005-2025 yang menekankan pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan nilai tambah produksi pertanian menuju masyarakat Aceh Tengah sejahtera tahun 2017.

Penyusunan RPJMK dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMK

Rancangan awal RPJMK sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Bappeda.

2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMK.

Musrenbang RPJMK diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMK.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMK Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMK

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMK Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah: `

- a. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Utara yo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

-
- c. Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);]
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

-
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 - r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 - s. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - v. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tambahan Bagi Hasil Migas dan Otonomi Khusus;
 - w. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 121);
 - x. Qanun Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor 34).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMK merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Penyusunan RPJMK berpedoman kepada RPJMN dan RPJMA serta RPJPK Aceh Tengah juga memperhatikan dan mempertimbangkan RTRW Kabupaten Aceh Tengah yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Renstra SKPK sebagaimana dalam gambar 1.1.

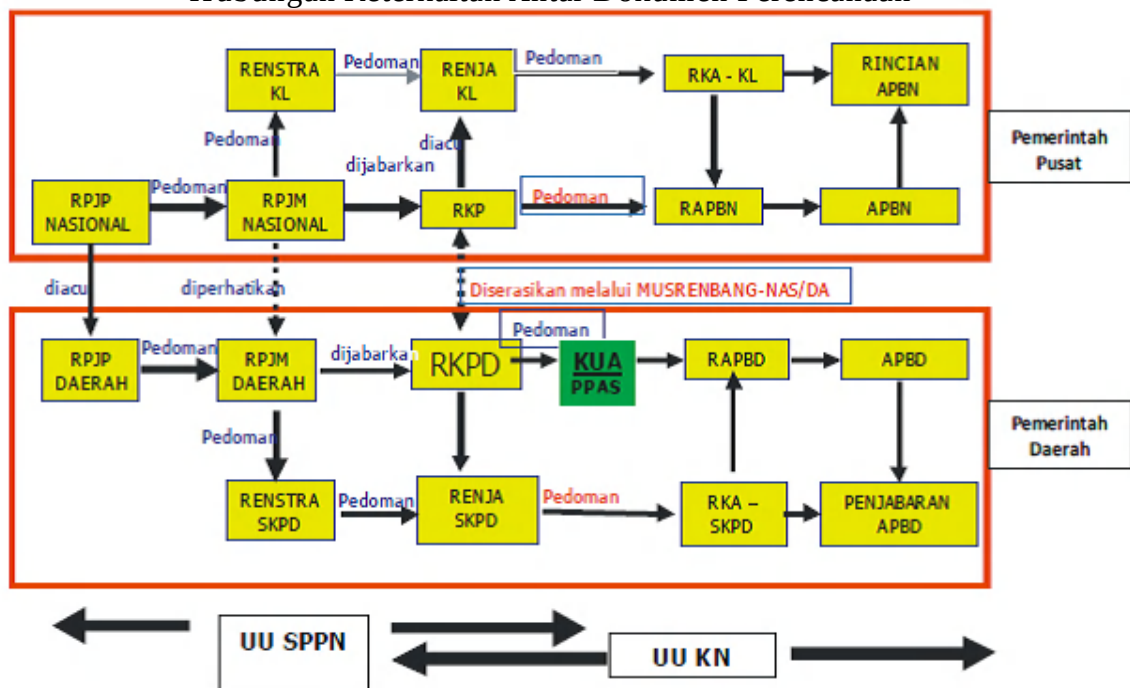
Hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hubungan RPJMK dengan RPJM Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Mempedomani ketentuan tersebut penyusunan RPJMK mengacu pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014 . Dalam merencanakan pembangunan daerah memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Hubungan RPJMK dengan RPJM Aceh

Hubungan RPJMK dengan RPJM Aceh adalah bahwa penyusunan RPJMK mengacu pada RPJM Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 - 2017. Dalam RPJMA tersebut perencanaan pembangunan daerah Aceh mengarah pada kemandirian masyarakat berbasis keunggulan daerah. Untuk Kabupaten Aceh Tengah potensi unggulan yang dikembangkan adalah sektor pertanian dan perkebunan serta pariwisata tanpa melupakan aspek pencapaian kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi.

c. Hubungan RPJMK dengan RPJP Kabupaten Aceh Tengah

Hubungan RPJMK dengan RPJP adalah bahwa penyusunan RPJMK berpedoman pada RPJP yang diatur dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah (RPJP) Tahun 2005 -2025. RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Aceh Tengah Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan visi dan misi masih tetap melanjutkan apa yang diamanatkan dalam RPJP dengan beberapa penekanan pada visi dan penyederhanaan misi tanpa mengurangi kandungan isinya.

d. Hubungan RPJMK dengan RTRW Kabupaten Aceh Tengah

RTRW merupakan dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan agar terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Penyusunan RPJMK memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Tengah sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

e. Hubungan RPJMK dengan RKPK Aceh Tengah

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. Penyusunan dokumen perencanaan ini menjabarkan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017, sebagai dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan, RKP Kabupaten Aceh Tengah memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK).

Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Target dan pagu program yang dalam RPJMK yang masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPK.

f. Hubungan RPJMK dengan Renstra SKPK

Renstra SKPK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran teknis dari RJP Kabupaten Aceh Tengah dalam Tahun 2012-2017. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Renstra SKPK disusun oleh setiap SKPK di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Arah kebijakan dan Program sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK. Secara hirarkis hubungan Renstra SKPK dengan RJPMK Aceh Tengah merupakan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat komplementer. Renstra SKPK menjabarkan pesan konsepsional dalam RJPMK secara teknis-operasional dengan maksud mencapai tujuan yang sama, yaitu terwujudnya visi pembangunan lima tahun ke depan. Untuk itu agar penyusunan Renstra SKPK memiliki daya konektivitas dengan RJPMK maka setiap SKPK harus benar-benar memahami substansi visi dan misi sebagai pesan konsepsional dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dalam kaitan ini maka setelah dokumen Renstra-SKPK selesai disusun, kemudian dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan adanya hubungan dan keberlanjutan konsep dan arah pembangunan sebagaimana yang dikehendaki dalam RJPM Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017.

1.4 Sistematika Penulisan

RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMK terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH TENGAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

BAB VI	BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
	Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah kabupaten dengan SKPK terkait beserta program dan pencapaian target indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab SKPK pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
	Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah.
BA X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012 – 2017 adalah :

- 1 Memberikan penjabaran visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2 Menyediakan pedoman bagi SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan Renstra Bisnis BLUD agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMK

-
- 3 Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPK yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
 - 4 Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Aceh Tengah digambarkan dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek ini menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 445.404,12 Ha yang secara geografis terletak pada $4^{\circ}22' 14,42''$ – $4^{\circ}42' 40,8''$ LU dan $96^{\circ} 15' 23,6''$ – $97^{\circ} 22' 10,76''$ BT. Batas administratif Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah, dan Bireuen
Sebelah Selatan : Gayo Lues dan Nagan Raya
Sebelah Timur : Aceh Timur
Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi pemerintahan terbagi atas 14 kecamatan, dengan jumlah kampung sebanyak 295 kampung. Nama-nama kecamatan serta luas pada masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	2	3
1	Linge	176.624,89
2	Bintang	57.826,07
3	Laut Tawar	8.310,16
4	Kebayakan	4.817,95
5	Pegasing	18.687,11
6	Bebesan	2.895,52
7	Kute Panang	2.094,86
8	Silih Nara	7.504,35
9	Ketol	61.146,86

Sumber : Draf RTRW Kabupaten Aceh Tengah, 2012

[illegible]

Sumber: *Draf RTRW Kabupaten Aceh Tengah, 2012*

Kabupaten Aceh Tengah memiliki klasifikasi kelerengan <8%, 8-15%, 16-25%, 26-40%, dan >40%,dibedakan menjadi datar, landai, berombak, bergelombang, berbukit, bergunung dengan ketinggian 100-2000>Mdpl Kondisi kelerengan di Kabupaten Aceh Tengah ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Kemiringan Lahan, Bentuk dan Luas Wilayah
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kemiringan Lereng (%)	Bentuk Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	(%)
1	0 – 2	Datar	4.780,91	1,07
2	2 – 8	Landai	7.100,07	1,59
3	8 – 15	Berombak	32.115,33	7,21
3	15 – 25	Bergelombang	101.180,05	22,72
4	25 – 40	Berbukit	184.932,46	41,52
5	>40	Bergunung	115.295,30	25,89
Jumlah			445.404,13	100,00

Sumber: *Draf RTRW Kabupaten Aceh Tengah, 2012*

Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut wilayah Kabupaten Aceh Tengah di dominasi dengan kelerengan 25%-40% dengan luasan 184.932,46 Ha atau sebesar 41,52% dari total luas wilayah kabupaten. Pemanfaatan lahan pertanian umumnya dimanfaatkan sebagai perkebunan kopi dengan ketinggian 1000-1500 Mdpl.

Tabel 2.3
Ketinggian Tempat dan Luas Wilayah
Kabupaten Aceh Tengah

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah(Ha)	%
1	100 – 250	127,41	0,03
2	250 – 500	20.919,72	4,70
3	500 – 750	54.738,76	12,29
4	750 – 1.000	61.686,22	13,85
5	1.000 – 1.250	77.834,09	17,47
6	1.250 – 1.500	90.645,32	20,35
7	1.500 - 1750	107.711,95	24,18
8	1.750 – 2000	29.376,90	6,60
9	> 2000	2.363,76	0,53
Jumlah		445.404,13	100,00

Sumber: *Draf RTRW Kabupaten Aceh Tengah, 2012*

2.1.1.3. Geologi

Kabupaten Aceh Tengah terletak pada bagian dari Pegunungan Barisan (Sumatran Volcanic Arc) yang terjadi akibat pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Daratan Sunda sebagai bagian dari Lempeng Benua Asia-Eurasia. Zona Benioff sepanjang tepi dari Lempeng Sunda membentuk Cekungan / Paritan Sunda (Sunda Trench) sepanjang pantai barat

Sumatera. Generasi magma berasosiasi dengan hasil tumbukan tersebut, menyebabkan terbentuknya tinggian (Sumatran Volcanic Arc) berarah Barat Laut – Tenggara berumur Tersier sampai Sekarang yang mempengaruhi geologi pulau Sumatera. Pertemuan dua lempeng tersebut menyebabkan juga adanya tekanan miring (oblique) yang mengakibatkan pensesaran mendatar kekanan (dextral parallel fault) disebut sebagai Sistem Sesar Sumatra (Sumatran Fault System/SFS) yang memanjang sepanjang Pulau Sumatra sejajar dengan Pegunungan Barisan.

Menurut *N.R. Cameron dkk*, secara regional Takengon mengalami dua periode deformasi yaitu pada Zaman Pra – Tersier dan Tersier. Pada Zaman Pra – Tersier, lipatan isoklinal pada Formasi Kluet pada umumnya sumbu lipatan berarah Baratlaut – Tenggara, berasosiasi dengan rekahan axial planar, crenulation cleavage, kink bands dan kekar syntektonik sebelum formasi ini diendapkan di Group Peusangan.

Fase utama deformasi Zaman Tersier adalah lipatan di Group Meureudu yang disertai dengan batas-batas plutonisme. Deformasi ini sudah terjadi pada Oligosen Akhir dimana strukturnya sangat kompleks. Struktur termuda di Zaman Tersier sangat kompleks tetapi umumnya dikontrol oleh dekatnya sesar transcurrent. Sebelah Barat dari Geumpang Group menunjukkan hanya lipatan dan kemiringan yang tidak sesuai menutupi Formasi Tutut. Topografi dipengaruhi oleh empat periode seismik aktif dengan arah Baratlaut – Tenggara termasuk bagian dari Sumatera Fault System (SFS). Sesar Banda Aceh – Sesar Anu terpisah di Sesar Anu untuk membentuk Sesar Anu - Sesar Betee dan Reungeuet – Blangkejeren.

Diantara sesar aktif lain yang berasosiasi dengan Sumatera Fault System (SFS) adalah Sesar Samalanga – Sipopok yang mengarah ke Utara dari Pameue. Sesar Geureunggang, struktur dextral Timur – Barat dibagian ujung Selatan dari Tinggian Sigli – Seunalan di dalam cekungan Sumatera utara dan sudah aktif selama sedimentasi di Zaman Miosen. Salah satu patahan yang aktif sejak Cretaceous dan lainnya di Zaman Tersier adalah Kila line yang berarah Tenggara. Sudah terbentuk sejak pengangkatan di akhir Cretaceous ketika Formasi Kluet mendorong sebelah Timur dari Group Woyla. Takengon Line yang berarah Baratdaya berumur Tersier Awal dan berhubungan dengan sesar bentuk bukaan busur berbentuk S melintas 20 km menyilang diwilayah Takengon dan pemisahan Group Peusangan dan Tapanuli ke Timurlaut dari Group Woyla ke Baratdaya.

Struktur geologi di pengaruhi oleh sistem sesar sumatera (*Sumatera Fault Sistem*) yang berarah barat laut – tenggara,yang menjadi salah satu penyebab utama terbentuknya struktur geologi. Berdasarkan interpretasi peta topografi dan ditemukannya gejala-gejala geologi, terdapatnya 3 gejala geologi berupa:

1. Struktur kekar;

-
- Kreung Tripa dengan luas 14.762,66 Ha
 - Kreung Tamiang dengan luas 5.317,32 Ha
 - Kreung Seunagan dengan luas 4.839,04 Ha
 - Kreung Peusangan dengan luas 12.6247,31 Ha
 - Kreung Meureubo dengan luas 47.516,61 Ha
 - Kreung Jambo Aye dengan luas 193.482,20 Ha.

2. Sungai

Air sungai ini merupakan air yang digunakan penduduk untuk pertanian dan perkebunan dan juga kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain itu, Sungai Peusangan saat ini juga dimanfaatkan untuk Pembangunan Listrik Tenaga Air (PLTA) di Dusun Singkiren Kampung Semelit Mutiara Kecamatan Silih Nara dengan kapasitas 88,90 MW, dan juga Sungai Peusangan dan anak-anak Sungai Woyla dimanfaatkan juga untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada daerah :

- Kampung Bergang dan Kampung Karang Ampar Kecamatan Ketol dengan Kapasitas 45 kw;
- Kampung Berawang Dewal dan Kampung Merah Said Kecamatan Jagong Jeget dengan kapasitas 200 kva;
- Kampung Tanjung dan Kampung Kuala Rawa Kecamatan Rusip Antara dengan kapasitas 150 kw;
- Kampung Tanoh Depet dan Kampung Depet Indah Kecamatan Celala dengan kapasitas 45 kw.

3. Danau.

Danau Laut Tawar terletak persis berada di kawasan Perkotaan Takengon di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, dimana daerah tangkapan Danau Laut Tawar masuk kedalam wilayah Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Bebesen dan Kecamatan Bintang. Aliran air permukaan atau sungai yang menuju ke Danau Laut Tawar berjumlah 25 sungai yang berasal dari 18 daerah hulu/kawasan tangkap dengan debit air. Debit rata-rata air Danau Laut Tawar 538,84 juta kilo liter (Husnah *et al.* 2012) dengan Sungai Peusangan sebagai satu-satunya outlet Danau Laut Tawar. Berikut ini disampaikan tabel nilai parameter karakteristik morfometrik Danau Laut Tawar:

Tabel 2.4
Nilai Parameter Karakteristik Morfoketrik Danau Laut Tawar

Parameter	Nilai	Satuan
Elevasi	1,230	Meter
Luas Permukaan (A_o)	5,742.10	hektare (ha)
Kedalaman maks (Z_{max})	84.23	Meter
Kedalaman rata (Z_{mean})	25.19	Meter
Panjang Maks	15,727	Meter
Lebar Maks	4,563	Meter
Panjang Garis Pantai (L)	43,920	Meter
Littoral Area	14.28	%

Sumber (Husnah et al. 2012)

Tabel 2.5
Kisaran nilai pengamatan parameter fisika dan kimia perairan setiap stasiun

Parameter	Satuan	Stasiun			
		One-one	Mampak	Kelitu	Bintang
Suhu	°C	23.24±0.67	23.34±0.74	23.99±1.08	24.17±0.60
Kecerahan	M	4.09±1.55	5.08±1.88	4.68±2.01	3.78±1.04
Kedalaman	M	17.5±2.29	15.7±0.64	38.4±6.81	16.4±3.14
pH		8.05±0.32	8.28±0.23	8.36±0.26	8.51±0.34
DO	Ppm	7.34±1.51	7.52±0.82	6.51±1.55	7.12±0.86
N-Nitrat	mg/l	0.18±0.05	0.15±0.08	0.13±0.07	0.14±0.10
N-Nitrit	mg/l	0.01±0.01	0.02±0.03	0.01±0.02	0.07±0.01
N-Amonia	mg/l	0.10±0.06	0.06±0.06	0.13±1.15	0.13±0.10
Total Posfat	mg/l	0.10±0.05	0.12±0.05	0.08±0.05	0.12±0.07

Sumber : Hasri dan Rosa 2012

Berdasarkan publikasi Hasri dan Rosa (2012) menunjukkan bahwa kondisi fisika kimia perairan Danau Laut Tawar masih dalam batas optimum bagi kehidupan organisme perairan. Secara geologi Danau Laut Tawar dikelilingi oleh batugamping dan batuan metasedimen, umumnya struktur geologi di sekitar danau berupa *karts* yang ditandai dengan gua-gua di sekitar danau, struktur perlipatan, sesar yang ditandai dengan adanya air terjun dan gawir-gawir sesar. Dalam kepariwisataan Danau Laut Tawar, gua-gua, dan air terjun yang ada disekitar danau merupakan ujung tombak sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah, dan dari masa ke masa sudah menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri dan dari manca negara.

Kondisi topografi di sekeliling danau terdiri dari kemiringan landai, curam, dan sangat curam. Kondisi topografi danau dengan kemiringan yang landai berada di sekitar Kecamatan Kebayakan, Laut Tawar, Bebesen dan Bintang. Kemiringan curam berada di sekitar Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan dan Bintang. Sedangkan kemiringan sangat curam berada di sekitar Kecamatan Lut Tawar.

Selain untuk parawisata, danau ini berperan penting dalam pengendalian keseimbangan air khususnya Perkotaan Takengon dan menjadi sumber air untuk Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Air danau terutama dimanfaatkan untuk air minum

dan budidaya perikanan air tawar sebagai mata pencaharian bagi para nelayan yang tinggal di sekitar danau.

Berdasarkan pengamatan terakhir, kondisi Danau Laut Tawar kini sudah mengalami degradasi, yang dicirikan oleh semakin berkurangnya debit air Danau Laut Tawar dan tingginya sedimentasi yang terjadi di Danau Laut Tawar. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya tutupan lahan di sekitar Danau Laut Tawar dikarenakan alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal perkebunan yang tidak terkendali.

Untuk mengurangi tingginya sedimentasi di Danau Laut Tawar perlu melakukan pengerukan dan memperbaiki penutupan lahan di *Catchment Area*. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memanfaatkan sumber daya air dari Danau Laut Tawar.

Laju eksploitasi ikan di Danau Laut Tawar yang semakin tinggi yang berlangsung setiap hari dan ditambah pulakerusakan ekosistem danau terutama di kawasan pinggiran danau dan sumber-sumber air danau menyebabkan terhambat dan berkurangnya populasi ikan khususnya ikan depik. Pola penangkapan ikan yang dilakukan nelayan dengan menggunakan alat tangkap jaring yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan benih-benih ikan yang masih kecil ikut terbawa oleh nelayan, dan juga bekas jaring tangkap yang dibiarkan oleh nelayan di perairan Danau Laut Tawar menjadi salah satu faktor yang juga mengakibatkan populasi ikan terutama ikan depik semakin berkurang.

Tingkat pencemaran perairan Danau Laut Tawar semakin hari juga semakin meningkat, pencemaran perairan Danau Laut Tawar sebahagian besar disebabkan oleh limbah rumah sakit umum Datu Beru, limbah rumah tangga, pertanian, usaha peternakan ikan pola tambak yang semakin meluas dan usaha perhotelan serta usaha-usaha perdagangan atau industri lainnya.

Untuk mengurangi hal tersebut diatas, sebagai daerah konservasi sekaligus sebagai ikon objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah maupun masyarakat perlu melakukan upaya yang lebih intensif untuk penyelamatan lingkungan di kawasan Danau Laut Tawar.

4. *Cekungan Air Tanah (CAT)*

Aspek hidrogeologi mengenai Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah mengacu kepada Atlas Cekungan Air Tanah Indonesia yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasi ada 1 (satu) Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh Tengah, yaitu CAT Telege dengan luasan 16.410 Ha dengan karakteristik sebagai berikut:

- o Jumlah Imbuhan Air Tanah bebas: 375 juta m³/tahun.
- o Jumlah Air Tertekan: 72 juta m³/tahun.

2.1.1.5. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut *Schmidt Ferguson*. Musim kemarau biasanya terjadipada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember.

Curah hujan berkisar antara 1.082 sampai dengan 2.409 Milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan antara 113 sampai dengan 160 hari per tahun. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 316,5 mm, terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli mencapai 6,2 mm. Berikut ini merupakan data curah hujan yang terjadi pada 5 tahun terakhir.

Tabel 2.6
Data Curah Hujan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 – 2012

Tahun	Curah Hujan
2007	138,75 mm
2008	162,71 mm
2009	292,52 mm
2010	216,98 mm
2011	165,77 mm
2012	196 mm

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2012

Topografi rata-rata 1000 m dpl, KabupatenAceh Tengah merupakan daerah yang berhawa sejuk dengan suhu sekitar 20,10°C, dimana pada bulan April dan merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,6°C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,70°C.Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53m/det dan terlambat 0,95m/det.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan SK. Gubernur Aceh No. 19/1999 dan SK. Menteri Kehutanan No.170/KPTS-II/2000, kawasan mencakup hutan lindung yang mencapai 186.293,88 Ha (41,83%), taman buru 87.327,86 Ha (19,61%), hutan produksi 71.121,15 Ha (15,97%) dan hutan produksi terbatas 5.983,63 (1,34 %) dan tersebar di 10 Kecamatan (Atu Lintang, Bintang, Laut Tawar, Jagong Jeget, Linge, Pegasing, Celala, Rusip Antara, Ketol, dan Kebayakan) selebihnya adalah APL dan Danau Laut Tawar.

1. Kawasan budidaya

Kawasan budidaya Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari:

- Kawasan hutan produksi seluas 71.799,57 Ha;
- Kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.894.74Ha;

- c. Kawasan hutan produksi konversi seluas 2.335,74 H;
- d. Kawasan tanaman lahan basah seluas 9.110,37 Ha;
- e. Kawasan tanaman lahan kering seluas 10.320,01 Ha;
- f. Kawasan peternakan seluas 13.553,17Ha;
- g. Kawasan perikanan budidaya perairan umum danau seluas 20,26 Ha;
- h. Kawasan peruntukan pertambangan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) seluas 25.877,80Ha;
- i. Kawasan dan objek wisata budaya seluas 22,66 Ha;
- j. Kawasan wisata Alam seluas 271,44 Ha;
- k. Kawasan permukiman perkotaan seluas 2.012,21 Ha;
- l. Kawasan permukiman perdesaan seluas 4.822,77 Ha;
- m. Kawasan transmigrasi seluas 1.950,70 Ha.

2. Kawasan lindung

Kawasan lindung Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung seluas 179.300,166 Ha,
- b. Sempadan sungai seluas 2.882,15 Ha;
- c. Sempadan danau seluas 264,46 Ha;
- d. Kawasan lindung geologi, berupa kawasan lindung karst dengan luas 21.567,43 Ha;
- e. Kawasan lindung lainnya berupa Taman Buru memiliki luas 85.352,79 Ha;
- f. Kawasan rawan bencana banjir dengan luas 93,48 Ha;
- g. Kawasan bencana sesar memiliki luas 2.707,47 Ha.

Tabel berikut ini menggambarkan penggunaan lahan berdasarkan tinjauan SK Menteri kehutanan No. 170/KPTS-II/2000.

Tabel 2.7
Tinjauan SK. Menteri Kehutanan No.170/KPTS-II/2000

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas Penggunaan Lahan (Ha)				
			Hutan Lindung	Taman Buru	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Areal Penggunaan Lahan (APL)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Linge	176.624,89	51.203,50	66.741,81	45.588,49	-	13.091,08
2.	Bintang	57.826,07	21.883,93	19.762,90	10.618,48	-	5.560,76
3.	Laut Tawar	8.310,16	4.123,60	823,02	-	-	3.363,55
4.	Kebayakan	4.817,94	1.322,63	-	-	-	3.495,32
5.	Pegasing	18.687,12	11.180,66	0,13	-	-	7.506,32
6.	Bebesen	2.895,52	-	-	-	-	2.895,52
7.	Kute Panang	2.094,86	-	-	-	-	2.094,86
8.	Silih Nara	7.504,35	136,46	-	-	-	7.367,90
9.	Ketol	61.146,87	22.616,09	-	13.248,46	5.983,63	19.298,67
10.	Celala	10.881,85	4.668,55	-	-	-	6.213,31

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Atu Lintang	14.626,86	8.726,85	-	1.665,72	-	4.234,30
12.	Jagong Jeget	18.824,74	11.861,92	-	-	-	6.962,83
13.	Bies	1.231,56	-	-	-	-	1.231,55
14.	Rusip Antara	59.931,34	48.569,69	-	-	-	11.361,64
Jumlah		445.404,13	186.293,88	87.327,86	71.121,15	5.983,63	94.677,61
(%)		100,00	41,83	19,61	15,97	1,34	21,26

Sumber : SK Menhut No.170/KPTS-II/2000

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2 Potensi Pengembangan wilayah

Pengembangan wilayah ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kawasan yang berpotensi seperti Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) yang direncanakan di Kecamatan Linge, kawasan perkebunan tebu di Kecamatan Ketol, kawasan transmigrasi lokal dan umum di Pamar Kecamatan Rusip Antara, pengembangan areal sawah seluas 600 Ha di Kecamatan Ketol dan Linge. Rencana pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Tengah

No.	Sudut Kepentingan Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	a. KSK Kawasan Perkotaan PKW Takengon
		b. KSK Kawasan Perkotaan PKLp Isaq
		c. KSK Kawasan Perkotaan PKLp Angkup
		d. KSK Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Jagong Jeget – Atu Lintang (Pertanian dan Perkebunan)
		e. KSK Pengembangan Peternakan Ketapang di Kecamatan Linge
		f. KSK Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Ketol
		g. KSK Pengembangan Pariwisata Danau Laut Tawar
2	Sosial Budaya	a. KSK Situs Kerajaan Linge di Kecamatan Linge
		b. KSK Situs Arkeologi Mandale di Kecamatan Kebayakan
		c. KSK Situs Sejarah Kampung Serule di Kecamatan Bintang

Sumber : draft RTRWK Aceh Tengah 2012-2032, 2012

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam, karena terletak di dalam kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang merupakan bagian dari patahan Sumatera (Sumatra Fault System) yang dapat memicu terjadinya gempa bumi, gunung berapi dan tanah longsor, dan dengan morfologi dominan pegunungan – bukit bergelombang dengan ketinggian 100-2000mdpl bencana lainnya berupa banjir dan angin puting beliung.

Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan sinergi dalam mengantisipasi dan mengedukasi tentang kebencanaan sehingga dapat meminimalisir dampak dari bencana baik materil maupun jiwa. Upaya mitigasi bencana oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan melalui pemberian bantuan masa panik, pemberian bantuan uang duka, pembuatan posko pengungsi, reboisasi, edukasi bencana dalam bentuk kurikulum dan penyuluhan bencana, secara rinci jenis bencana, jumlah dan tindakan penanggulangan pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah Bencana Dan Tindakan-Tindakan Penanggulangan Pertama
Kabupaten Aceh Tengah

No	N A M A	Tahun							Ket.
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Jumlah pengungsi								
	- Banjir	100	50	152	203	175	159	120	
	- Banjir bandang	1000	1135	1050	930	900	997	800	Jiwa
	- Gunung meletus	-	-	-	-	-	-	-	Jiwa
	- Longsor	336	370	265	170	150	87	45	Jiwa
	- Gempa	-	-	-	1000	-	-	-	Jiwa
	- Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	Jiwa
	- Putting beliung	50	30	25	-	43	35	-	Jiwa
	- Rumah terbakar	400	250	300	800	1000	900	20	
II.	Jumlah lokasi pengungsian					3	2	4	Lokasi
III.	- Jumlah pengungsi yang telah kembali ke lokasi asal	1886	1835	1792	3103	2268	2178	985	Jiwa
IV.	- Jumlah pengungsi yang telah direlokasi	-	-	-	-	-	-	-	Jiwa
V.	- Jumlah korban bencana alam								
	- Meninggal					4	8	-	Jiwa
	- Hilang					-	-	-	Jiwa
	- Luka-luka								Jiwa
VI.	Jumlah lokasi bencana	150	135	157	178	165	170	50	Lokasi
VII.	Jumlah kecamatan lokasi bencana	14	14	14	14	14	14	14	Lokasi
VIII.	kerugian akibat bencana	10	9,5	9	72	33	12,5	25	Milyar
IX.	Bantuan								
	- Dana	10	9,5	9	72	33	12,5	25	Milyar
	- Beras	0,75	0,73	0,71	1,2	0,9	0,87	0,4	Ton
	- Mie instan	1886	1835	1792	3103	2268	2178	985	Kardus
	- Minyak goreng	1886	1835	1792	3103	2268	2178	985	Liter
	- Obat-obatan	50	55	45	80	70	65	25	Paket
	- Pakaian	1886	1835	1792	3103	2268	2178	985	Paket
	- Material bangunan	200	190	180	280	220	210	100	Paket
	- Peralatan tanggap darurat bencana	28	28	28	28	28	28	28	Unit
	- Air bersih	3772	3670	3584	6206	4536	4356	1970	Liter

Jumlah dan jenis bencana alam yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah Bencana Alam Tahun 2012 Kabupaten Aceh Tengah
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Bencana Alam				
		Kebakaran	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Puting Beliung	Banjir
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kute Panang	-	-	-	-	-
2.	Kebayakan	3	1	-	-	-
3.	Bintang	2	2	1	-	-
4.	Linge	-	1	-	-	1
5.	Bebesen	2	1	1	-	-
6.	Rusip Antara	1	-	-	-	1
7.	Laut Tawar	7	-	-	-	-
8.	Ketol	-	1	-	1	-
9.	Celala	2	-	-	-	-
10.	Silih Nara	13	-	1	1	-
11.	Atu Lintang	-	-	-	-	-
12.	Pegasing	4	1	1	-	-
13.	Bies	-	-	-	-	-
14.	Jagong Jeget	1	1	-	-	-
Jumlah		35	8	4	2	2

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tengah, 2012

Dari data di atas terlihat bahwa bencana alam yang sering terjadi adalah bencana kebakaran yang disusul dengan bencana tanah longsor. Dampak bencana alam diantaranya rusaknya tempat tinggal, terbakarnya lahan pertanian, hancurnya turap dan tali air sawah, terputusnya badan jalan, terputusnya saluran distribusi air bersih dan tertimbunnya lahan perkebunan sehingga akibat dari dampak yang ditimbulkan adalah terganggunya angka pertumbuhan ekonomi yang dapat mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang timbul dari penanggulangan bencana saat ini yaitu kurangnya informasi atau data tentang potensi bencana secara detail di Kabupaten Aceh Tengah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Untuk mengatasi masalah di atas, hal yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan detail potensi bencana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang disertai dengan sosialisasi kesiapsiagaan *stakeholder* dan masyarakat dalam menghadapi bencana (mitigasi bencana).

2.1.3.1. Gempa Bumi

Klasifikasi potensi gempa bumi menurut Mangnitude (*skala richter*) di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

- 0,3 – 0,4 : Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bies, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Bebesan, Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Bintang, Kecamatan Kute Panang, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Ketol, dan Kecamatan Kebayakan.
- 0,4 – 0,5 : Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan Bies, Kecamatan Silih Nara, Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Celala, Kecamatan Bintang, Kecamatan Rusip Antara, dan Kecamatan Ketol.
- 0,5 – 0,6 : Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Linge, dan Kecamatan Pegasing.

2.1.3.2. Gunung Api

Gunung api Burni Telong yang terletak di Kabupaten Bener Meriah merupakan ancaman bagi Kabupaten Aceh Tengah, beberapa kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah seperti Kecamatan Kute Panang, Ketol, Kebayakan dan Silih Nara merupakan daerah yang rawan terhadap bencana gunung api. Kecamatan yang berisiko terkena dampak bencana gunung api disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Kecamatan Yang Berisiko Terkena Dampak Bencana Gunung Api

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kute Panang	123,50	Kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas Gunung Api Burni Telong
2	Ketol	204,64	Kawasan yang sangat berpotensi terlanda banjir lahar Gunung Api Burni Telong
3	Kebayakan	1.000	Desa Kelupak Mata, Telege Atu dan Bukit Samaawan panas Gunung Api Burni Telong
4	Silih Nara	2.500	Potensi bahaya dari Gunung Api Burni Bius yang ditandai dengan munculnya sumber air panas di Kampung Wih Porak, Bius, Wih Bakong, Remesen dan Wih Sagi Indah

Sumber: Draft RTRW 2012-2032, 2012

Usaha yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mitigasi risiko bencana gunung api adalah: (1) penyediaan jalur evakuasi bencana, (2) penyusunan rencana kontigensi, (3) penyusunan peta risiko bencana gunung api, (4) kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyediaan jalur evakuasi di daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah.

2.1.3.3. Angin Puting Beliung

Aceh Tengah juga merupakan daerah yang rawan terhadap bencana angin puting beliung. Pada Februari 2013 terjadi angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan bangunan publik dan rumah penduduk. Kecamatan yang rawan terhadap bencana angin puting beliung dengan klasifikasi tingkat bahayanya dapat dikelompokkan antara lain : (1) Bahaya Rendah: Kecamatan Bebesen, (2) Bahaya Menengah: Kecamatan Bebesen, Kecamatan Celala dan (3) Bahaya Tinggi: Kecamatan Atu Lintang, Bebesen, Kecamatan Kuta Panang, Kecamatan Ketol, Kecamatan Jagong Jeget, dan Kecamatan Kebayakan.

2.1.3.4. Banjir dan Tanah Longsor

Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana banjir dan longsor karena topografi yang berbukit dan banyaknya patahan-patahan mikro. Kondisi ini diperparah oleh deforestasi hutan dan curah hujan yang tinggi.

2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2012 tercatat 211.360 jiwa (*Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012*). Persebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik. Konsentrasi penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bebesen dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bies.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan mayoritas Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Menurut Jenis Kelamin
Perkecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
1	2	3	4	5	6
1.	Kecamatan Linge	5.415	5.342	10.757	101.37
2.	Kecamatan Silih Nara	12.051	11.730	23.781	102.74
3.	Kecamatan Bebesen	21.003	20.670	41.673	101.61
4.	Kecamatan Bies	3.728	3.832	7.560	97.29
5.	Kecamatan Rusip Antara	4.061	3.681	7.742	110.32
6.	Kecamatan Atu Lintang	3.946	3.637	7.583	108.50
7.	Kecamatan Pegasing	10.474	10.056	20.530	104.16
8.	Kecamatan Bintang	5.126	5.101	10.227	100.49
9.	Kecamatan Jagong Jeget	5.408	5.071	10.479	106.65
10.	Kecamatan Ketol	7.000	6.691	13.691	104.62
11.	Kecamatan Kebayakan	8.587	8.464	17.051	101.45

1	2	3	4	5	6
12.	Kecamatan Kute Panang	4.313	4.098	8.411	105.25
13.	Kecamatan Celala	4.899	4.753	9.652	103.07
14.	Kecamatan Lut Tawar	11.307	10.916	22.223	103.58
Jumlah Total		107.318	104.402	211.360	103.15

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2012

Menurut data diatas jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan kecuali pada Kecamatan Bies jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2008 s/d 2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Laki	74.401	85.604	97.613	104.584	107.318
Perempuan	72.146	83.257	94.777	101.500	104.042
Rasio	103.13	102.82	102.99	103.04	103.15
Jumlah	146.547	168.861	192.390	206.084	211.360

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2012

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah relatif tinggi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya mobilitas penduduk antar wilayah juga dipengaruhi oleh faktor mortalitas. Data di atas menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 9,71 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15,23 persen dan tahun 2010 sebesar 13,93 persen.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dihitung berdasarkan sembilan sektor perekonomian yang masing-masing memberikankontribusi pada perekonomian daerah dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing sektor penyusunnya.

Untuk membandingkan kontribusi suatu sektor terhadap total PDRB digunakan angka PDRB atas dasar harga berlaku. Menurut kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB pada tahun 2011, sektor pertanian masih menduduki urutan tertinggi, yaitu sebesar 45,76 persen, disusul kemudian oleh sektor konstruksi dengan 19,46 persen dan sektor jasa sebesar 13,14 persen.

Tabel 2.14
 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB
 Kab. Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2011
 Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor	2007		2008		2009		2010		2011	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	1.066.711,68	55,93	1.127.240,01	52,16	1.195.225,67	49,65	1.285.289,80	47,86	1.380.172,01	45,76
2	Pertambangan & Penggalian	10.511,65	0,55	12.844,41	0,59	15.330,24	0,64	17.875,28	0,67	19.707,51	0,65
3	Industri Pengolahan	37.831,92	1,98	41.501,48	1,92	45.265,94	1,88	47.749,94	1,78	51.215,50	1,70
4	Listrik, gas & air bersih	7.689,22	0,37	9.086,63	0,42	10.356,79	0,43	12.803,00	0,48	14.939,78	0,50
5	Konstruksi	202.392,69	10,09	284.172,56	13,15	377.263,58	15,67	467.131,04	17,39	586.996,87	19,46
6	Perdagangan, hotel & Restoran	169.234,78	8,87	201.348,38	9,32	223.032,90	9,27	250.858,57	9,34	287.011,93	9,52
7	Pengangkutan & komunikasi	115.006,97	5,45	131.816,04	6,10	152.342,79	6,33	183.341,36	6,83	218.704,51	7,25
8	Kuangan, sewa & jasa perusahaan	39.378,51	2,06	43.910,28	2,03	48.206,57	2,00	53.805,67	2,00	60.937,49	2,02
9	Jasa-jasa	280.204,90	14,69	309.304,06	14,31	340.076,19	14,13	366.719,24	13,66	396.472,49	13,14
	PDRB	1.928.962,32	100	2.161.224,37	100	2.407.100,68	100	2.685.573,89	100	3.016.158,07	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Peranan sektor pertanian mengalami penurunan dari 55,93persen pada tahun 2007 menjadi 45,76persen pada tahun 2011, hal ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mulai bergeser dari sektor primer yang didominasi sektor pertanian ke sektor tersier, sektor lainnya yang mengalami penurunan adalah sektor jasa-jasa yaitu sebesar 14,69persen di tahun 2007 menjadi 13,14persen di tahun 2011, sektor Industri Pengolahan pada tahun 2007 sebesar 1,98persen menjadi 1,70persen tahun 2011 dan sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan pada tahun 2007 sebesar 2,06persen menjadi 2,02persen tahun 2011.

Sedangkan sektor-sektor yang mengalami peningkatan terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Tengah adalah sektor konstruksi pada tahun 2007 kontribusinya mengalami peningkatan dari 10,09persen menjadi 19,46persen di tahun 2011, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran pada tahun 2007 sebesar 8,87persen meningkat menjadi 9,52persen di tahun 2011, sektor Pengangkutan & Komunikasi pada tahun 2007 sebesar 5,45persen meningkat menjadi 7,25persen di tahun 2011, sektor Listrik, Gas & Air Bersih pada tahun 2007 sebesar 0,37persen meningkat menjadi 0,50persen di tahun 2011 dan sektor Pertambangan & Penggalian pada tahun 2007 sebesar 0,55persen meningkat menjadi 0,65persen pada tahun 2011. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2011

No	Sektor	Pertumbuhan				
		Hk (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	5.85	0.27	0.21	0.31	1.23
2	Pertambangan & Penggalian	1.84	2.13	2.29	3.93	4.02
3	Industri Pengolahan	2.60	4.25	4.46	3.71	3.91
4	Listrik, gas & air bersih	-0.76	43.79	15.48	16.79	10.97
5	Konstruksi	4.89	9.83	7.25	8.03	8.77
6	Perdagangan, hotel & Restoran	6.04	10.58	9.25	7.81	8.59
7	Pengangkutan & komunikasi	7.27	9.16	5.82	8.61	7.20
8	Keuangan, sewa & jasa perusahaan	7.54	5.37	5.57	6.08	5.64
9	Jasa-jasa	6.26	8.05	7.13	7.16	7.35
	PDRB	5.82	4.79	4.03	4.32	4.93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mengalami fluktuasi setiap tahun, pada tahun 2007 sebesar 5,82 persen dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 4,79persen hal ini dipengaruhi oleh berakhirnya kegiatan *rehab* dan *rekon* oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Perekonomian Kabupaten Aceh Tengah kembali terjadi peningkatan dari tahun 2009 yaitu 4,03 persen menjadi 4,93 persen di tahun 2011.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan perbandingan antara PDRB*riil* (menurut harga berlaku) dengan PDRB *nominal* (menurut harga konstan) yang memberikan gambaran peningkatan harga seluruh barang dan jasa, inflasi merupakan hal yang umum terjadi di setiap daerah. Gambaran inflasi di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s/d 2011

No	Sektor	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian	3,39	5,39	5,80	7,20	6,08
2	Pertambangan & Penggalian	3,20	19,64	16,68	12,19	5,99
3	Industri Pengolahan	5,58	5,22	4,42	1,72	3,22
4	Listrik, gas & air bersih	14,98	-17,81	-1,30	5,85	5,16
5	Konstruksi	18,43	27,84	23,79	14,62	15,53
6	Perdagangan, hotel & Restoran	14,92	7,59	1,39	4,33	5,36
7	Pengangkutan & komunikasi	18,98	5,00	9,21	10,81	11,28
8	Keuangan, sewa & jasa perusahaan	40,86	5,83	3,99	5,22	7,20
9	Jasa-jasa	7,32	2,16	2,63	0,63	0,71
	PDRB	7,86	5,92	7,06	6,95	7,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Dilihat dari harga inflasi bahwa pada tahun 2007 inflasi Kabupaten Aceh Tengah berada pada level 7,86 persen dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 7,03 persen, rata-rata

inflasi terbesar terjadi pada sektor konstruksi. Perbandingan inflasi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.17
Inflasi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2011

Tahun	Inflasi Nasional	Inflasi (%) Provinsi Aceh	Inflasi Kabupaten Aceh Tengah
2007	6,59	9,41	7,86
2008	11,06	11,92	5,92
2009	2,78	3,72	7,06
2010	6,96	5,86	6,95
2011	3,79	3,43	7,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2011

Laju inflasi nasional Tahun 2011 sebesar 3,79 persen, Provinsi Aceh 3,43 persen sedangkan inflasi di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011 sebesar 7,03 persen, hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Tengah berada diatas rata-rata inflasi nasional dan provinsi.

2.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah wilayah, dimana semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur pula tingkat perekonomian penduduk pada wilayah tersebut. Pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan dan harga berlaku pada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.18
PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2011
(Rupiah)

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2007	11.295.938,99	9,89	6.113.665,52	1,88
2008	12.732.482,82	10,07	6.588.200,41	2,94
2009	13.933.931,93	9,44	6.588.200,41	2,22
2010	15.300.061,49	9,80	6.763.853,88	2,67
2011	16.798.804,05	9,80	6.938.611,06	2,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, 2012

Pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) masih dibawah rata-rata nasional, namun diatas rata-rata Provinsi Aceh. Tabel berikut menggambarkan PDRB Perkapita Nasional dan Provinsi Aceh.

Tabel 2.19
PDRB Perkapita Nasional dan Provinsi Aceh Tahun 2007 s.d 2011

RINCIAN	2007	2008	2009	2010	2011
PDB PERKAPITA NASIONAL (ADHB)	17.179.215,67	21.013.538,84	23.647.682,56	26.786.768,35	30.424.351,68
PDRB PER KAPITA ACEH (ADHB)	11.783.170	12.571.520	13.368.490	14.481.970	15.586.890

Sumber : : Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, 2012

2.2.1.4. Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kabupaten Aceh Tengah sudah pernah melaksanakan program transmigrasi yang ditempatkan pada Kecamatan Jagong Jeget dan Atu Lintang beberapa tahun yang lalu. Keberhasilan dalam melaksanakan program tersebut dilanjutkan dengan membuat kembali program daerah transmigrasi baru.

A. Lokasi Transmigrasi Baru

Sejak tahun 2007 hingga 2010, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengusulkan pembentukan daerah transmigrasi baru, namun baru terwujud pada tahun 2010 di Desa Relas Pamar, Kecamatan Rusip Antara. Permasalahan dari lokasi transmigrasi baru ini antara lain adalah kesulitan masalah transportasi, namun sejauh ini kondisi jalan sedang diperbaiki dengan menggunakan dana APBN. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan menyelesaikan perbaikan jalan ke Relas Pamar dan Desa Tanjong sebagai kawasan transmigrasi, sehingga masalah transportasi bisa diatasi.

B. Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Baru

Relas Pamar sebagai daerah transmigrasi baru pada tahun 2011 dihuni oleh 38 kepala keluargayang berasal dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kepala keluarga yang layak ditempatkan di wilayah transmigrasi baru ini diverifikasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tengah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Permasalahan dalam transmigrasi baru ini antara lain; 1) unit penghubung transmigrasi (UPT) belum bekerja secara optimal karena belum ada tempat untuk tinggal di lokasi permukiman transmigrasi; 2) warga transmigrasi belum bisa menggarap lahan secara optimal

karena belum adanya pembinaan dari dinas teknis terkait pengelolaan lahan dan pengelolaan tanaman untuk meningkatkan perekonomian warga transmigrasi.

C. Kawasan Transmigrasi

Kawasan Trasmigrasi saat ini di Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas 1.797,00 Ha terdiri dari :

1. Transmigrasi Kecamatan Atu Lintang seluas 1.100,83 Ha.
2. Transmigrasi Kecamatan Linge seluas 696 Ha,

Untuk kawasan transmigrasi di Kecamatan Linge yang juga merupakan kawasan pengembangan peternakan, untuk wilayah pemukimannya terletak pada kawasan peruntukan lainya, sedangkan kawasan usaha peternakan di intergrasikan dengan kawasan Hutan Produksi.

2.2.1.5. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Kabupaten Aceh Tengah pada dasarnya mengalami kemajuan dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir, hal ini dapat lihat dari perkembangan penurunan tingkat kemiskinan dari 24,41 % pada tahun 2007 menjadi 19,58 % ditahun 2011 yang lalu, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menanggulangi kemiskinan daerah, ditambah peran serta masyarakat dan partisipasi berbagai stakeholder bersinergi untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan, untuk lebih jelasnya persentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah
dengan Rata-rata Provinsi dan Rata-rata Nasional
Tahun 2007-2011

NO	Wilayah	Tingkat Kemiskinan (%)				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Kabupaten Aceh Tengah	24,41	23,36	21,43	20,01	19,58
2	Aceh	26.65	23.53	21.80	20.98	19.57
3	Rata-rata Nasional	16.58	15.42	14.15	13.33	12.49

Sumber: BPS Aceh Tengah 2012

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

- 1) Adanya kampung yang masih terisolir karena sangat jauh dari pusat Ibukota Kabupaten, dan masih terbatasnya akses transportasi umum yang dapat digunakan masyarakat.
- 2) Potensi ekonomi dikawasan kantong-kantong kemiskinan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Minimnya jumlah dan kualitas sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan, energi/listrik, telekomunikasi, fasilitas pendidikan, ketersediaan layanan kesehatan;
- 4) Kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat miskin pada umumnya masih rendah sehingga tidak mampu memberdayakan dirinya dan masyarakat sekitarnya;

- 5) Terdapatnya kepala keluarga perempuan yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga yang menyebar disetiap kecamatan.

Berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. (Maret 2012), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dapat digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui sebaran kemiskinan per kecamatan yang dihitung berdasarkan penghasilan secara skala nasional, sebarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu
Kabupaten Aceh Tengah

Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu			
1	2				3			
Kecamatan	Kel 1	Kel 2	Kel 3	Total	Kel 1	Kel 2	Kel 3	Total
Linge	509	309	315	1.133	2.367	1.207	1.200	4.774
Atu lintang	205	193	235	633	904	771	882	2.557
Jagong Jeget	403	248	266	917	1.722	952	980	3.654
Bintang	850	385	302	1.537	3.802	1.477	1.024	6.303
LautTawar	386	190	214	790	1.876	842	811	3.529
Kebayakan	337	206	227	770	1.512	819	813	3.144
Pegasing	743	417	433	1.593	3.498	1.724	1.663	6.885
Bies	189	128	147	464	847	517	539	1.903
Bebesen	520	307	431	1.258	2.569	1.288	1.713	5.570
Kute Panang	332	180	134	646	1.415	641	443	2.499
Silih Nara	1.224	460	342	2.026	5.358	1.712	1.181	8.251
Ketol	345	160	147	652	1.543	614	490	2.647
Celala	706	299	264	1.269	3.108	1.116	922	5.146
Rusip Antara	473	243	268	984	2.020	907	968	3.895

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012

Catatan :

Kel 1 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)

Kel 2 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)

Kel 3 : (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)

Dari tabel di atas jumlah rumah tangga/individu tertinggi dengan kondisi kesejahteraan terendah (1,2 dan 3)terdapat di Kecamatan Silih Nara, ini dapat diartikan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar rumah tangga/individu miskin terbesar, dan jumlah rumah tangga/individu miskin terendah terdapat di Kecamatan Bies.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebesar 97,47 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf kemudian meningkat menjadi 98,41 persen pada tahun 2011

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh tahun 2011 sebesar 96,95 persen, capaian angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Aceh Tengah sudah lebih baik. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka melek huruf daerah sudah lebih tinggi.

Tabel 2.22
Angka Melek Huruf Dewasa Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007-2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1	Linge	97.43	97.53	98.09	98.16	97.51
2	Bintang	97.37	86.80	98.07	98.69	98.59
3	LutTawar	98.07	98.86	98.13	98.64	97.89
4	Kebayakan	97.38	98.75	98.25	98.66	98.48
5	Pegasing	97.16	99.62	98.39	98.64	98.51
6	Bebesen	98.00	99.79	98.10	98.44	98.45
7	Kute Panang	97.03	98.02	97.07	98.84	98.64
8	Silih Nara	97.19	98.11	97.99	98.63	98.47
9	Ketol	97.35	98.78	97.44	98.75	98.59
10	Celala	96.51	98.65	98.74	98.47	98.53
11	Jagong Jeget	97.36	98.59	98.71	98.69	98.63
12	Atu Lintang	97.09	98.23	98.07	98.69	98.70
13	Bies	97.47	98.50	98.74	98.84	98.60
14	Rusip Antara	97.48	98.17	98.14	98.69	98.63
Aceh Tengah		97,47	98,08	98,13	98,60	98,41
Aceh		94,51	95,94	96,39	96,88	96,95
Nasional		91,87	92,19	92,58	92,91	92,99

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah; 2012

B. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2010 sebesar 9,52 Tahun lebih tinggi dari rata-rata Aceh (8,81) seperti tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007-2012

No	Kecamatan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Linge	8,70	9,28	9,30	9,44	9,55	9,70
2	Bintang	9,11	9,28	9,38	9,40	9,60	9,61
3	LutTawar	9,47	9,49	9,89	9,92	9,88	9,80
4	Kebayakan	9,25	9,25	9,44	9,42	9,59	9,70
5	Pegasing	9,27	9,28	9,39	9,52	9,55	9,67
6	Bebesen	9,13	9,29	9,42	9,48	9,58	9,68
7	Kute Panang	9,29	9,27	9,36	9,41	9,51	9,70
8	Silih Nara	9,27	9,29	9,40	9,50	9,55	9,70
9	Ketol	9,80	9,28	9,31	9,54	9,61	9,69
10	Celala	9,23	9,27	9,38	9,46	9,62	9,69
11	Jagong Jeget	9,30	9,24	9,39	9,52	9,58	9,69
12	Atu Lintang	9,29	9,09	9,43	9,42	9,62	9,72
13	Bies	9,36	9,18	9,24	9,49	9,56	9,73
14	Rusip Antara	9,34	9,30	9,31	9,45	9,65	9,71
Aceh Tengah		9,27	9,29	9,44	9,52	9,61	9,70

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2012

C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sedang sekolah di jenjang tertentu dengan jumlah murid kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI	26.330	26.081	26.083	26.373	26.556	25.902
1.2.	APK SD/MI	110,45	109,36	108,12	107,37	114,01	108,21
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMP/MTs	9.882	10.458	10.488	10.237	10.479	10.480
2.2.	APK SMP/MTs	84,30	89,22	88,07	98,69	101,60	103,37
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikanSMA/MA/SMK	8.483	8.755	8.676	8.475	8.486	8.712
3.2.	APK SMA/MA/SMK	75,87	78,30	76,76	85,05	92,06	90,16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2013

APK SD/MI menunjukkan angka perkembangan yang menggembirakan, hal ini berarti daya tampung pendidikan SD/ MI telah melampaui anak usia sekolah (7 s/d 12 tahun) pada tahun 2012 bernilai 115,09 %, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan jenjang SD/MI.

D. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa usia sedang sekolah di jenjang tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

NO	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	21.789	21.967	22.873	22.486	22.443	22.645
1.3.	APM SD/MI	91,83	92,58	94,81	95,82	96,99	98,39
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.641	8.586	8.922	8.242	7.903	8.083
2.3.	APM SMP/MTs	65,43	73,53	75,17	76,12	76,86	77,51
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	6.548	7.694	7.879	6.985	6.510	6.636
3.3.	APM SMA/MA/SMK	58,56	68,81	69,85	70,12	70,90	69,23

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, 2013 (data diolah)

Indikator APM juga menunjukkan perbaikan tahun 2012 APM SD/MI 115,9; APM SMP/MTs 76,88 dan APM SMA/MA/SMK 70,98.

2.2.2.2. Kesehatan

A. Angka kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel berikut merupakan data angka kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 2007 hingga 2012.

Tabel 2.26
Angka Kematian Bayi Tahun 2007 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2		3	4	5	6	7
1	Linge	2	5	-	5	4	1
2	Atu Lintang	0	2	-	4	9	3
3	Jagong Jeget	0	4	1	6	5	4
4	Bintang	1	6	1	3	6	2

1	2		3	4	5	6	7
5	Lut Tawar	1	6	1	11	14	9
6	Kebayakan	4	6	2	8	17	0
7	Pegasing	5	9	1	2	4	3
8	Bies	0	2	-	1	4	0
9	Bebesen	5	13	4	9	29	5
10	Kute Panang	3	3	-	0	0	0
11	Silih Nara	4	3	-	2	4	6
12	Ketol	1	7	3	4	5	7
13	Celala	0	2	1	4	1	0
14	Rusip Antara	-	2	-	2	9	0
Jumlah		26	70	14	61	111	43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah, 2012

Dari data di atas tergambar bahwa angka kematian bayi pada tahun 2012 menurun dari 111 kematian pada tahun 2011 menjadi 43 kasus, kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Lut Tawar sebanyak 9 kasus.

B. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kematian ibu melahirkan berarti ibu yang meninggal pada saat melahirkan pada tahun tertentu. Angka kematian ibu melahirkan dalam kurun waktu 2007 sampai 2011 yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2007-2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Linge	0	0	0	1	0	1
2	Atu Lintang	0	0	0	1	0	0
3	Jagong Jeget	0	0	0	3	0	0
4	Bintang	2	0	1		0	0
5	Lut Tawar	1	1	0	1	0	0
6	Kebayakan	2	0	0		0	0
7	Pegasing	0	0	0	2	1	0
8	Bies	0	1	0		0	0
9	Bebesen	0	2	3		2	0
10	Kute Panang	0	0	0	1	0	0
11	Silih Nara	0	1	0		0	0
12	Ketol	0	0	1		0	0
13	Celala	0	1	1		0	0
14	Rusip Antara	0	1	0		0	1
Jumlah		5	7	6	9	3	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah, 2012

Dari data di atas terlihat, kematian ibu melahirkan tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebanyak 9 kasus, sedangkan kasus terendah terjadi pada tahun 2012 sebanyak 2 kasus. Penyebab terjadinya kasus kematian ibu melahirkan di Aceh Tengah karena terlambatnya penanganan persalinan.

C. Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular (HIV-AIDS)

Sampai saat ini penyakit HIV AIDS merupakan salah satu penyakit yang amat ditakuti oleh masyarakat. Tabel di bawah ini merupakan jumlah angka kesakitan akibat penyakit menular HIV AIDS yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah penderita HIV /AIDS di Kabupaten Aceh Tengah relatif sedikit, namun karena sifat penyakit ini yang mudah menular diperlukan kewaspadaan dan antisipasi sedini mungkin, berikut tabel penyebaran Penyakit HIV /AIDS di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 2.28
Jumlah Kesakitan akibat penyakit menular HIV-AIDS Tahun 2007-2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Linge	-	-	-	-	-	-
2	Atu Lintang	-	-	-	-	-	-
3	Jagong Jeget	-	-	-	-	-	-
4	Bintang	-	-	-	-	-	-
5	Lut Tawar	-	-	-	1	1	-
6	Kebayakan	-	-	-	-	-	-
7	Pegasing	-	-	-	-	-	-
8	Bies	-	-	-	-	-	-
9	Bebesen	-	1	1	1	2	2
10	Kute Panang	-	-	-	-	-	-
11	Silih Nara	1	1	1	1	1	1
12	Ketol	-	-	-	-	-	-
13	Celala	-	-	-	-	-	-
14	Rusip Antara	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	2	2	3	4	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah, 2012

D. Jumlah Kesakitan Akibat Penyakit Malaria

Dari tahun ke tahun jumlah kesakitan akibat penyakit malaria di Kabupaten Aceh Tengah terus menurun seperti diperlihatkan oleh tabel disamping.

Tabel 2.29
Jumlah Kesakitan akibat Penyakit Malaria Tahun 2007-2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Linge	4	0	1	4	0	0
2	Atu Lintang	13	3	1	4	0	2
3	Jagong Jeget	24	0	0	12	3	1
4	Bintang	0	0	1	11	1	0
5	Lut Tawar	16	3	2	0	0	0
6	Kebayakan	1	2	0	0	0	0
7	Pegasing	33	2	0	0	0	0
8	Bies	12	1	20	1	0	0
9	Bebesen	0	9	4	0	3	0
10	Kute Panang	10	1`	3	0	4	0
11	Silih Nara	6	3	2	0	2	1
12	Ketol	82	2	8	8	0	1
13	Celala	4	2	2	2	0	0
14	Rusip Antara	0	0	1	21	7	3
Jumlah		218	28	45	63	20	8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah, 2012

Data di atas menunjukkan penurunan yang berarti dalam kasus penyakit malaria, dimana pada tahun 2011 hanya terdapat 20 kasus. Angka ini menurun dari 63 kasus pada 2010 sedangkan pada tahun 2012 hanya ditemukan 8 kasus. Ini merupakan hal yang positif meski pemerintah tetap harus mewaspadai benih penyakit ini agar Aceh Tengah bebas dari malaria.

E. Angka harapan hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Tabel di bawah ini menyajikan AHH Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2007 sampai 2012. Data di atas menunjukkan AHH penduduk Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya berkisar di angka 69 dan dari 2008 hingga 2011 angka harapan hidup ini semakin meningkat.

Tabel 2.30
Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Hasil Sensus Penduduk					
Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
69,83	69,42	69,53	69,64	69,70	69,7

Sumber : BPS Aceh Tengah, 2012

F. Jumlah balita gizi buruk

Balita gizi buruk masih saja ada di Kabupaten Aceh Tengah seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Data di bawah menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah jumlah balita penderita Gizi buruk relatif sedikit pada tahun 2012 hanya ditemukan 4 kasus.

Tabel 2.31
Jumlah balita gizi buruk
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah balita gizi buruk	-	3	2	3	3	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah, 2012

2.2.2.3. Sosial

A. Penyandang Masalah Sosial

Tabel 2.32
Jumlah Penyandang Masalah Sosial Tahun 2010-2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Penyandang Masalah Sosial	Tahun		
		2010	2011	2012
1	Fakir Miskin	2.753	5.313	5.313
2	Anak Terlantar	244	244	245
3	Lanjut Usia Terlantar	1.114	1.114	1.058
4	Penyandang Cacat	478	478	480
5	Penyandang Tuna Netra	28	28	30
6	Penyandang Tuna Rungu	2	2	2
7	Penyandang Tuna Wicara	56	56	45
8	Penyandang Tuna Wicara - Rungu	337	337	337
9	Penyandang Tuna Daksa	335	335	339
10	Penyandang Tuna Grahita	1	1	-
11	Penyandang Cacat Ganda	335	335	335
12	Pengungsi dan Korban Bencana	212	534	329
13	Pembinaan eksNarapidana	39	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Data di atas menunjukkan penyandang masalah sosial di Kabupaten Aceh Tengah relatif tidak berubah dari tahun ke tahun.

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

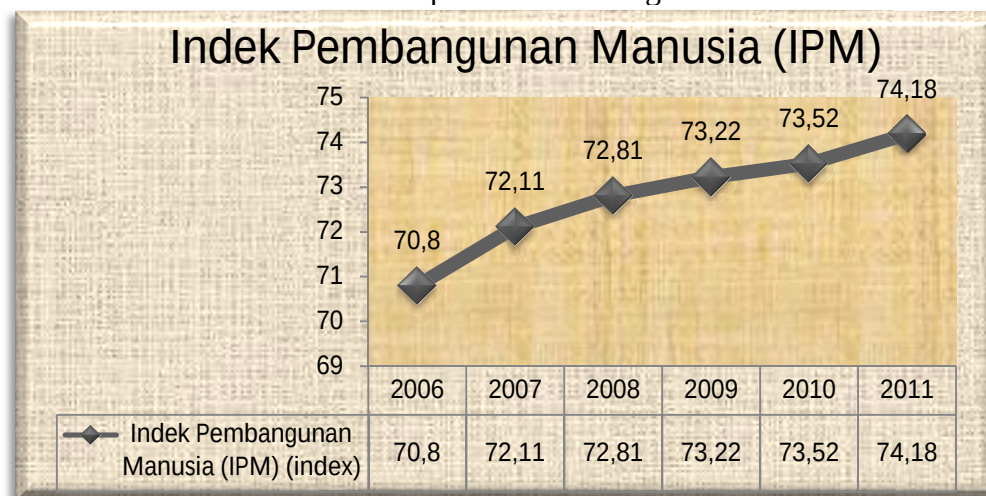
Nilai IPM Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami peningkatan selama kurun waktu Tahun 2006-2011. Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Aceh Tengah adalah 72,11 dimana angka ini termasuk pada golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, sehingga dibutuhkan beberapa peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk menuju IPM tinggi yang memiliki nilai batas 80-100. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Aceh Tengah mencapai 74,18 atau mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen dari IPM tahun 2007.

Dibandingkan dengan IPM Provinsi Aceh sebesar 72,16, IPM Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011 lebih tinggi sebesar 2,21.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh 1) Angka harapan hidup 2) Persentase Melek huruf usia 15 tahun ke atas, yang didukung dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah yang tinggi. Gambar di bawah ini menampilkan IPM Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 sampai 2011.

Gambar 2.3

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2011
Kabupaten Aceh Tengah



Sumber : Data Pokok Kabupaten Aceh Tengah, 2012

2.2.1.5. Perdamaian

Setelah di tandatanganinya nota kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helhsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Sejak saat itu dimulailah babak baru perdamaian di Provinsi Aceh dengan disepakatinya penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat. Untuk memfasilitasi penyelesaian kerugian materil dan jiwa akibat korban konflik yang terjadi di Provinsi Aceh maka dibentuklah sebuah Lembaga yang bernama Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sehingga diharapkan perdamaian yang disepakati dapat diwujudkan.

Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Tengah dibentuk dengan surat Keputusan Bupati Nomor 091 tahun 2006 tanggal 31 September 2006 dan disempurnakan dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 567 tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007. Sampai saat ini BRA Kabupaten Aceh Tengah telah menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada Mantan kombatan GAM, Relawan PETA dan Korban Konflik sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.33
Distribusi Bantuan Mantan GAM, Relawan PETA dan Korban Konflik

No	Jenis Bantuan	Tahun	Jumlah Bantuan		Nominal (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bantuan Dana Pembangunan Rumah	2005	636	Unit	Rp.34.500.000	
		2006	50	Unit	Rp.35.000.000	
		2008	550	Unit	Rp.40.000.000	
		2009	500	Unit	Rp.40.000.000	
		2010	350	Unit	Rp.40.000.000	
		2011	120	Unit	Rp.40.000.000	
Total			2206	Unit		
2.	Bantuan Pola Diyat	2005	605	Orang	Rp.3.000.000	
		2007	670	Orang	Rp.3.000.000	
		2008	400	Orang	Rp.3.000.000	
Total			1675	Orang		
3.	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Korban Cacat Karena Konflik	2006	7	Orang	Rp.10.000.000	
		2007	36	Orang	Rp.10.000.000	
		2008	25	Orang	Rp.10.000.000	
Total			68	Orang		
4.	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Mantan Anggota GAM	2006	105	Orang	Rp.25.000.000	
Total			105	Orang		
5.	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Mantan TAPOL/NAPOL	2006	13	Orang	Rp.10.000.000	
		2007	15	Orang	Rp.10.000.000	
		2008	20	Orang	Rp.10.000.000	
Total			48	Orang		
6.	Pemberdayaan Ekonomi Mantan Anggota GAM Non Kombatan	2006	149	Orang	Rp.10.000.000	
Total			149	Orang		
7.	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Relawan PETA	2006	190	Orang	Rp.10.000.000	
		2007	63	Orang	Rp.10.000.000	
Total			253	Orang		
8.	Pemberdayaan Ekonomi Bagi Mantan Anggota GAM Yang Menyerah	2006	90	Orang	Rp.10.000.000	
		2008	16	Orang	Rp.10.000.000	
Total			106	Orang		
9.	Bantuan Pendidikan Anak Korban Konflik	2009	822	Orang Anak	Rp.1.800.000	
Total			822	Orang		

Sumber : Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Tengah tersebut belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ditimbulkan akibat konflik, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus memfasilitasi keberlanjutan perdamaian.

2.2.2.6. Kepemilikan Lahan

Kesadaran masyarakat untuk memastikan kepastian hukum kepemilikan lahan yang dimilikinya masih sangat kurang hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah yang dapat dilihat dari jumlah penertiban sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Aceh Tengah seperti tabel berikut ini dimana pada tahun 2012 jumlah pengurusan hak milik sebanyak 364 sertifikat jauh lebih rendah dari tahun 2011 yang mencapai 1.113 sertifikat.

Tabel 2.34
Kepemilikan Lahan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2010-2012

No	Hak atas tanah	Tahun			Satuan
		2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Tanah yang bersertifikat				
	1. Hak Milik	2.159	1.104	23.34	Bidang
	2. Hak Guna Bangunan	2	1	1	Bidang
	3. Hak Guna Usaha	-	-	-	
	4. Hak Pakai	10	7	11	Bidang
	5. Girik				
2	Bangunan / Gedung				
	1. Sertifikat Bangunan / Gedung				
	2. Tanah Bersertifikat	21.71	11.12	23.46	Bidang
3	Bangunan / Gudang Bersertifikat				
	1. Hak Milik				
	1.) Jumlah	21.59	11.04	23.34	Bidang
	2.) Luas	8.213.811	5.037.943	5.594.623	M ²
	2. Hak Guna Bangunan				
	1.) Jumlah	2	1	1	Bidang
	2.) Luas	1.679	479	327	
	3. Hak Pakai				
	1.) Jumlah	10	-	11	Bidang
	2.) Luas	8.007	-	66.660	M ²
4	Tanah Pertanian / Perkebunan / Ladang Bersertifikat				
	1. Hak Milik	-	425	321	Bidang
	1.) Jumlah	575	176.328.005	167.838,7	M ²

1	2	3	4	5	6
	2.) Luas	2.874.834	-	-	M ²
	2. Hak Guna Bangunan				
	1.) Jumlah	2	-	-	Bidang
	2.) Luas	1679	-	-	M ²
	4. Hak Pakai				
	1.) Jumlah	10	7	-	Bidang
	2.) Luas	8.007	18.881	-	M ²

Perbandingan jumlah lahan perkebunan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah seluas 48.000 Ha yang mempunyai sertifikat hanya 167.838,7 M² atau hanya 168 Ha.

2.2.2.7. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

A. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dalam kurun waktu 2007-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Penduduk Angkatan Kerja dan Bekerja
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012

No	Kecamatan	Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Angkatan Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bekerja
1	Linge	4.241	3.434	4.798	3.434	5.606	4.807	6.349	5.482	6.576	4.914	7.157	5.438
2	Silih Nara	12.542	8.080	12.658	9.180	13.137	11.276	14.874	12.832	15.199	11.773	15.831	12.161
3	Bebesena	13.918	9.235	14.457	10.427	22.178	18.830	25.759	22.462	26.765	20.708	28.145	21.393
4	Bies	3.236	1.966	2.895	1.966	4.201	3.676	4.693	3.870	4.809	3.905	5.072	4.029
5	Rusip Antara	2.923	1.778	2.620	1.778	4.218	3.765	4.522	3.746	4.731	3.320	5.082	3.534
6	Atu Lintang	3.425	2.081	3.065	2.081	4.448	3.827	4.815	4.144	4.891	3.709	5.033	3.779
7	Pegasing	11.023	7.000	11.165	7.950	11.084	9.493	12.521	10.824	12.946	9.734	13.616	10.116
8	Bintang	4.546	3.167	4.430	3.167	5.445	4.642	6.325	5.493	6.603	5.245	6.838	5.442
9	Jagong Jeget	4.063	2.460	3.623	2.460	5.676	4.855	6.378	5.521	6.562	5.203	7.045	5.467
10	Ketol	5.009	3.070	6.523	5.070	7.332	6.433	8.903	7.511	8.750	6.633	9.319	7.008
11	Kebayakan	6.402	4.104	6.997	5.105	8.596	7.310	10.556	9.190	10.790	8.543	11.458	8.867
12	Kuta Panang	3.993	2.246	3.808	2.745	4.471	3.981	5.221	4.337	5.307	4.092	5.581	4.227
13	Celala	3.497	2.451	3.252	2.451	4.893	4.313	5.861	4.920	6.053	4.391	6.317	4.637
14	Lut Tawar	9.423	6.193	9.929	7.243	11.901	9.892	14.153	12.593	14.467	11.331	15.114	11.621
TOTAL		88.241	57.265	90.220	65.057	113.186	97.100	130.930	112.923	134.449	103.501	141.608	107.719

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Tengah, 2012

Dari data, dapat disimpulkan bahwa persentase jumlah angkatan kerja pada tahun 2011 di tiap kecamatan relatif tinggi, yakni diatas 90%. Angka ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 - 2011

Jenis Kegiatan	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah (L + P)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angkatan Kerja	89,34	88,82	82,45	68,60	69,23	47,69	79,04	79,06	65,24
Sekolah	77,70	70,17	53,07	42,93	39,95	21,52	51,82	47,76	29,56
Mengurus RT	1,32	2,57	6,92	48,82	50,90	70,67	36,67	37,94	54,42
Lainnya	20,98	27,26	40,01	8,25	9,55	7,82	11,50	14,30	16,02
Bukan Angkatan Kerja	10,66	11,18	17,55	31,40	30,77	52,31	20,94	20,94	34,76

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah

Persentase angkatan kerja laki-laki sedikit lebih tinggi dari persentase angkatan kerja perempuan. Persentase angkatan kerja perempuan cenderung berfluktuatif, yang dipengaruhi oleh naik turunnya wanita yang mengurus rumah tangga.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.37
Jumlah TPAK DAN TPT Kabupten Aceh Tengah Tahun 2010-2011

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Laki - Laki	89,34	88,82	82,45	3,40	1,76	5,03
Perempuan	68,60	69,23	47,69	5,51	3,58	2,93
L + K	79,04	79,06	65,21	4,31	2,55	3,98

Sumber : Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh tengah; 2012

TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 s/d 64 Tahun; TPT adalah tingkat penangguran terbuka yaitu penduduk angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan. TPT disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja. Tahun 2011 TPT di Aceh Tengah menunjukkan angka 3,98 meningkat dari tahun sebelumnya, peningkatan jumlah penangguran ini dipicu oleh peningkatan pengangguran dari kalangan perempuan, sementara tingkat pengangguran laki-laki menunjukkan penurunan dari tahun ketahun.

Jumlah pencari kerja menunjukkan kecenderungan peningkatan dari golongan intelektual hal ini dapat dilihat dari jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan seperti dapat dilihat pada tabel disamping ini :

Tabel 2.38
Jumlah Pencari Kerja Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Keadaan Tahun 2012

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (L + P)
1	2	3	4
Tidak Pernah Sekolah	-	-	-
Tidak Pernah Tamat Sekolah	-	-	-
SD	-	-	-
SLTP	-	-	-
MTsN	-	-	-
SMA	42	4	46

MAN	9	3	12
SMK/SMEA	10	-	10
SPMA/Pertanian	1	-	1
STM	1	-	1
SPG	-	1	1
SPK	-	-	-
Diploma I	1	-	1
Diploma II	-	-	-
Sarjana Muda	14	360	374
S1	84	50	134
S2	5	2	7
Jumlah	333	380	713

Sumber : Aceh Tengah Dalam Angka, 2012

Pencari kerja terdidik menunjukkan peningkatan baik dari lulusan Sekolah Menengah, Sarjana Muda, Sarjana S1 dan S2. perbandingan tingkat pengangguran regional dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2010 - 2011

No	Kabupaten / Kota	Tahun	
		2010	2011
1	Aceh Tengah	2,55	3,98
2	Bener Meriah	2,25	5,19
	Rata-rata Aceh	8,37	7,43
	Rata-rata Nasional	7,14	6,14

Sumber: RPJMA, 2012

Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan indikator ketenaga kerjaan yang lebih baik dari Kabupaten tetangga yaitu Bener Meriah, provinsi maupun Nasional.

2.2.3. Fokus Syariat Islam, Seni Budaya, Wisata dan Olahraga

2.2.3.1. Syariat Islam

Tabel disamping ini menunjukkan jumlah tempat ibadah yang terdapat di Aceh Tengah meliputi masjid dan menasah.

Tabel 2.40
Data Sarana Ibadah Tahun 2011 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Tahun 2012	
		Masjid	Menasah
1	2	3	4
1	Linge	17	47
2	Bintang	11	23
3	Lut Tawar	9	20
4	Kebayakan	8	36
5	Pegasing	25	58

1	2	3	4
6	Bebesen	21	63
7	Kute Panang	14	24
8	Silih Nara	28	67
9	Ketol	24	60
10	Celala	12	29
11	Jagong Jeget	14	29
12	Atu Lintang	12	32
13	Bies	10	26
14	Rusip Antara	10	25
TOTAL		215	539

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2012

Fungsi tempat ibadah bukan sekedar tempat beribadah bagi umat islam, namun juga dipergunakan sebagai pusat kegiatan umat islam oleh karena itu keberadaan tempat ibadah memegang peran penting.

Dalam upaya meningkatkan moralitas dan ketaqwaan masyarakat juga dilakukan melalui bentuk program pendidikan keagamaan dengan membentuk pelaksanaan pengajian di setiap desa bagi setiap golongan usia penduduk kabupaten Aceh Tengah. Untuk anak-anak dilakukan melalui bentuk taman pengajian anak (TPA) dan untuk kalangan remaja dan dewasa dan ibu-ibu dilakukan dalam bentuk kajian rutin berkala di masjid atau di menasah. Pada tahun 2012 diketahui terdapat sebanyak 238 TPA dengan jumlah guru 1100 dan jumlah santri 13506 orang, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah :

Tabel 2.41
Data Pendidikan Keagamaan Tahun 2011-2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenis Jenjang	Tahun	
	TPA / TPQ	2011	2012
1.	Jumlah TPA/TPQ	304	238
2.	Jumlah Guru	1.000	1.100
3.	Jumlah Murid	10.654	13.506

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2012

Data di atas menunjukkan jumlah TPA/TPQ pada tahun 2012 berkurang menjadi 238 unit dari 304 unit pada tahun 2011, jumlah guru dalam kurun waktu satu tahun meningkat 100. Sampai dengan tahun 2012 prasarana pendidikan keagamaan di kabupaten ini berjumlah 68 unit, terdiri dari sekolah berstatus negeri berjumlah 29 unit dan swasta berjumlah 99 unit, terdiri dari *Raudhatul Athfal (RA)* setingkat dengan Taman-kanak berjumlah 16 unit semuanya berstatus swasta. Jumlah sarana pendidikan RA di Kabupaten ini yang paling banyak terdapat di Kecamatan Lut Tawardan Kecamatan Silih Nara masing-masing sebanyak 4 unit, dan di Kecamatan Bebesen 3 unit. Selanjutnya di Kecamatan Pagasing, Kecamatan Bies, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan

Bintang, Kecamatan Rusip Antara dan Kecamatan Jagong Jeget masing-masing terdapat 1 unit, sedangkan di Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Ketol, Kecamatan Celala dan Kecamatan Kute Panang tidak memiliki sarana pendidikan RA ini. *MI, MTs, MA*. Prasarana pendidikan agama untuk jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di kabupaten ini berjumlah 26 unit di mana 19 unit berstatus negeri dan 7 unit berstatus swasta. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 15 unit dimana sebanyak 7 unit berstatus negeri dan 8 unit berstatus swasta. Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 10 unit dimana sebanyak 3 unit berstatus negeri dan 8 unit masih berstatus swasta. Untuk lebih jelas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Jumlah Prasarana Pendidikan Keagamaan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (unit)	Jumlah murid
1	MIN	30	4231
2	MIS	7	475
3	MTsN	7	2.088
4	MTsS	8	994
5	MAN	3	1.265
6	MAS	7	551
Jumlah		51	9.376

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tengah, 2012

Pelaksanaan kegiatan mengajar sekolah agama di Kabupaten Aceh Tengah, di semua jenjang sekolah di asuh oleh 886 tenaga pengajar, yang terdiri dari 347 tenaga pegawai negeri sipil dan 539 tenaga non pegawai negeri sipil.

Tenaga pengajar di tingkat pendidikan agama ini didominasi oleh tenaga non PNS. Tenaga pengajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah sebesar 382 orang terdiri dari PNS sebanyak 150 orang dan non PNS sebanyak 232 orang. Madrasah Tsanawiyah berjumlah 249 orang guru terdiri dari PNS sebanyak 117 orang dan non PNS sebanyak 132 orang. Tingkat pendidikan Madrasah Aliyah sebanyak 255 orang terdiri dari 80 orang PNS dan 175 orang non PNS.

Selain jenjang pendidikan formal di atas, di Kabupaten Aceh Tengah juga terdapat Taman Pengajian Al-quran(TPA) dan Taman Kanak-Kanak Al-quran (TKA) yang menjadi tempat pengajian dan belajar bagi para santriwan dan santriwati. Keberadaan TPA dan TKA ini sangat didambakan dalam upaya meningkatkan minat baca Alquran dan menanamkan pentingnya pendidikan kepada anak usia dini. Terlihat bahwa seluruh kecamatan dalam kabupaten Aceh Tengah memiliki pendidikan ini. Sebanyak 148 TPQ yang tersebar disemua kecamatan dengan jumlah santri sebanyak 10.420 orang yang terdiri dari laki-laki 4.824 orang dan perempuan sebanyak 5.596 orang.

Sedangkan TKA hanya terdapat di Kecamatan Lut Tawar dengan jumlah santri sebanyak

100 orang yang terdiri dari laki-laki 48 orang dan perempuan sebanyak 52 orang. Persoalannya adalah masih terbatasnya prasarana dan sarana bagi kedua tempat pengajian ini. Untuk masa mendatang, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana TQA dan TKA patut dikedepankan mengingat arah pengembangan pendidikan di daerah ini.

Jenis pendidikan keagamaan lain yang telah berkembang adalah pendidikan dayah atau pendidikan pesantren dan umumnya dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat dalam bentuk yayasan. Terdapat 2 (dua) jenis pendidikan dayah, yaitu pendidikan dayah terpadu yang sudah menerapkan sistem pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan pendidikan dayah salafiyah merupakan sistem pendidikan non formal yang masih menganut sistem pendidikan pola tradisional. Sebaran pendidikan dayah di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2.43
Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012

No	Kecamatan	Jenis Dayah	
		Terpadu	Salafiyah
1.	Linge	-	-
2.	Bintang	-	2
3.	Lut Tawar	-	-
4.	Kebayakan	-	1
5.	Pegasing		
6.	Bebesen	4	-
7.	Kute Panang	-	-
8.	Silih Nara	-	3
9.	Ketol		
10.	Celala	1	-
11.	Jagong Jeget	-	-
12.	Atu Lintang	-	-
13.	Bies	-	-
14.	Rusip Antara	-	-
JUMLAH		5	6

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Awalnya di Kabupaten Aceh Tengah terdapat 32 lembaga pendidikan dayah, namun setelah dilakukan verifikasi ulang, dayah di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 11 dayah, yaitu 5 unit pendidikan dayah terpadu dan 6 unit pendidikan dayah salafiyah. Sedangkan lembaga pendidikan keagamaan lainnya masuk kedalam kategori Balai Pengajian, yaitu sebanyak 21 Balai Pengajian.

A. Pelanggaran Syariat Islam

Pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh segelintir masyarakat yang belum memahami makna syariat Islam secara kaffah baik pelanggaran kasus ringan maupun pelanggaran kasus berat.

Upaya pemberantasan perbuatan yang bertentangan dengan qaidah/ketentuan agama terutama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Tengah terus dilakukan melalui bentuk penyuluhan, sosialisasi dan dakwah maupun pengawasan serta penindakan bagi pelanggaran syariat Islam tersebut. Salah satu bentuk upaya kongkrit telah dilakukan dalam hal ini adalah membentuk tim pengawas pemberantasan maksiat, yang bertujuan untuk melakukan pengawasan bagi pelaku/ pelanggar maksiat sekaligus mengefektifkan kembali lembaga sarak opat sebagai lembaga peradilan adat bagi penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam.

Pengawas syariat Islam tingkat kampung bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diberikan melalui pembinaan dan pengarahan dari Dinas Syariat Islam sehingga pelanggar syariat Islam dapat diminimalisir. Penyelesaian kasus yang terjadi di lapangan dibagi kepada dua bagian: 1) Kasus Ringan; Pelanggaran kasus ringan hanya berupa nasehat agar tidak mengulangi lagi apa yang telah dilakukan pelaggar dengan membuat surat pernyataan/ perjanjian. Dalam tahun 2012 ini terdapat 286 kasus ringan yang terdapat di beberapa kampung yang ada pengawas syariat Islam; 2) Kasus Berat: kasus yang diselesaikan melalui peradilan adat, karena pelanggar tersebut telah melampaui batas kesusilaan, pelanggar tersebut harus menjalankan/ menerima apa yang menjadi keputusan dari peradilan adat kampung. Dalam tahun 2012 terdapat 42 kasus berat yang diselesaikan melalui peradilan adat kampung. Berikut merupakan tabel data kasus pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 2.44
Data Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus		Jumlah	Keterangan
		Ringan	Berat		
1	2	3	4	5	6
1.	Bebesen	9	5	14	
2.	Laut Tawar	-	-	-	
3.	Kebayakan	11	13	24	
4.	Bintang	38	1	39	
5.	Pegasing	8	5	13	
JUMLAH		66	24	90	

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2012

Tabel 2.45
Data Kasus Pelanggaran Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus		Jumlah	Keterangan
		Ringan	Berat		
1	2	3	4	5	6
1.	Bebesen	21	17	38	
2.	Laut Tawar	34	-	34	

1	2	3	4	5	6
3.	Kebayakan	75	17	92	
4.	Bintang	128	1	129	
5.	Pegasing	28	7	35	
JUMLAH		286	42	328	

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2012

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam yang dicirikan dengan rendahnya kemampuan membaca Alquran pada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan syariat Islam seperti tingginya jumlah orang tua yang menelantarkan pembiayaan anak-anaknya, tingginya angka perceraian yang tidak sampai ke pengadilan, pernikahan yang tidak mempunyai bukti sah (tidak terdaftar di KUA). Kemudian, pelanggaran qanun syariat Islam di Aceh Tengah yang masih sering terjadi seperti kejahatan khamar, maisir dan khalwat.

2.2.3.2. Majelis Permusyawaratan Ulama

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2011, yang melandasi pembentukan Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan sekretariat MPU diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan cendikia Islam dalam peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

Jumlah ulama yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sejumlah 108 orang dan cendikia Islam sejumlah 111 orang. Dan diharapkan dalam 5 tahun kedepan jumlah ulama di Kabupaten Aceh Tengah bertambah menjadi 295 orang sesuai dengan jumlah kampung melalui kegiatan pengkaderan dan pembinaan. Berikut merupakan data ulama dan cendikia Islam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012.

Tabel 2.46
Data Ulama dan Cendikia Islam Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2012

No	Unsur	Jumlah
1	Ulama	108
2	Cendikia Islam	111

Sumber: MPU Kabupaten Aceh Tengah, 2013

Jumlah ulama dan cendikia Islam yang ada saat ini relatif kecil dibanding jumlah desa dan penduduk Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu para ulama dan cendikia Islam yang ada relatif sudah sepuh, sehingga perlu dilakukan pengkaderan ulama. Pelanggaran syariat Islam kerap dilakukan oleh segelintir masyarakat yang belum memahami makna syariat Islam secara kaffah. Pelanggaran yang dilakukan berupa kasus ringan sampai pelanggaran berat.

2.2.3.3. Baitul Mal

Zakat bukan sekedar aktifitas penarikan zakat dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan namun mempunyai arti yang lebih besar untuk mendorong ukhuwah, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kemandirian umat islam dalam memberdayakan dirinya. Potensi zakat di Kabupaten Aceh Tengah sangat besar karena sebagian besar penduduk Aceh tengah adalah umat Islam, dalam ajaran Islam pembayaran Zakat merupakan salah satu kewajiban, oleh karena itu pemerintah perlu memfasilitasi dan menginsentififikasi pengumpulan zakat, infaq dan sedeqah.

Baitul mal sebagai lembaga yang menangani ZIS, sampai saat ini potensi zakat di Kabupaten Aceh Tengah belum dapat di kumpulkan secara maksimal berikut gambaran realisasi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012.

Tabel 2.47
Realisasi Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s/d 2012

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan per Tahun (Juta)																	
		Tahun 2007			Tahun 2008			Tahun 2009			Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		Realisasi (Rp)	Muzakki (orang)	Mustahiq (orang)	Realisasi (Rp)	Muzakki (orang)	Mustahiq (orang)	Realisasi (Rp)	Muzakki (orang)	Mustahiq (orang)	Realisasi (Rp)	Muzakki (orang)	Mustahiq (orang)	Realisasi (Rp)	Muzakki (orang)	Mustahiq (orang)	Realisasi (Rp)	Muzakki (orang)	Mustahiq (orang)
1	Zakat	2.689	0	0	3.795	0	0	4.729	0	0	4.469	0	0	5.627	0	0	7.000	0	0
2	Infaq	11	-	-	1.003	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Shadaqah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	50	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lain-lain	34	-	-	67	-	-	52	-	-	1	-	-	32	-	-	50	-	-
5	Fidiyah	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jasa Bank	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantuan Pemda	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dana lain-lain	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.781	0	0	4.952	0	0	5.781	0	0	4.470	0	0	5.661	0	0	7.100	0	0

Sumber Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, 2013

Tabel 2.48
Penyaluran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s/d 2012

No	Kecamatan	Penerima Zakat	Tahun					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Lut Tawar	Fakir	59.200.000	131.350.000	116.350.000	114.800.000	220.400.000	76.450.000
		Miskin	18.050.000	29.000.000	37.400.000	25.400.000	42.750.000	23.500.000
		Amilun	21.570.025	30.690.117	23.310.650	32.894.520	26.545.850	25.277.989
		Sabilullah	6.100.000	12.700.000	9.500.000	30.800.000	40.000.000	14.300.000
		Gharim	3.900.000	3.450.000	4.950.000	5.500.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	500.000	2.000.000	-	-
		Muallaf	800.000	300.000	-	800.000	-	-
	Jumlah		109.620.025	207.490.117	192.010.650	212.194.520	329.695.850	139.527.989
2	Kebayakan	Fakir	53.450.000	50.700.000	90.500.000	80.850.000	226.500.000	82.500.000
		Miskin	24.050.000	23.150.000	37.150.000	23.650.000	79.000.000	41.200.000
		Amilun	12.351.600	28.296.900	21.090.400	22.959.500	69.632.600	21.311.500
		Sabilullah	6.950.000	13.450.000	16.600.000	15.200.000	39.850.000	10.100.000
		Gharim	4.400.000	3.750.000	1.950.000	6.250.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	1.000.000	1.750.000	3.700.000	-	-
		Muallaf	650.000	-	-	300.000	-	-
	Jumlah		101.851.600	120.346.900	169.040.400	152.909.500	414.982.600	155.111.500
3	Bebesen	Fakir	135.050.000	195.670.000	230.300.000	262.550.000	569.200.000	85.850.000
		Miskin	54.350.000	62.150.000	87.200.000	65.100.000	147.000.000	38.550.000
		Amilun	26.300.000	55.379.368	57.642.025	59.029.750	76.883.613	40.970.425
		Sabilullah	26.300.000	33.250.000	33.200.000	62.950.000	99.950.000	63.100.000
		Gharim	13.000.000	11.300.000	22.350.000	29.850.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	-	13.000.000	-	-
		Muallaf	800.000	400.000	1.500.000	900.000	-	-
	Jumlah		255.800.000	358.149.368	432.192.025	493.379.750	893.033.613	228.470.425
4	Kute Panang	Fakir	750.000	7.700.000	7.400.000	6.900.000	20.000.000	6.500.000
		Miskin	4.100.000	1.600.000	15.400.000	6.000.000	28.000.000	16.500.000
		Amilun	2.261.200	1.192.000	2.290.200	1.708.000	2.556.000	11.279.200
		Sabilullah	1.100.000	1.000.000	3.500.000	5.600.000	5.000.000	8.750.000
		Gharim	-	-	-	-	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	-	-	-	-
		Muallaf	-	-	400.000	-	-	-
	Jumlah		8.211.200	11.492.000	28.990.200	20.208.000	55.556.000	43.029.200
5	Pegasing	Fakir	39.400.000	64.000.000	86.200.000	101.650.000	141.250.000	91.500.000
		Miskin	42.450.000	50.950.000	49.500.000	60.900.000	118.912.000	54.800.000
		Amilun	11.998.440	14.880.900	13.277.700	26.894.200	29.518.000	46.033.467
		Sabilullah	17.400.000	14.150.000	22.900.000	40.300.000	62.750.000	31.400.000
		Gharim	2.600.000	2.500.000	500.000	-	-	-
		Ibnu Sabil	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	-	-
		Muallaf	350.000	400.000	900.000	-	-	-
	Jumlah		114.698.440	147.380.900	174.277.700	231.244.200	352.430.000	223.733.467
6	Bies	Fakir	29.650.000	30.800.000	47.000.000	32.800.000	125.900.000	64.400.000
		Miskin	27.700.000	25.250.000	29.200.000	25.500.000	75.200.000	43.500.000
		Amilun	27.700.000	10.711.000	7.639.200	9.490.000	22.936.800	25.900.000
		Sabilullah	7.726.400	14.450.000	11.300.000	12.750.000	29.600.000	14.400.000
		Gharim	-	400.000	-	1.500.000	-	-
		Ibnu Sabil	400.000	-	-	-	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		93.176.400	81.611.000	95.139.200	82.040.000	253.636.800	148.200.000
7	Silih Nara	Fakir	78.450.000	63.650.000	95.200.000	30.900.000	5.500.000	19.500.000
		Miskin	117.900.000	87.900.000	145.200.000	53.050.000	7.000.000	88.500.000
		Amilun	22.066.500	23.243.800	15.955.000	14.748.200	1.854.000	44.856.400
		Sabilullah	43.450.000	45.700.000	39.900.000	40.800.000	9.000.000	33.900.000
		Gharim	-	400.000	-	500.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	-	-	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		261.866.500	220.893.800	296.255.000	139.998.200	23.354.000	186.756.400
8	Rusip Antara	Fakir	40.250.000	22.500.000	31.600.000	34.500.000	38.500.000	55.500.000
		Miskin	39.150.000	22.400.000	48.800.000	44.550.000	101.500.000	67.600.000
		Amilun	11.849.600	4.806.000	8.673.000	11.740.000	26.583.200	38.211.000
		Sabilullah	25.100.000	14.700.000	21.450.000	36.200.000	72.900.000	56.850.000
		Gharim	1.000.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ibnu Sabil	-	-	-	-	-	-
		Muallaf	-	-	-	400.000	-	-
	Jumlah		117.349.600	64.406.000	110.523.000	127.390.000	239.483.200	218.161.000
9	Celala	Fakir	12.550.000	21.900.000	57.300.000	43.850.000	55.500.000	17.000.000
			49.750.000	35.550.000		85.450.000		21.250.000
		Miskin			117.900.000		113.700.000	
		Amilun	8.012.800	14.455.000	16.101.700	21.472.200	24.594.000	21.433.400
		Sabilullah	21.400.000	26.050.000	60.200.000	56.300.000	45.600.000	36.900.000
		Gharim	-	400.000	2.400.000	500.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	-	500.000	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		91.712.800	98.355.000	253.901.700	208.072.200	239.394.000	96.583.400
			51.400.000	48.800.000	66.450.000	66.650.000		29.700.000
10	Linge	Fakir					100.700.000	
			42.150.000	29.500.000	60.000.000	59.500.000		70.450.000
		Miskin					140.800.000	
		Amilun	16.479.600	19.236.200	15.352.000	21.135.600	34.038.400	33.457.000
			50.650.000	60.850.000	77.600.000	88.500.000		72.950.000
		Sabilullah					108.000.000	
		Gharim	5.100.000	12.750.000	7.150.000	5.400.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	2.850.000	1.725.000	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		165.779.600	171.136.200	229.402.000	242.910.600	383.538.400	206.557.000
11	Jagong Jeget	Fakir	34.250.000	10.250.000	20.850.000	39.100.000	39.500.000	16.400.000
		Miskin	44.000.000	32.300.000	42.700.000	42.200.000	96.500.000	67.800.000
		Amilun	12.100.400	6.997.600	8.001.000	12.984.200	14.648.600	28.494.200
		Sabilullah	19.000.000	37.000.000	24.100.000	41.400.000	38.100.000	46.300.000
		Gharim	-	800.000	500.000	4.500.000	-	-
		Ibnu Sabil	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		109.350.400	88.347.600	97.151.000	140.184.200	188.748.600	158.994.200
12	Atu Lintang	Fakir	13.950.000	23.900.000	8.800.000	31.150.000	99.500.000	29.000.000
			23.450.000	20.050.000	20.200.000	45.900.000		48.100.000
		Miskin					149.000.000	
		Amilun	4.706.000	5.740.000	4.580.000	14.395.000	21.753.000	13.589.000
		Sabilullah	18.500.000	17.000.000	11.750.000	19.100.000	22.600.000	28.500.000
		Gharim	500.000	-	400.000	-	-	-
		Ibnu Sabil	200.000	-	-	-	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		61.306.000	66.690.000	45.730.000	110.545.000	292.853.000	119.189.000
13	Bintang	Fakir	30.100.000	93.250.000	70.900.000	52.900.000	9.500.000	31.200.000
			17.900.000		63.300.000		20.000.000	44.800.000
		Miskin		100.300.000		103.390.000		
		Amilun	4.920.000	19.620.000	14.866.000	21.040.000	4.260.000	5.860.000
		Sabilullah	4.750.000	24.350.000	50.400.000	58.350.000	8.150.000	8.100.000
		Gharim	1.000.000	900.000	-	-	-	-
		Ibnu Sabil	-	-	1.500.000	1.000.000	-	-
		Muallaf	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		58.670.000	238.420.000	200.966.000	236.680.000	41.910.000	89.960.000
14	Ketol	Fakir	25.000.000	35.750.000	43.750.000	35.100.000	119.000.000	13.000.000
			46.800.000	58.650.000	64.500.000	48.650.000		8.700.000
		Miskin					117.500.000	
		Amilun	13.271.300	12.673.800	12.740.400	13.794.400	22.167.000	2.934.600
		Sabilullah	34.000.000	46.900.000	40.200.000	58.100.000	75.550.000	3.600.000
		Gharim	-	-	-	-	-	-
		Ibnu Sabil	-	400.000	-	-	-	-
		Muallaf	300.000	-	-	-	-	-
	Jumlah		119.371.300	154.373.800	161.190.400	155.644.400	334.217.000	28.234.600
	Jumlah Total		1.668.763.865	2.029.092.685	2.486.769.275	2.553.400.570	4.042.833.063	2.042.508.181

Sumber : Baitul Mal Kab.Aceh Tengah, 2013

2.2.3.4. Seni Budaya dan Olahraga

Bidang seni budaya, wisata dan olahraga merupakan aspek yang fundamental dan berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan manusia yang diejawantahkan dalam wujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat. Pada titik ini, nilai-nilai budaya bangsa yang mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 perlu direvitalisasi ke dalam suatu

pranata-pranata yang aplikatif sehingga secara substansial mampu menaungi sekaligus menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tengah, 2012, strategi yang telah ditetapkan dalam mengembangkan seni budaya daerah adalah penyediaan pakaian adat budaya Gayo, penyelenggaraan dialog budaya, pengelolaan keragaman budaya, Festival Budaya Gayo dan event olah raga pariwisata Tahun 2012, pembuatan *casting* (duplikat) kerangka manusia prasejarah Loyang Ujung Karang, penggalian situs purbakala ceruk mendale, terciptanya duta seni dan kebudayaan daerah, terpilihnya duta wisata serta penyediaan data wisata. Sedangkan strategi yang telah ditetapkan dalam mengembangkan olahraga dan kepemudaan daerah adalah terseleksiannya dan keikutsertaan atlet POPDA, pembinaan organisasi kepemudaan, seleksi dan pembinaan atlet olahraga, pembinaan cabang olahraga Aceh Tengah, pelaksanaan turnamen cabang olahraga, perehaban dan penataan lapangan sepak bola serta terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga.

Tabel 2.49
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2008 s.d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Capaian Pembangunan	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian	96	96
2	Jumlah gedung kesenian	1	1
3	Jumlah klub olahraga	31	31
4	Jumlah sarana olahraga	2	2

Sumber : Disbudparpora 2012

Data di atas menggambarkan dari tahun 2011 sampai 2012 tidak ada perubahan dalam capaian pembangunan jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

Permasalahan dari hal di atas antara lain gedung kesenian dan gedung olahraga masih dirasa tidak mencukupi sebagai prasarana dalam pengembangan seni dan olahraga. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi dalam bidang seni dan olahraga antara lain dengan menambah dan memberdayakan secara maksimal gedung kesenian dan gedung olahraga. Selain itu perlu memperhatikan grup kesenian dan grup olahraga yang ada sehingga bisa mengharumkan nama daerah dengan prestasi yang dicapai. Tabel berikut merupakan perkembangan seni, budaya dan olahraga menurut kecamatan yang ada di Aceh Tengah.

Tabel 2.50
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah Gedung Olahraga
1	Kecamatan Bebesen	17	1	2	1
2	Kecamatan Lut Tawar	6	-	27	1
3	Kecamatan Kebayakan	13	-	1	-
4	Kecamatan Silih Nara	14	-	-	-
5	Kecamatan Pegasing	7	-	1	-
6	Kecamatan Bintang	5	-	-	-
7	Kecamatan Jagong	4	-	-	-
8	Kecamatan Celala	3	-	-	-
9	Kecamatan Ketol	3	-	-	-
10	Kecamatan Rusip	4	-	-	-
11	Kecamatan Bies	7	-	-	-
12	Kecamatan Atu Lintang	3	-	-	-
13	Kecamatan Linge	4	-	-	-
14	Kecamatan Kute Panang	6	-	-	-
Jumlah		96	1	31	2

Sumber : Disbudparpora 2012

Data di atas menunjukkan bahwa grup kesenian ada di tiap kecamatan, namun grup olahraga dan gedung olahraga hanya terdapat di beberapa kecamatan, sedangkan gedung kesenian hanya ada di kecamatan Bebesen. Hal di atas merupakan permasalahan bagi pemerintah karena dengan tidak meratanya klub olahraga dan terbatasnya grup kesenian dapat menghambat prestasi anak bangsa dalam menyalurkan bakatnya.

Untuk itu perlu dilakukan pemetaan dan perhatian pada anak-anak berbakat baik di bidang seni maupun di bidang olahraga sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi daerah dan dapat mengharumkan nama daerah di kancah lokal, provinsi, nasional bahkan di kancah internasional. Tabel dibawah ini merupakan organisasi keolahragaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 2.51
Organisasi Keolahragaan Kabupaten Aceh Tengah

NO	NAMA ORGANISASI OLAHRAGA	NO	NAMA ORGANISASI OLAHRAGA
1.	KODRAT (Tarung Derajat)	2.	PERBASI (Basket)
3.	FPTI (Panjat Tebing)	4.	PSSI (Sepak Bola)
5.	IPSI (Pencak Silat)	6.	PERBAKIN (Menembak)
7.	PSTI (Sepak Takraw)	8.	PERPANI (Panahan)
9.	PASI (Atletik)	10.	PERCASI (Catur)
11.	PBSI (Bulu Tangkis)	12.	POSSI (Selam)
13.	PERBASASI (Soft Ball)	14.	PABBSI (Angkat Berat)
15.	ISSI (Sepeda Sport)	16.	PDBI (Drum Band)
17.	PBVSI (Bola Volly)	18.	KORWIL IMI (Balap Motor)
19.	PERTINA (Tinju)	20.	PODSI (Dayung)
21.	PTMSI (Tenis Meja)	22.	IKASI (Anggar)
23.	FORKI (Karate)	24.	PELTI (Tenis Lapangan)
25.	PERKEMI (Kempo)	26.	PRSI (Renang)
27.	PGI (Gulat)	28.	TI (Taekwondo)

29. GABBSI (Bridge)	30. PORDASI (Berkuda)
31. PGI (Golf)	

Sumber : Disbudparpora 2012

Beberapa penyebab prestasi olahraga Aceh Tengah belum dapat bersaing di level provinsi, nasional dan internasional antara lain: (1) belum profesionalnya pengelolaan keolahragaan, (2) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, (3) belum optimalnya pembinaan atlet, (4) sistem rekrutmen atlet yang belum profesional, (5) rendahnya kualitas pelatih, (6) tidak adanya sekolah olahraga (7) kurangnya kompetisi olahraga dan (8) kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan olahraga.

2.2.3.5. Pariwisata

A. Objek Wisata

Daerah objek wisata merupakan penunjang utama dalam kepariwisataan, karena menjadi daya tarik utama bagi pariwisata, oleh karena itu pengelolaan dan pemeliharaan diperlukan untuk penunjang kepariwisataan, Aceh Tengah memiliki sejumlah obojek wisata yang menyebar hampir diseluruh kecamatan berikut adalah objek wisata di Kabupaten Aceh Tengah:

Tabel 2.52
Objek Wisata Tahun 2007 s.d 2012 Menurut Kecamatan
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Objek Wisata					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kecamatan Bebesen	1	2	2	2	2	2
2	Kecamatan Lut Tawar	13	10	8	8	6	6
3	Kecamatan Kebayakan	1	4	4	4	5	5
4	Kecamatan Silih Nara	2	1	1	-	-	-
5	Kecamatan Pegasing	2	3	3	5	5	5
6	Kecamatan Bintang	3	5	7	11	13	13
7	Kecamatan Jagong	-	2	2	2	2	2
8	Kecamatan Celala	-	-	-	-	-	-
9	Kecamatan Ketol	-	-	1	1	1	1
10	Kecamatan Rusip	-	-	-	-	-	-
11	Kecamatan Bies	-	1	1	2	2	2
12	Kecamatan Atu Lintang	-	-	-	1	1	1
13	Kecamatan Linge	8	3	4	5	5	5
14	Kecamatan Kute Panang	-	-	-	-	-	-
Jumlah		30	31	33	41	42	42

Sumber : Disbudparpora 2012

Perkembangan Hotel, cafe dan restoran yang merupakan unsur pendukung penting dalam dunia Kepariwisataa.Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke daerah Aceh Tengah jumlah hotel juga mengalami pertumbuhan, jumlah hotel dan jumlah kunjungan wisman di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2007 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel disamping.

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Kunjungan Hotel dan Penginapan
Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Hotel	Tahun 2010 (Jumlah)		Tahun 2011 (Jumlah)		Tahun 2012 (Jumlah)	
		Kamar	Tamu	Kamar	Tamu	Kamar	Tamu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Renggali	38	3.731	38	3.914	38	1.860
2	Mahara	28	4.311	28	3.786	28	2.970
3	Grand Penemas	48	3.797	48	522	48	2.501
4	Triarga	30	4.613	30	4.608	30	3.461
5	Gayo Land	18	3.004	18	2.107	18	3.412
6	Linge Land	36	457	36	1.529	36	693
7	Hotel Bunda	-	-	19	1.510	19	1.343
8	Umah Opat	17	774	17	758	17	1.704
9	Losmen Fajar	15	619	15	502	15	326
10	Batang Ruang	8	303	8	45	8	484
11	Libra Indah	11	1.011	11	1.729	11	1.205
12	Permata	8	47	8	86	8	-
13	Mutiara	10	71	10	113	10	143
14	Timang Rasa	-	247	-	-	-	-
15	Mesra Indah	-	136	-	-	-	-
16	Hotel Merlin	10	100	10	254	10	440
17	Arizona Hotel	9	267	9	583	9	523
18	Umah Broker	10	297	10	69	10	-
19	Wisma Intan	-	-	9	1.058	9	1.813
20	Wisma Lengkie	-	-	-	-	-	-
21	Bayu Hill	-	-	-	-	34	2.724
22	Penginapan Darussalam	-	-	-	-	18	907
23	Hotel Centuri	-	-	-	-	19	-
24	Penginapan Nacara	-	-	-	-	-	-
Jumlah		296	23.785	324	23.173	395	26.509

Sumber : Disbudparpora 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 2010 mulai menunjukkan peningkatan, dengan adanya kunjungan wisatan tersebut akan mendorong berkembangnya sektor-sektor lain seperti perkembangan jumlah hotel, kafe dan restoran.

2.2.3.6. Perpustakaan

Perpustakaan menempati peran penting dalam mencerdaskan masyarakat dan peningkatan SDM, jumlah perpustakaan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2011 sebanyak 40 unit. Kondisi ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut disamping.

Tabel 2.54
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s.d 2012

Uraian	Tahun					2012
	2007	2008	2009	2010	2011	
Jumlah Perpustakaan (Unit)	15	22	30	35	40	41

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Aceh Tengah, 2013

Data lima tahun terakhir menggambarkan pengunjung perpustakaan mengalami fluktuasi, yakni menurun dari tahun 2007 sampai 2009 dan meningkat lagi pada tahun 2010 sampai 2011 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s.d 2012

Uraian	Tahun					2012
	2007	2008	2009	2010	2011	
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	18.654	13.254	11.161	18.564	21.641	64.062

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Aceh Tengah, 2013

Permasalahan dalam jumlah kunjungan ke perpustakaan ini antara lain belum berkembangnya atau kurangnya minat baca masyarakat, khususnya masyarakat umum. Pengelolaan perpustakaan tidak terlepas dari ketersediaan buku, pemerintah Kabupaten Aceh tengah secara bertahap terus meningkatkan jumlah dan koleksi buku, jumlah buku yang tersedia pada perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s.d 2012

Uraian	Tahun					2012
	2007	2008	2009	2010	2011	
Jumlah Buku	5.966	7.199	7.229	7.808	9.094	11.034

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Aceh Tengah, 2013

Koleksi buku-buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2007 sejumlah 5.966 buah buku dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah buku menjadi 11.034 buah meningkat sebesar 85%.

2.2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan sangat berperan dalam mensukseskan pembangunan bangsa seperti peranan perempuan dalam keluarga, pendidikan, pelestarian lingkungan dan dalam bidang ekonomi dalam peningkatan kualitas hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam meningkatkan ekonomi keluarga, baik kewirausahaan maupun tenaga kerja yang terdidik, di Kabupaten Aceh Tengah ada beberapa jenis koperasi perempuan dan perempuan yang berprofesi sebagai PNS seperti yang diinformasikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.57
Jumlah Koperasi Perempuan dan Perempuan yang Berprofesi sebagai PNS
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 s.d 2012

No	Uraian	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Organisasi perempuan	26	26	26
2.	Koperasi perempuan	32	32	32
3.	Jumlah Perempuan yang Berprofesi sebagai PNS			
	a. Pejabat Eselon II	-	-	-
	b. Pejabat Eselon III	21	23	23
	c. Pejabat Eselon IV	172	179	179
	d. Pejabat Eselon V	19	18	18
	e. Pejabat Fungsional	2.893	2.893	2.893
	f. Staf	464	477	477

Sumber : Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka Tahun 2010, 2011, 2012.

Jumlah koperasi perempuan di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2010 s.d 2012 tidak mengalami penambahan. Sedangkan perempuan yang berprofesi sebagai PNS pada tahun 2010 mengalami penambahan pada tahun 2011 disebabkan pada tahun 2011 diadakan penambahan Pegawai Negeri Sipil.

A. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jumlah kasus KDRT di Kabupaten Aceh Tengah yang terdata saat ini terjadi peningkatan dari 29 kasus di tahun 2010 menjadi 41 kasus di tahun 2011 dan 54 kasus di tahun 2012 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Tahun		
	2010	2011	2012
Jumlah KDRT	29	41	54

Sumber: Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Tengah, 2013

Kasus KDRT yang sebagian besar adalah kasus penganiyaan 26 kasus, kemudian pelecehan seksual 11 kasus. Upaya yang dilakukan adalah pendampingan dan konseling kepada korban kekerasan.

B. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).

Peserta KB baru di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun berfluktuasi, seiring dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) dan meningkatnya pemahaman tentang KB. Jumlah peserta KB baru di Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Jumlah Peserta KB Baru Tahun 2009 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Peserta KB baru	6.525	7.125	8.372	7.968

Sumber: Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Tengah, 2013

Permasalahan dalam meningkatkan jumlah peserta KB baru adalah terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi dan rendahnya sumber daya manusia pengelola KB.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menambah ketersediaan alat kontrasepsi dan meningkatkan kapasitas pengelola KB.

C. Jumlah Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah peserta KB yang terus menggunakan alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Tengah terus meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Jumlah Peserta KB Aktif Tahun 2009 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Peserta KB Aktif	26.339	27.324	29.571	30.791

Sumber: Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah peserta aktif KB dari tahun ketahun pada tahun 2009 peserta aktif KB berjumlah 26.339 orang dan pada tahun 2012 mencapai 30.791 orang.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Otonomi Daerah dan Tatakelola Pemerintah

A. Organisasi, Tatakelola dan Sumberdaya Aparatur

Aparatur pemerintah mempunyai peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran aparatur pemerintah lebih ditekankan pada pelayanan masyarakat, perkembangan jumlah pegawai negeri di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2010 - 2012 dapat dilihat pada tabel disamping ini :

Tabel. 2.61
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2010	2011	2012
1.	Golongan I	115	100	53
2.	Golongan II	2.118	2.001	1.764
3.	Golongan III	2.394	2.534	2.664
4.	Golongan IV	1.517	1.532	1.566
Jumlah		6.144	6.176	6.047

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

Penurunan jumlah pegawai, bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan namun untuk mengurangi beban pembiayaan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri, sehingga alokasi pembiayaan untuk pembangunan dapat diperbesar. sampai saat ini alokasi belanja untuk kebutuhan aparatur mencapai 59,30% dari total belanja daerah. sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah beberapa tahun terakhir mengurangi penerimaan pegawai.

Pelayanan kepada pegawai dilakukan dengan berbagai upaya yang ditujukan antara lain untuk Pegawai Negeri Sipil yang berstatus purna tugas, adalah PNS yang meninggal dunia maupun memasuki batas usia pensiun,. berikut ini banyaknya jumlah PNS yang berstatus purna tugas.

Tabel. 2.62
PNS Purna Tugas Yang Meninggal Dunia Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PNS purna tugas yang meninggal dunia	-	-	27	23
2.	Jumlah PNS batas usia pensiun	36	75	87	100

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

Tenaga kontrak merupakan tenaga yang ditempatkan pada instansi yang mengalami kekurangan tenaga teknis sehingga perlunya pengontrakan tenaga ahli dalam instansi. Dalam lima tahun kebelakang dari tahun awal ke tahun akhir mengalami peningkatan sehingga tenaga yang dimiliki dapat dipakai dalam instansi pemerintahan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.63
Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	2009	2010	2011	2012
Jumlah tenaga kontrak daerah	43	42	40	40

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

Pelatihan dan Diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan bentuk pelatihan dan diklat yang pernah dilaksanakan adalah :

- Pembekalan sekretaris desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintahan pada tingkat kampung. Berdasarkan data lima tahun ke belakang pembekalan sekretaris desa tersaji dalam tabel dibawah.

Tabel. 2.64
Pembekalan Sekretaris Desa Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Sekretaris Desa yang ikut pembekalan Sekretaris Desa	-	-	-	-	120	119

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

- Prajabatan wajib diikuti oleh CPNS yang telah bertugas minimal 1 tahun. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Diklat Prajabatan Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	661	373	398	360	290	131

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

- Diklat PIM Tk.II, III dan IV diperuntukkan untuk jabatan eselon II, III dan IV dalam rangka peningkatan kemampuan keterampilan kepemimpinan secara profesional. PNS yang telah mengikuti Diklat PIM II, III, dan IV dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2.66
Diklat PIM Tk.II Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk.II	4	2	2	-	2	-
2.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. III	40	-	-	-	-	-
3.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim Tk. IV	40	40	40	-	-	-

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

Pembinaan sistem karir (kepangkatan) dilakukan dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali antara bulan April dan bulan Oktober. Pembinaan sistem karir yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2007-2012 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2.67
Pembinaan Sistem Karir (Mutasi Pangkat)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Aceh Tengah

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Golongan I	-	-	-	3	-	-
2.	Golongan II	14	20	23	17	-	-
3.	Golongan III	31	33	36	51	-	-
4.	Golongan IV	33	55	56	63	-	-

Sumber: BKPP Kab. Aceh Tengah, 2013

Sistem merupakan salah satu cara mengaplikasikan sistem kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat sehingga pelayanan terhadap PNS yang ada di kabupaten Aceh tengah ini dapat berjalan efektif. Saat ini Kabupaten Aceh Tengah belum memiliki sistem pelayanan aplikasi kepegawaian, karena itu kedepannya perlu mengadakan sistem dimaksud untuk mengaplikasikan sistem kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat.

2.3.1.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena keberhasilan dalam pendidikan akan mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah telah dimulai dari tingkat yang paling dini sampai ke jenjang perguruan tinggi, dari pendidikan sekolah dan luar sekolah serta dari pendidikan intrakurikuler hingga ekstrakurikuler.

A. Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap usia berbeda satu dan lainnya. APS didominasi oleh usia 7-12 tahun dan terendah pada usia 16-18 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, selisih APS antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda seperti terlihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.68
Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 s/d 2012

Usia Sekolah	Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
7 - 12	Laki-laki	99.55	98.03	97.79	98.40	99.04
	Perempuan	98.96	100.00	99.21	99.41	98.88
	Total L+P	99.28	99.01	98.56	98.87	98.97
13 - 15	Laki-laki	98.97	89.35	93.25	81.18	88.38
	Perempuan	98.49	100.00	97.83	100.00	97.28
	Total L+P	98.65	93.82	95.58	90.91	93.48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.69
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	194	199	206	208	211	212
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 s/d 12 tahun	23.728	23.728	24.125	23.466	23.139	25.902
1.3	Rasio	1:29	1:19	1:19	1:21	1:20	1:22
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	48	48	53	54	57	60
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 s/d 15 tahun	11.677	11.677	11.869	11.542	10.282	10.531
2.3	Rasio	1:35	1:26	1:26	1:27	1:27	1:26

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2012

3. Rasio Guru Murid

Tabel 2.70
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	1.749	1.977	1.948	1.969	2.010	2.100
1.2	Jumlah Murid	20.591	26.176	26.192	25.883	25.909	10.480
1.3	Rasio	1 : 17	1 : 15	1 : 15	1 : 14	1 : 14	1 : 14
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru	696	817	891	918	969	1.078
2.2	Jumlah Murid	7.287	10.090	10.209	10.077	13.455	10.531
2.3	Rasio	1 : 14	1 : 11	1 : 12	1 : 11	1 : 11	1.11

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2012

B. Pendidikan menengah

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 2.71
Angka Partisipasi Sekolah menurut usia sekolah dan jenis kelamin
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 s/d 2012

Usia Sekolah	Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012
16 – 18	Laki-laki	70.79	57.75	68.28	76.16	
	Perempuan	75.08	74.17	74.39	88.46	
	Total L+P	72.68	67.09	70.92	80.82	

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah 2012, 2012

Tabel 2.72
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SMA/SMK/MA						
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	25	27	29	32	33	vk36
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 s/d 18 tahun	6.340	6.404	8.421	8.774	8.414	8.712
1.3	Rasio	1:43	1:32	1:32	1:32	1:29	1:28

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2012

2. Rasio Guru Murid

Tabel 2.73
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2007 s/d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	SMA/SMK/MA						
1.1	Jumlah Guru	651	689	695	750	762	850
1.2	Jumlah Murid	6.340	6.404	8.421	8.774	8.414	8.712
1.3	Rasio	1 : 10	1 : 9	1 : 12	1 : 12	1 : 11	1 : 10

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2012

C. Pendidikan Dayah

Tabel 2.74
Data Pesantren Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Pesantren	Lokasi	Tipe
1	Ulumul Qur'an	Bebesen	Terpadu
2	Darul Mukhlisin	Bebesen	Terpadu
3	Ikhwanul Yakin	Bebesen	Salafiyah
4	Ruhul Amal	Bebesen	Terpadu
5	Al - Ummah	Bies	Salafiyah
6	Miyarul Ulum Al-Aziziyah	Bintang	Salafiyah
7	Darul Ulum	Celala	Terpadu
8	Mustafawiyah	Silih nara	Salafiyah
9	Darul Ulum	Silih Nara	Salafiyah
10	Berkah Ilahi	Pegasing	Salafiyah
11	Darul Rahman	Silih Nara	Salafiyah

Sumber: RPJMA, 2012

2.3.1.3. Kesehatan.

A. Kesehatan.

Tingkat Kesehatan merupakan ukuran sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, yang dapat digambarkan melalui beberapa indikator utama, yaitu : angka kematian, umur harapan hidup, status gizi, angka kesakitan, kondisi lingkungan, dan juga pola perilaku. Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah antara lain dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum Daerah RSUD Datu Beru Takengon, Puskesmas, Poliklinik, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya.

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2007-2012.

Table berikut menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir (2007-2012), berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dasar.

Tabel 2.75
Jumlah Pelayanan Kesehatan
Tahun 2007-2012 Kabupaten Aceh Tengah

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	76,7	82,8	72,9	82,5	81,4	82,1
2.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	72	47,4	100	62,6	70,1	71
3.	Cakupan Linakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	73	83,2	72,6	75,5	67,1	87,9
4.	Cakupan pelayanan nifas	73	83,2	72,6	75,5	67,1	81,4
5.	Cakupan Pelayanan Neonatus Komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100	100
6.	Cakupan Kunjungan Bayi	89,3	78	55,2	43,2	52,5	73,5
7.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	57,8	75,9	61,9	30,2	52,3	52,9
8.	Cakupan Gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
9.	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	60,5	63	64,5	65,67	93	100
10.	Cakupan Peserta KB Aktif	77,9	77,8	80,4	52	53	88,8
11.	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization		55,3	61,3	79,7	89	92,3
12.	Cakupan Penemuan dan Penangan Penyakit		2	2	0	0	2
13.	Cakupan desa mengalami KLB yang dilaksanakan penyelidikan < 24 Jam	80 100	69 100	51 100	60 100	57 100	24 100
14.	Cakupan desa siaga aktif	-	-	-	-	15	19
15.	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS Datu Beru)	100	100	100	50	50	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasen Masyarakat Miskin	0	35,6	49,69	64	74,36	

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah 2007-2012

2. Rasio Posyandu per satuan balita.

Tabel 2.76
Jumlah Posyandu dan Balita
Tahun 2007-2012 Kabupaten Aceh Tengah

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah posyandu	299	258	279	296	296	292
2.	Jumlah balita	16.348	16.227	16.679	16.725	16.833	19.403
3.	Rasio	18	16	17	18	18	15

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah 2007-2012

Ketersediaan Posyandu menunjukkan jumlah yang cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas rasio jumlah balita yang terlayani di Posyandu yang tersedia menunjukkan angka rata-rata 17 balita untuk 1 Posyandu per 1000 balita.

3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Tabel 2.77
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Puskesmas	14	14	14	14	14
2.	Jumlah Poliklinik	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Pustu	49	50	51	51	51
4.	Jumlah Poskesdes	139	148	148	165	171
	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar	203	213	214	231	237
5.	Jumlah Penduduk	146.547	168.861	192.390	206.084	211.360
6.	Rasio Sarana Kesehatan Dasar	1	1	1	1	1

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah 2007-2012

Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini terdapat 237 sarana kesehatan dasar yang terdiri dari Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Polindes dimana rasio ketersediaan sarana kesehatan dasar untuk 1000 jiwa tersedia 1 (satu) sarana kesehatan.

4. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Tabel 2.78
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah					
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Swasta			1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	146,547	168,861	192,390	206,084	211,360

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, 2013

5. Rasio dokter per satuan penduduk

Tabel 2.79
Jumlah Dokter Tahun 2007 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Dokter	58	48	69	75	57
2	Jumlah Penduduk	146,547	168,861	192,390	206,084	211,360
3	Rasio	396	284	359	364	270

Sumber: BLUD RSU Datu Beru, 2013

Rasio dokter dihitung berdasarkan perbandingan jumlah dokter per seribu penduduk dapat dilihat pada tabel diatas. Di Kabupaten Aceh Tengah rasio dokter semakin membaik, pada tahun 2008 rasio dokter untuk 1000 penduduk adalah 1 dokter berbanding 396 jiwa, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1 dokter berbanding 270 jiwa.

6. Jumlah tenaga kesehatan

Tabel 2.80
Jumlah Dokter dan Paramedis
Kabupaten Aceh Tengah 2007 s/d 2012

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dokter						
	Dokter Umum	28	35	23	38	49	34
	Dokter Gigi	7	11	5	10	12	9
	Dokter Spesialis	7	12	20	21	22	24
II	Tenaga Keperawatan						
	Sarjana Keperawatan	6	8	10	13	12	17
	Perawat	224	258	261	267	287	249
	Bidan	284	236 (pns)	251 (pns)	266 (pns)	427 (pns)	515 (pns)
			98 (ptt)	143 (ptt)	150 (ptt)	261 (ptt)	261 (ptt)
III	Tenaga kefarmasian						
	Apoteker	3	4	5	7	7	9
	Diploma Farmasi	1	10	14	8	8	8
	Asisten Apoteker	8	14	16	16	16	19
IV	Tenaga Gizi						
	Diploma Gizi	16	14	24	26	22	28
V	Tenaga Kesehatan Masyarakat						
	Sarjana Kesmas	21	36	42	42	52	69
VI	Tenaga Sanitasi						
	Diploma Sanitasi	49	26	27	45	47	41

1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Tenaga Teknis Medis dan Fisioterapis						
	Analisis lab	23	29	29	31	21	29
	Term & P. Rontgen	14	7	20	13	11	13
	P Anestesi	1	2	3	2	2	3
	Fisioterapis	9	13	13	14	18	14
	Rekam Medik	-	6	6	8	8	8

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah 2007-2012

Rasio tenaga medis yang melayani penduduk menunjukkan angka terlayani yang baik, dimana dalam 1000 jiwa tersedia 6 tenaga medis, hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan utamanya tenaga medis di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup memadai.

Tabel 2.81
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2008 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Tenaga Medis	817	912	976	986	1.340
2	Jumlah Penduduk	146,547	168,861	192,390	206,084	211,360
3	Rasio	6	5	5	5	6

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, 2013

B. Badan Layanan Umum Daerah RSU Datu Beru

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Tingkat kemampuan pelayanan dan fasilitas menentukan klasifikasi Rumah Sakit. Saat ini Rumah Sakit Umum Datu Beru menyandang status sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan.

Tabel 2.82
Jumlah Tenaga Dokter Tahun 2007 s.d 2013
Pada BLUD RSU Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Dokter Umum	9	12	14	14	11	11	20
2	Jumlah Dokter Gigi	2	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah Dokter Spesialis	8	9	12	19	19	22	24

Sumber: BLUD RSU Datu Beru Takengon, 2013

Tabel 2.83
Kemampuan Pelayanan Medik Rumah Sakit Tipe B

No	Jenis Pelayanan	Jumlah (org)	Tetap (org)	Kondisi pada BLUD RSU Datu Beru Saat ini	
				Jumlah (org)	Tetap (org)
1.	Pelayanan Medik Dasar 1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi	12 3	12 3	20 2	10 2
2.	Pelayanan Medis Spesialis Dasar 1. Penyakit Dalam 2. Kesehatan Anak 3. Bedah 4. Obgyn	3 3 3 3	1 1 1 1	4 2 2 2	4 2 2 2
3.	Pelayanan Spesialis Penunjang Medik 1. Pelayanan Anestesiologi 2. Radiologi 3. Rehabilitasi Medik 4. Patologi Klinik	2 2 2 2	1 1 1 1	1 2 - 1	1 Kunjungan - Kunjungan
4.	8 Pelayanan Spesialis Lainnya dari 12 1. Mata 2. Telinga Hidung Tenggorokan 3. Syaraf 4. Jantung dan Pembuluh Darah 5. Kulit dan Kelamin 6. Kedokteran Jiwa 7. Paru 8. Orthopedi 9. Urologi 10. Bedah Syaraf 11. Bedah Plastik 12. Kedokteran Forensik	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 Spesialis pd pelayanan yg berbeda	1 2 1 - 1 1 1 - - - - -	Kunjungan Kunjungan Kunjungan
5.	2 Pelayanan Medik Sub Spesialis Dasar dari 4 1. Bedah 2. Penyakit Dalam 3. Kesehatan Anak 4. Obgine	1 1 1 1	1 Sub Spesialis	- - - -	
6.	Pelayanan Medik Spesialis Gigi 1. Bedah MuLaut 2. Konservasi/Edodonsi 3. Periodonti	1 1 1	1 1 1	1 - -	1 - -

Sumber: BLUD RSU Datu Beru Takengon, 2013

Sesuai dengan standar kelas rumah sakit tipe B Non Pendidikan, Rumah Sakit Datu Beru harus memiliki 6 pelayanan dasar dengan masing-masing jumlah dokter umum 12 orang, dokter gigi 3 orang dan dokter spesialis 39 orang, berdasarkan table diatas maka Rumah Sakit Umum Datu Beru sebagai rumah sakit tipe B masih mengalami kekurangan terutama dokter spesialis dari berbagai jenis spesialisasi.

Tabel 2.84
Sumber Daya Manusia RSUD Datu Beru Takengon 2007 – 2012

No	Jenis SDM	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Keperawatan (Perawat dan Bidan)	200	280	300	320	330	324
2.	Kefarmasian	8	8	10	12	15	15
3.	Gizi	8	8	11	11	12	12
4.	Keterampilan Fisik	8	8	10	10	10	10
6.	Petugas Rekam Medis	6	6	6	8	8	8
7.	Analisis Kesehatan (Petugas Laboratorium)	10	10	14	16	19	19
8.	Kesehatan Masyarakat	6	8	10	10	13	16
9.	Radiografi	6	6	8	10	10	14
10.	Petugas IPRS	6	6	7	7	9	9
11.	Petugas Pengelola Limbah	6	6	7	7	10	7
12.	Petugas Kamar Jenazah	2	2	2	2	2	2

Sumber: BLUD RSUD Datu Beru Takengon, 2013

Dari data tersebut di atas jumlah tenaga yang tersedia sudah memadai sesuai dengan tipe rumah BLUD RSUD Datu Beru, namun masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya yang tersedia. Tabel di bawah ini merupakan kondisi prasarana BLUD RSUD Datu Beru.

Tabel 2.85
Prasarana Rumah Sakit Tahun 2012

No.	Prasarana	Ada / Belum	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bangunan/Ruang Gawat Darurat	Ada	
2.	Bangunan/Ruang Rawat Jalan	Ada	
3.	Bangunan Ruang/Rawat Inap	Ada	
4.	Bangunan/Ruang Bedah	Ada	
5.	Bangunan/Ruang Rawat Intensif	Ada	
6.	Bangunan/Ruang Isolasi	Ada	
7.	Bangunan/Ruang Radiologi	Ada	
8.	Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik	Ada	
9.	Bangunan/Ruang Farmasi	Ada	
10.	Bangunan/Ruang Gizi	Ada	
11.	Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik	Ada	
12.	Bangunan/Ruang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Ada	Belum Memenuhi Standar
13.	Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah	Belum	
14.	Ruang Sterilisasi	Belum	
15.	Bangunan/Ruang Laundry	Ada	Belum memenuhi Standar
16.	Bangunan/Ruang Pemulasaraan Jenazah	Ada	
17.	Bangunan/Ruang Administrasi	Ada	
18.	Bangunan/Ruang Gudang	Ada	
19.	Bangunan/Ruang Sanitasi	Ada	Belum Memenuhi Standar

1	2	3	4
20.	Bangunan/Rumah Dinas Asrama	Ada	
21.	Ambulans	Ada	
22.	Ruang Komite Medis	Ada	
23.	Ruang PKMRS	Ada	
24.	Ruang Pertemuan	Ada	
25.	Bangunan/Ruang Diklat	Ada	
26.	Ruang Diskusi	Ada	
27.	Sistim Informasi Rumah Sakit	Belum	
28.	Listrik	Ada	
29.	Air	Ada	
30.	Gas Medis	Ada	
31.	Limbah Cair	Ada	
32.	Limbah Padat	Ada	
33.	Penangan Kebakaran	Ada	
34.	Perangkat Komunikasi 24 Jam	Ada	
35.	Tempat Tidur	≥200	RSU Datu Beru 255 TT

Sumber: BLUD RSU Datu Beru Takengon, 2013

Data di atas menggambarkan kondisi prasarana pada BLUD RSU Datu Beru. Belum adanya bangunan/ruang pengelolaan limbah, ruang sterilisasi dan sistem informasi rumah sakit merupakan suatu permasalahan bagi BLUD RSU Datu Beru. Selain itu, masih ada beberapa prasarana yang belum memenuhi standar.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah di atas antara lain dengan membangun bangunan/ruang pengelolaan limbah, ruang sterilisasi dan sistem informasi rumah sakit serta meningkatkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Saat ini BLUD RSU Datu Beru adalah satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi Rumah Sakit rujukan untuk wilayah tengah Provinsi Aceh, tabel berikut menjelaskan tentang banyaknya pasien yang dilayani.

Tabel 2.86
Sebaran Pasien BLUD RSU Datu Beru
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 s/d 2012

No	Kategori Pasien	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Umum	8.507	5.991	6.613	2.317	1.224
2.	ASKES	12.250	22.755	26.397	22.672	14.674
3.	JPS/Jamkesmas	19.544	19.774	22.478	25.385	32.275
4.	JKA	-	-	8.312	27.502	19.912
Total		40.301	48.520	63.800	77.876	68.085

Sumber : BLUD RSU Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, 2013

Dapat dilihat dari tabel diatas cakupan pelayanan untuk masyarakat miskin yang menggunakan layanan dari JPS atau Jamkesmas mengalami peningkatan setiap tahun, hal ini menandakan bahwa cakupan pelayanan bagi masyarakat miskin semakin baik. Sedangkan pasien umum semakin menurun karena masyarakat telah beralih menggunakan layanan JKA.

2.3.1.4. Lingkungan Hidup

A. Sebaran Jumlah Sampah

Tabel 2.87
Sebaran Jumlah Sampah di
Kabupaten Aceh Tengah 2007-2012

No	Kecamatan	Perhitungan Estimasi Jumlah Sampah (M ³)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Lut Tawar	5000	5000	6000	6000	6570	6570
2	Kebayakan	5000	5000	6000	6000	6570	6570
3	Bebesen	7000	7000	8200	8200	8760	8760
4	Pegasing	400	400	500	500	730	730
5	Silih Nara	400	400	500	500	730	730
6	Rusip Antara	350	350	450	450	630	630
7	Bintang	350	350	450	450	630	630
8	Kute Panang	350	350	450	450	630	630
9	Bies	350	350	450	450	630	630
10	Linge	350	350	450	450	630	630
11	Atu Lintang	350	350	450	450	630	630
12	Jagong Jeget	350	350	450	450	630	630
13	Ketol	350	350	450	450	630	630
14	Celala	350	350	450	450	630	630

Sumber : Data di Olah, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Aceh Tengah, 2013

B. Persentase Penanganan Sampah

Tabel 2.88
Perkembangan Cakupan Pelayanan Persampahan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012

No	Kecamatan	Tahun (Persentase Cakupan Pelayanan)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Lut Tawar	30	35	35	40	45	45
2	Kebayakan	25	30	30	35	35	35
3	Bebesen	50	55	55	60	60	60
4	Pegasing	-	-	-	5	5	5
5	Silih Nara	-	-	-	-	-	-
6	Rusip Antara	-	-	-	-	-	-
7	Bintang	-	-	-	-	-	-
8	Kute Panang	-	-	-	-	-	-
9	Bies	-	-	-	-	-	-
10	Linge	-	-	-	-	-	-
11	Atu Lintang	-	-	-	-	-	-
12	Jagong Jeget	-	-	-	-	-	-
13	Ketol	-	-	-	-	-	-
14	Celala	-	-	-	-	-	-
Total cakupan rata-rata		7,5	8,6	8,6	10	10,4	10,4

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari data di atas terlihat persentase penanganan sampah meningkat meski relatif tidak banyak. Permasalahan dari penanganan sampah ini antara lain;

- 1) Belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah dan sistem pengelolaannya;
- 2) Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga belum semua Kecamatan dapat dilayani;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

C. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah

Tabel 2.89
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah di
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah
1	Kontainer besar	21 unit
2	Kontainer mini	20 buah
3	Droom	250 buah
4	Bak sampah semen	2 buah
5	Tong sampah kayu	2 buah

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Aceh Tengah, 2013

2.3.1.5. Sarana dan Prasarana

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang lainnya. Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat terhubung dengan baik. Berdasarkan administrasi jalan, jalan di Kabupaten Aceh Tengah dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan nasional secara administrasi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, jalan provinsi secara administrasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten secara administrasi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.

Panjang jalan nasional yang ada di Kabupaten Aceh Tengah 193,05 km yang terdiri dari 12 ruas, panjang jalan provinsi 145,54 km yang terdiri dari 6 ruas jalan, sedangkan panjang jalan kabupaten 648,16 km yang terdiri dari 233 ruas. Berikut merupakan tabel panjang jaringan jalan kabupaten, provinsi dan nasional berdasarkan kondisi dari tahun 2007 sampai 2012.

Tabel 2.90
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s.d 2012

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (KM)					
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Baik	268.34	281.97	319.58	332.42	340.42	358,10
2	Rusak Ringan	87.00	85.65	66.19	62.55	60.28	44,43

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (KM)					
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
3	Rusak Sedang	121.24	113.04	112.02	110.92	109.69	144,96
4	Rusak Berat	171.58	167.50	150.37	142.27	137.77	147,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2012, sebaliknya panjang jalan dalam kondisi rusak berat terus berkurang setiap tahunnya. Namun bila dilihat pada tahun 2012, terdapat permasalahan, dimana sekitar 147,78 km jalan dalam kondisi rusak berat, 144,96 jalan dalam kondisi rusak sedang dan 44,43 km jalan dalam kondisi rusak ringan. Untuk mengatasi permasalahan ini, kedepan masih diperlukan adanya penanganan lebih lanjut terhadap ruas jalan yang kondisinya masih belum baik, dengan cara melanjutkan program pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan, baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan periodik.

Tabel 2.91
Panjang Jaringan Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s.d 2012

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (KM)					
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Baik	62.01	74.01	82.55	85.55	89.41	87,41
2	Rusak Ringan	-	1.86	1.86	1.86	-	-
3	Rusak Sedang	50.40	36.54	28.00	25.00	23.00	-
4	Rusak Berat	33.13	33.13	33.13	33.13	33.13	58,13
Jumlah		145.54	145.54	145.54	145.54	145.54	145.54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa panjang jalan provinsi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2012, sedangkan panjang jalan dalam kondisi rusak berat juga mengalami penambahan. untuk itu diperlukan koordinasi dan informasi kepada pemerintah provinsi Aceh.

Tabel 2.92
Panjang Jaringan Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s.d 2012

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (KM)					
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Baik	57.16	61.16	63.16	72.16	82.16	96,16
2	Rusak Ringan	58.08	56.08	56.08	50.08	43.08	-
3	Rusak Sedang	60.99	58.99	56.99	53.99	50.99	36,08
4	Rusak Berat	16.82	16.82	16.82	16.82	16.82	60,81
Jumlah		193.05	193.05	193.05	193.05	193.05	193,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa panjang jalan nasional dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2012, begitu juga dengan panjang jalan dengan kondisi rusak sedang. Sebaliknya panjang jalan dalam kondisi rusak berat dalam kurun waktu lima tahun kebelakang tidak mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan bagi pemerintah dan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan program pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan, baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan periodik.

Tabel 2.93
Panjang Jaringan Jalan Strategis Nasional Berdasarkan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s.d 2012

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (KM)					
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Baik	1.50	1.50	2.50	4.00	8.00	8
2	Rusak Ringan	-	-	-	-	-	-
3	Rusak Sedang	19.14	19.14	18.14	16.64	12.64	-
4	Rusak Berat	-	-	-	-	-	12,64
Jumlah		20.64	20.64	20.64	20.64	20.64	20,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa panjang jalan strategis nasional dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2012, sebaliknya panjang jalan dalam kondisi rusak sedang terus berkurang setiap tahunnya. Permasalahan dari kondisi ini adalah masih adanya jaringan jalan dengan klasifikasi rusak sedang. Upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan ini adalah dengan penanganan lebih lanjut terhadap ruas jalan dengan kondisi rusak sedang dengan cara melanjutkan program pembangunan jalan dan pemeliharaan jalan, baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan periodik.

B. Jenis perkerasan jalan kabupaten

Jenis perkerasan jalan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari perkerasan permukaan aspal, perkerasan permukaan kerikil dan perkerasan tanah. Berikut merupakan tabel panjang jaringan jalan kabupaten berdasarkan jenis perkerasan di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2007 sampai 2012.

Tabel 2.94
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Perkerasan Jalan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s.d 2012

No	Jenis Perkerasan	Panjang Jalan (KM)					Tahun 2012
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aspal	374.04	383.32	399.57	400.77	410.50	417,63

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kerikil	102.54	97.34	98.22	99.12	99.89	129,86
3	Tanah	171.58	167.50	150.37	148.27	137.77	147,48
Jumlah		648.16	648.16	648.16	648.16	648.16	694,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari data di atas diketahui pada tahun 2012 panjang ruas jalan kabupaten dalam Kabupaten Aceh Tengah 694,97 km, dengan perkerasan aspal 417,63 km, perkerasan kerikil 129,86 km, dan perkerasan tanah 147,48. Permasalahan berkaitan dengan perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Tengah diketahui pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 129,86 km jalan kerikil dan 147,48 km jalan tanah. Upaya yang harus dilakukan adalah fokus pada peningkatan jalan dari kondisi kerikil menjadi perkerasan aspal dan pembangunan jalan yang masih dalam kondisi perkerasan tanah. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2017 seluruh ruas jalan dalam Kabupaten Aceh Tengah permukaannya merupakan perkerasan aspal dan dengan kondisi baik. Berikut merupakan persentase jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Aceh Tengah sepanjang 2007 sampai 2012.

Tabel 2.95
Persentase Jenis dan Kondisi Jalan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 - 2012

No.	Tahun	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	2007	Baik	268.34	41.40
		Rusak Ringan	87.00	13.42
		Rusak Sedang	121.24	18.71
		Rusak Berat	171.58	26.47
2	2008	Baik	281.97	43.50
		Rusak Ringan	85.65	13.21
		Rusak Sedang	113.04	17.44
		Rusak Berat	167.50	25.84
3	2009	Baik	319.58	49.31
		Rusak Ringan	66.19	10.21
		Rusak Sedang	112.02	17.28
		Rusak Berat	150.37	23.20
4	2010	Baik	332.42	51.29
		Rusak Ringan	62.55	9.65
		Rusak Sedang	110.92	17.11
		Rusak Berat	142.27	21.95
5	2011	Baik	340.42	52.52
		Rusak Ringan	60.28	9.30
		Rusak Sedang	109.69	16.92
		Rusak Berat	137.77	21.26
6	2012	Baik	358,10	51,53
		Rusak Ringan	44,43	6,39
		Rusak Sedang	144,96	20,86

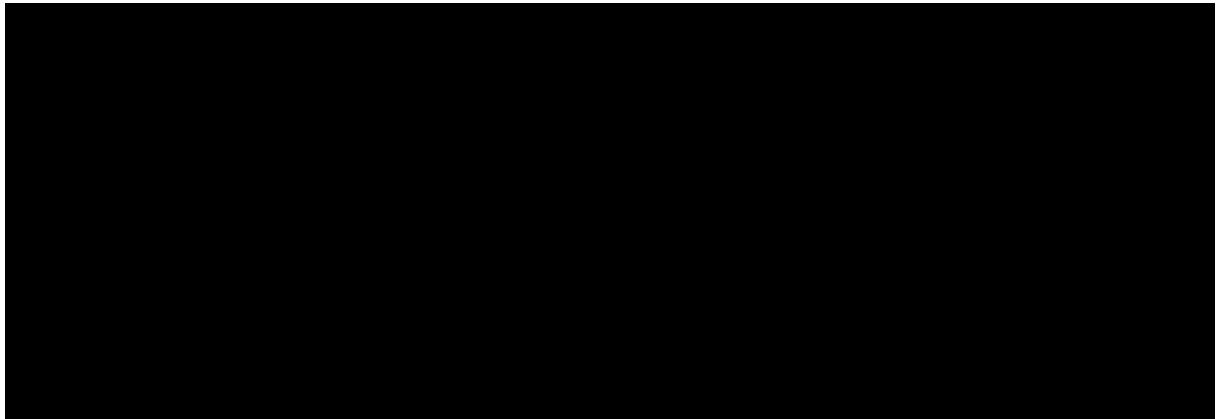
1	2	3	4	5
		Rusak Berat	147,48	21,22

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

C. Irigasi

Irigasi yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah merupakan irigasi semi teknis yang merupakan suatu pelayanan air untuk persawahan yang dapat diatur pemberiannya namun tidak terukur. Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 131 Unit Daerah Irigasi yang tersebar diseluruh kecamatan dengan total panjang saluran sepanjang 275.668 m. Sebanyak 122 daerah irigasi dalam kondisi baik, 7 daerah irigasi dalam kondisi rusak ringan dan 2 daerah irigasi dalam kondisi rusak berat. Luas areal potensial irigasi seluas 15.785 ha dan luas areal fungsional irigasi seluas 12.535 ha. Sumber air yang digunakan untuk mengairi irigasi berasal dari sungai, alur dan sebagian dari embung atau waduk kecil.

Tabel 2.96
Sarana Irigasi Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s.d 2012



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk areal persawahan karena memiliki banyak sumber-sumber air yang dapat dijadikan intake bagi irigasi dan memiliki tofografi yang berbukit sehingga tidak memerlukan bendung yang berukuran besar untuk mengairi areal persawahan.

1. Jumlah Daerah Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 131 Unit Daerah Irigasi yang tersebar diseluruh kecamatan. Dalam pengelolaannya dan pemeliharaan terdapat 130 Unit Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dan 1 Unit Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Aceh. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Aceh adalah Daerah

irigasi Remesen Jamur Barat di Kecamatan Silih Nara yang kondisinya rusak berat semenjak direhabilitasi beberapa tahun silam.

2. Panjang Saluran

Panjang saluran irigasi pada Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 adalah sepanjang 275.668 m, dimana panjang saluran dalam kondisi baik sepanjang 266.003 m (96,49 %), kondisi rusak sedang 4.575 m (1,66 %) dan kondisi rusak berat 5.110 m (1,85 %).

Tabel 2.97
Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s.d 2012

No	Tahun	Panjang Saluran (m)	Kondisi Saluran					
			Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(m)	(%)	(m)	(%)	(m)	(%)
1	2007	126.580	110.982	87,68	7.368	5,82	8.230	6,50
2	2008	133.233	119.053	89,36	6.698	5,03	7.482	5,62
3	2009	248.129	235.238	94,80	6.089	2,38	6.801	2,74
4	2010	255.537	243.818	95,41	5.536	2,17	6.183	2,42
5	2011	266.105	255.452	96,00	5.033	1,89	5.621	2,11
6	2012	275.688	266.003	96,49	4.575	1,66	5.110	1,85

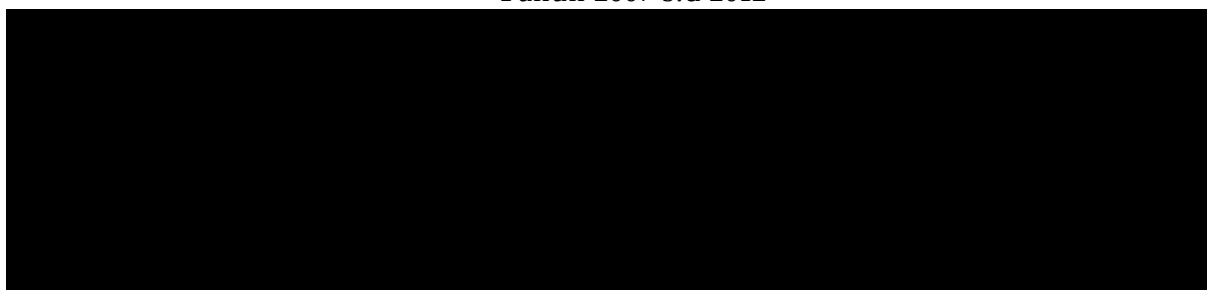
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Kerusakan pada bangunan dan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan longsor.

3. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi pada Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012 adalah sebesar 21,99, angka ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.98
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s.d 2012



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

Rasio jaringan irigasi pada Kabupaten Aceh Tengah dipengaruhi oleh panjang jaringan irigasi intake yang cukup jauh dari areal persawahan sehingga jaringan irigasi memiliki jarak yang panjang namun luas lahan budidaya yang akan dialiri cukup kecil.

D. Sarana Jembatan

1. Jumlah Jembatan

Tabel 2.99
Jumlah Jembatan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
I.	Jumlah Jembatan (unit)	61	64	67	74	81
1	Rangka Baja	6	6	7	12	12
2	Gelagar INP/IWF/Kayu	28	28	29	31	32
3	Konvensional	19	21	22	22	28
4	Jembatan Gantung	8	9	9	9	9
II.	Kondisi Jembatan					
1	Baik (unit)	50	54	56	61	70
2	Rusak Berat	5	5	6	6	6
3	Rusak Ringan	6	5	5	7	5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

2. Panjang Jembatan

Tabel 2.100
Panjang Jembatan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2008 s.d 2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang Total Jembatan (meter)	1.112	1.247	1.327	1.428	1.471

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Tengah, 2013

E. Perumahan

1. Rumah Layak Huni

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk mengurangi *backlog* perumahan dan/atau meningkatkan rumah layak huni. Pada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Tengah, jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.131 unit seperti terlihat pada tabel disamping.

Tabel 2.101
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Unit
1.	Kute Panang	102
2.	Kebayakan	85
3.	Bintang	32
4.	Linge	52
5.	Bebesen	262
6.	Rusip Antara	97
7.	Laut Tawar	128
8.	Ketol	220
9.	Celala	93
10.	Silih Nara	242
11.	Atu Lintang	232
12.	Pegasing	215
13.	Bies	100
14.	Jagong Jeget	271
Jumlah		2.131

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012

2. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan

Kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman. Selama ini, pemerintah telah berupaya mengembangkan suatu kebijakan penyediaan rumah sederhana dengan harga terjangkau oleh masyarakat dengan memperhatikan kemampuan masyarakat golongan berpendapatan rendah dengan kemampuan daya beli yang juga rendah. Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah tinggal tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2011

Status Kepemilikan Rumah Tinggal (%)	Tahun		
	2009	2010	2011
Milik Sendiri	71.99	74.05	75.72
Kontrak/Sewa	13.15	9.15	7.81
Milik Orang Tua/Keluarga	9.08	10.85	10.58
Lainnya	5.78	5.97	5.89

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah 2012, 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2011, rumah tangga dengan status kepemilikan sendiri sebesar 75,72% meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, sedangkan rumah kontrak/sewa pada tahun 2011 menurun menjadi 7,81% dibanding tahun 2009 dan 2010. Selain itu, rumah milik orang tua menjadi 10,58% turun sedikit dari tahun sebelumnya dan status kepemilikan tempat tinggal lainnya hanya sebesar 5,89%. Hal di atas menggambarkan bahwa

keadan perumahan dari tahun ke tahun mengalami pola yang sama, dimana selama rentang waktu 2009-2011 semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah dengan status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri dan semakin sedikit masyarakat yang memiliki rumah dengan status kepemilikan tempat tinggal kontrak/sewa. Sedangkan persentase untuk status kepemilikan tempat tinggal milik orang tua/keluarga dan status kepemilikan tempat tinggal lainnya relatif sama dari tahun-tahun sebelumnya.

3. *Persentase rumah tangga menurut beberapa indikator kualitas perumahan*

Tabel 2.103
Persentase rumah tangga menurut beberapa indikator kualitas perumahan
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2011

No	Indikator Kualitas Rumah (%)	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Lantai Bukan Tanah	88,50	88,98	88,66
2.	Atap Layak/Bukan Dedaunan	99,16	98,76	95,68
3.	Dinding Permanen	98,66	98,59	99,02

Sumber : Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah 2012

2.3.1.6. Pertanahan

Tabel 2.104
Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2010-2012

No	Hak Atas Tanah	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Hak Milik	1.280	1.113	361
2.	Hak Guna Bangunan	-	1	1
3.	Hak Guna Usaha	-	-	-
4.	Hak Pakai	-	-	-
5.	Hak Pakai Dinas/Jawatan	1	29	11
6.	Hak Milik Tanah Negara	51	41	27
7.	Hak Milik Tanah Adat	1.229	1.072	334
Total		2.561	2.256	373

Sumber: Aceh Tengah Dalam Angka, 2012

2.3.1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tingkat kesadaran penduduk Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat berdasarkan status penduduk berdasarkan pendataan jumlah kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir dan berdasarkan Akte Nikah seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.105
Jumlah Penduduk menurut kepemilikan KTP, KK, Akte lahir , Nikah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

No.	Jenis Penududuk Menurut Kepemilikan	Status Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan	
		Sudah	Belum
1.	KTP	87.628	57.670
2.	KK	58.887	9.795
3.	Akte Kelahiran	156.054	57.638
4.	Akte Nikah	55.943	811

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2011

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Tengah masih rendah. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih terpusat di Ibukota Kabupaten sehingga jaraknya terlalu jauh bagi masyarakat yang tersebar diseluruh kabupaten Aceh Tengah.

2.3.1.8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, pemerintah daerah dilengkapi dengan perangkat satuan pengamanan dan penegakan qanun yang terdiri dari tenaga sukarelawan Perlindungan Masyarakat(LINMAS) yang ditempatkan di masing-masing kampung sebanyak 5 (lima) personil juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) untuk menegakkan Qanun atau Perda dan Petugas Wilyatul Hisbah (WH) untuk menegakkan Qanun atau Perda Syari'at Islam. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Wilyatul Hisbah dan Linmas di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.106
Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Wilyatul Hisbah dan Linmas
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

No.	Satuan	Tahun 2012
1	2	3
1.	Polisi Pamong Praja (Pol-PP)	135
2.	Wilyatul Hisbah (WH)	25
3.	Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	2.742
Jumlah		2.902
Rasio		134

Sumber : Kantor Kesbanglinmas, Kantor Satpol-PP dan WH, 2013

Dari tabel dapat dilihat personil perangkat satuan pengamanan masyarakat berjumlah 2902 personil dengan rasio 134 personil dalam 10000 jiwa. Banyaknya partai politik peserta Pemilu

2009 di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 44 Partai. Dan partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DRPK) Aceh Tengah adalah sebanyak 13 Partai dengan jumlah Anggota DRPK sebanyak 30 orang terdiri 28 Pria dan 2 orang Wanita. sedangkan jumlah pemilih pada Pemilu 2009 sebanyak 122.316 jiwa.

Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan profesi sebanyak 144 organisasi, berdasarkan agama sebanyak 15 organisasi, LSM Nasional 43 organisasi, dan LSM Internasional yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah adala 82 organisasi.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah. Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi untuk pengembangan investasi terutama pada bidang perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan energi sumber daya mineral. Namun pada saat ini hanya sebagian kecil potensi yang diminati oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini disebabkan masih minimnya infrastruktur pendukung, kurangnya promosi unggulan daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berikut informasi investasi yang ada di Kabupaten Aceh tengah :

Tabel 2.107
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No.	Uraian	PMDN	PMA	Total
1	2	3	4	5
1	Jumlah Investor Perkebunan	8	-	8
2	Jumlah Investor Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	-	1
3	Jumlah Investor Kehutanan	2	-	2
4	Jumlah Investor Energi dan Sumber Daya Mineral	26	-	26

Sumber : Setdakab. Aceh Tengah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2012.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Aceh Tengah masih bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Sesuai dengan data PDRB Tahun 2011 Kabupaten Aceh Tengah sektor pertanian menyumbang 45,76 persen, namun terdapat kecenderungan sektor

lainnya juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini berarti perekonomian Kabupaten Aceh Tengah mulai beralih dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor tersier (jasa-jasa).

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Produktivitas Pertanian

A. Sub Sektor Tanaman Pangan

Bidang pertanian merupakan salah satu potensi ekonomi utama di Kabupaten Aceh Tengah yang dapat menggerakkan ekonomi daerah. Pembangunan bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan salah satu program utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas, sekaligus untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan yaitu beras, palawija dan hortikultura, baik melalui pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi, maupun rehabilitasi. Dari lima jenis tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Aceh Tengah, padi sawah, kentang, dan cabe merupakan tanaman yang bisa diandalkan produksinya seperti terlihat pada tabel disamping ini.

1. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Tabel 2.108
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

No.	Uraian	Produktivitas				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	11,80	12,16	12,03	12,15	12,11
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	55,30	52,16	49,65	47,86	45,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2011; 2012

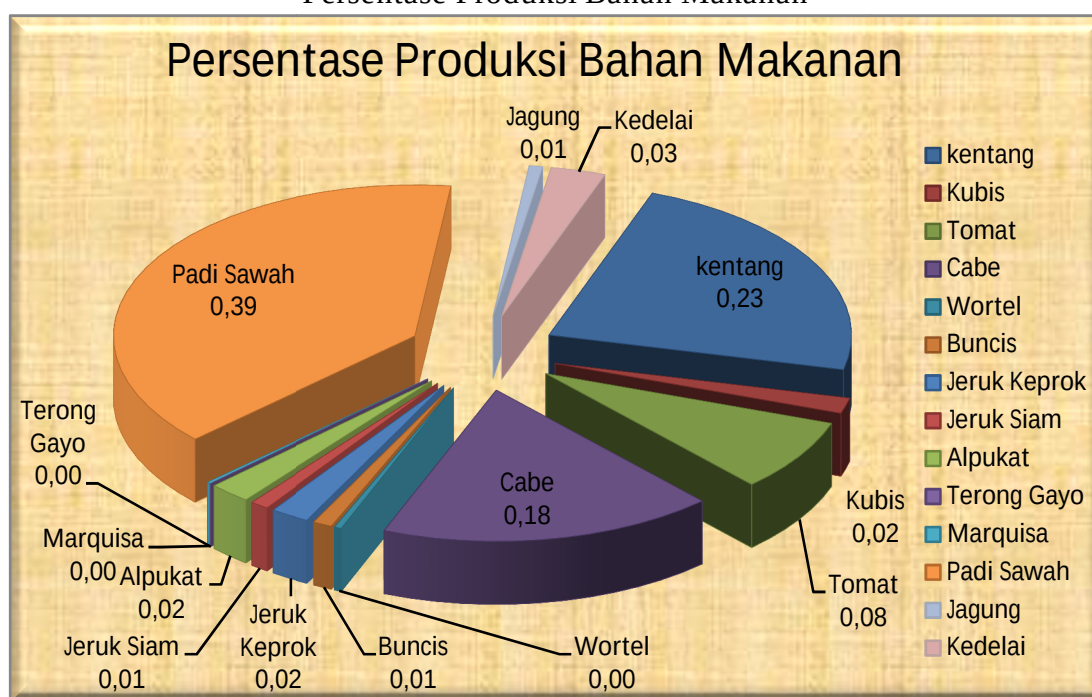
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian semakin menurun dari tahun ketahun, namun sub sektor tanaman pangan kontribusinya cenderung stabil, hal ini menunjukkan bahwa penurunan kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Aceh Tengah tidak dipengaruhi oleh sub sektor tanaman pangan.

Tabel 2.109
Produksi Bahan Makanan Menurut Jenis Komoditi
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2011

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)					Produksi (Kg)				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kentang	134	202	80	140	856	2.399	3.654	1.472	2.618	15.662
2	Kubis	156	121	30	42	49	3.552	2.759	684	953	1.117
3	Tomat	164	219	91	174	424	1.996	2.621	1.128	2.158	5.258
4	Cabe	311	893	459	587	1.959	2.896	5.520	2.708	3.581	12.146
5	Wortel	40	59	20	29	22	468	718	238	345	262
6	Buncis	110	171	56	99	206	394	615	190	337	700
7	Jeruk Keprok	249	246	126	168	168	2.140	2.115	1.084	1.445	1.445
8	Jeruk Siam	159	153	77	84	84	1.645	1.224	616	672	672
9	Alpukat	110	117	45	89	89	1.845	2.042	769	1.522	1.522
10	Terong Gayo	21	-	-	-	-	114	-	-	-	-
11	Marquisa	77	68	30	35	15	637	569	249	291	125
12	Padi Sawah	9.575	9.748	5009	5459	27.020	31.520	32.041	16.530	20.362	26.325
13	Jagung	395	609	108	61	119	1.626	2.485	443	250	488
14	Kedelai	274	271	69	50	1.323	233	337	76	75	1.985

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Gambar 2.4
Persentase Produksi Bahan Makanan



Sumber : Aceh Tengah Dalam Angka, 2011

A. Sub Sektor Perkebunan

Menurut data BPS (2011), penyumbang terbesar PDRB sektor pertanian Tahun 2010 adalah sub sektor tanaman perkebunan. Selama lima tahun terakhir sub sektor tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian seperti diperlihatkan pada tabel dibawah.

Tabel 2.110
Peranan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap
PDRB Sektor Pertanian Tahun 2007 – 2011

No	Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Sub Sektor Tanaman Perkebunan	24.09	22.03	20.45	18.99	17,98
2.	Sektor Pertanian	55.30	52.16	49.65	47.86	45,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Seiring dengan penurunan kontribusi sektor pertanian, sub sektor tanaman perkebunan juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 kontribusi sektor perkebunan adalah sebesar 17,98 persen mengalami penurunan sebesar 6,11 persen dari tahun 2007 yaitu sebesar 24,09 persen.

Sebagai komoditas unggulan, kopi berkontribusi besar dalam pendapatan daerah dan pendapatan petani. Pada tahun 2012, total areal kopi Arabika di Kabupaten Aceh Tengah mencapai 48.300 Ha dengan produksi 25.421 Ton/Tahun, yang melibatkan 34.410 KK petani. Eksistensi kopi arabika di Dataran Tinggi Gayo telah memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI), Menteri Pertanian telah melepas varietas kopi dataran tinggi gayo dengan nama Gayo 1 dan Gayo 2. Selanjutnya akan diupayakan untuk membangun Kebun Induk bagi pengembangan Kopi Gayo 1 dan Gayo 2.

Pada sisi lain, produktivitas kopi rakyat masih rendah (720 Kg/Ha/Tahun). Hal tersebut, antara lain disebabkan serangan hama penggerek buah kopi (PBKo). Serangga hama PBKo *Hypothenemus hampei* (Ferr.) yang tergolong bangsa kumbang (*Coleoptera*), dapat mengakibatkan kehilangan hasil produksi sebanyak 10–40%. Untuk mengurangi kerugian petani diperlukan upaya pengendalian hama PBKo. Selain serangan hama penggerek buah kopi (PBKo), tantangan lain yang dihadapi petani kopi adalah penyakit Jamur Akar. Pengendalian terhadap penyakit Jamur Akar dapat dilakukan dengan mengaplikasikan agen pengendali hayati *Tricoderma*.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas kopi lainnya yang akan dilakukan meliputi rehabilitasi tanaman tua/terlantar, intensifikasi pertanian, serta integrasi tanaman kopi-ternak. Komoditi perkebunan unggulan lainnya yang masih dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi adalah komoditi tebu dan kakao. Selain pengolahan dan pemasaran gula merah secara tradisional yang telah berjalan, pada Tahun 2013 akan dimulai pembangunan pabrik gula pasir di Kecamatan Ketol dengan melibatkan investor (PMA). Upaya peningkatan nilai tambah petani juga akan diupayakan melalui bantuan peralatan pengolahan hasil perkebunan

B. Kehutanan

Penyumbang PDRB sektor pertanian Tahun 2011 terbesar kedua adalah sub sektor kehutanan dimana pada tahun 2007 sebesar 16,89 persen, turun sebesar 3,59 persen dari tahun 2011 sebesar 13,30 persen yang menempati penyumbang terbesar kedua PDRB sektor pertanian selama kurun waktu lima tahun terakhir seperti diperlihatkan pada tabel berikut.

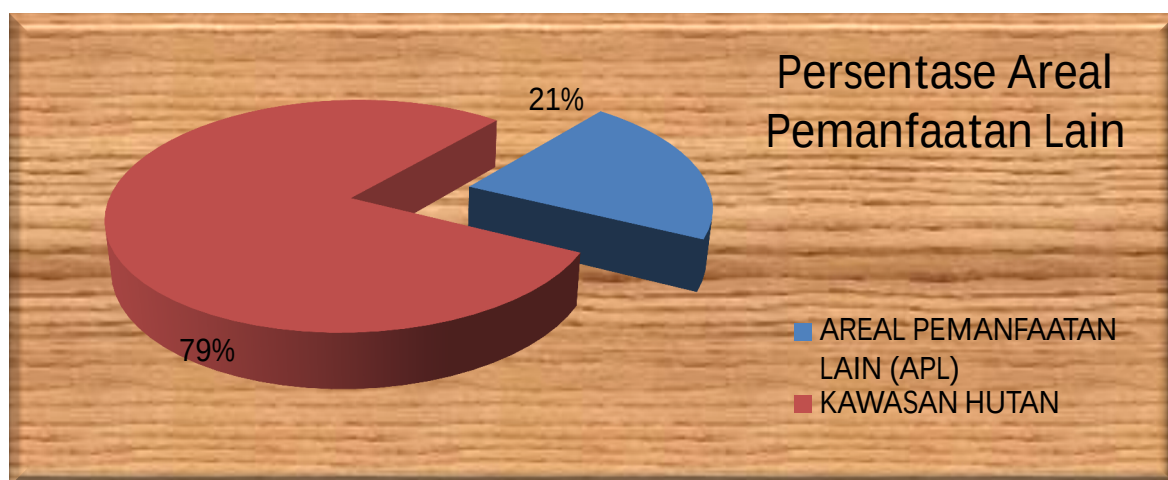
Tabel 2.111
Peranan Sub Sektor Kehutanan Perkebunan terhadap
PDRB Sektor Pertanian Tahun 2007s/d 2011

No	Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Sub Sektor Kehutanan	16.89	15.39	14.64	14.21	13,30
2.	Sektor Pertanian	55.30	52.16	49.65	47.86	45,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Kawasan hutan di Kabupaten Aceh Tengah meliputi 79% dari total luas wilayah di Kabupaten Aceh Tengah seperti diperlihatkan pada Tabel 2.4 serta grafik berikut.

Gambar 2.5
Persentase Areal Pemanfaatan Lain

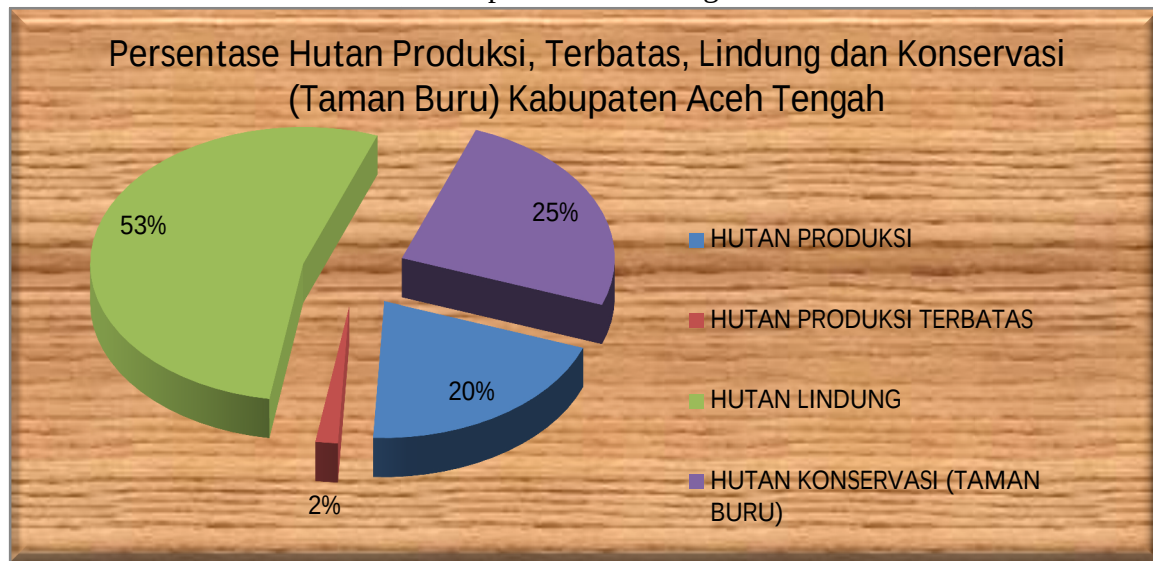


Sumber : Draft RTRW Kabupaten Aceh Tengah

Kawasan hutan dimaksud meliputi :

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Lindung, dan
- Kawasan Hutan Konservasi (Taman Buru), dengan persentase seperti diperlihatkan pada grafik berikut :

Gambar 2.6
 Persentase Hutan Produksi, Terbatas, Lindung dan Konservasi (Taman Buru)
 Kabupaten Aceh Tengah



Berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS Krueng Aceh (2012), wilayah Kabupaten Aceh Tengah memiliki indikasi lahan kritis seluas 413.484,06 Ha dengan tingkat kekritisan lahan sebagai berikut :

- Potensial kritis, 205.175,23 Ha
- Agak kritis, 87.731,10 Ha
- Kritis, 88.229,81 Ha dan
- Sangat Kritis, 22.347,92 Ha

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilakukan selama Tahun 2007 – 2010 diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.112
 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 – 2012

Tahun	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)
2007	334
2008	1.800
2009	380
2010	2.225
2011	3.225
2012	1.468
JUMLAH	2.684

Upaya rehabilitasi yang telah dilakukan belum memberikan hasil yang memuaskan, tantangan terbesar yang sering dihadapi adalah kebakaran hutan dan lahan terutama pada saat

musim kemarau. Untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, upaya yang ditempuh saat ini adalah memberdayakan tenaga pengamanan hutan dan tenaga upas api.

Tantangan-tantangan yang dihadapi urusan kehutanan meliputi :

- a. Rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal
Semenjak berlakunya moratorium logging sesuai Instruksi Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2007, pemenuhan kebutuhan kayu hanya dapat diambil dari Hutan Tanaman Industri dan Hutan/Kayu Rakyat. PT. Tusam Hutani Lestari sebagai pemegang konsesi HPHTI di Aceh Tengah sampai saat ini belum melakukan kegiatan penebangan karena terkendala persyaratan Rencana Kerja yang belum dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan kayu lokal hanya dapat diambil dari hutan rakyat/hutan milik.
- b. Tingginya perambahan dan tekanan terhadap eksistensi kawasan hutan
Tingginya kebutuhan lahan untuk perkebunan rakyat (kopi) mendorong masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan

Upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mengatasi tantangan - tantangan tersebut yaitu :

- a. Mendorong Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi Instruksi Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang moratorium logging
- b. Mendorong HPHTI PT. Tusam Hutani Lestari untuk segera menjalankan kegiatannya.
- c. Menumbuhkan unit Hutan Kemasyarakatan (HKm) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menahan tekanan terhadap kawasan hutan.
- d. Menumbuhkan unit Hutan Tanaman Rakyat (HTR) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menahan tekanan terhadap kawasan hutan serta pemenuhan kebutuhan kayu di masa yang akan datang.
- e. Melakukan kajian terhadap pemanfaatan Taman Buru bagi peningkatan masyarakat sekitar hutan.
- f. Penyelesaian RTRWK Aceh Tengah yang mengakomodir kebutuhan berbagai pihak dan kepentingan terkait.

C. Sub Sektor Peternakan

Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Unggas Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel di samping ini.

Tabel 2.113
Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Unggas
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2012

Tahun	Jenis Ternak					
	Ayam Buras		Ayam Ras		Itik	
	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)
2007	133.819	79.396	198.143	145.805	63.208	27.619
2008	145.185	76.697	153.213	398.276	73.164	22.398
2009	153.013	156.070	88.734	234.105	80.342	80.775
2010	183.616	235.112	106.480	555.314	82.753	14.667
2011	183.011	506.536	111.873	650.708	86.942	90.738
2012	137.258	155.811	112.245	330.085	70.432	12.794

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Aceh Tengah, 2013

Perkembangan ternak besar di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.114
Perkembangan Ternak Besar Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007-2012

Tahun	Jenis Ternak				
	Kerbau		Sapi		Kuda
	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (ekor)
2007	23.189	70.082	5.165	10.743	1.773
2008	25.327	91.240	6.773	9.180	2.132
2009	26.487	42.750	6.773	5.110	2.347
2010	23.428	110.320	6.203	10.620	1.736
2011	24.502	68.480	7.570	15.648	1.826
2012	13.244	153.300	7.044	40.590	1.601

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Aceh Tengah, 2013

Perkembangan populasi dan produksi daging ternak kambing dan domba di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115
Perkembangan Populasi dan Produksi Daging Ternak Kambing dan Domba
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012

Tahun	Jenis Ternak			
	Kambing		Domba	
	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Kg)
1	2	3	4	5
2007	6.417	48.850	3.116	14.882
2008	6.980	48.715	3.846	7.230
2009	7.316	32.480	4.235	7.785

1	2	3	4	5
2010	8.779	69.888	2.541	5.600
2011	9.233	34.890	2.670	29.970
2012	12.025	77.632	960	6928

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Aceh Tengah, 2013

D. Sub Sektor Perikanan

Luas daerah penangkapan ikan di Kabupaten Aceh Tengah sekitar 5.200 ha. Alat tangkap yang digunakan adalah didisen (perangkap), anco dan jaring insang. Alat tangkap didisen dan anco telah digunakan turun temurun, jaring insang untuk menangkap ikan *R. tawarensis* baru digunakan pada era tahun 1980an. Didisen dioperasikan pada waktu tertentu yaitu musim ikan memijah pada saat musim hujan. Anco digunakan untuk menangkap ikan *R. tawarensis* pada malam hari dengan bantuan lampu penerangan.

Kecenderungan penangkapan yang berlebih pada perikanan *R. tawarensis* di Danau Laut Tawar pada tahun 1980-an. Berdasarkan Kartamihardja *et al.* (1995) produksi ikan *R. tawarensis* mengalami penurunan akibat tidak adanya aturan penangkapan. Pengaturan alat tangkap telah diberlakukan dengan ditetapkannya peraturan daerah untuk pengaturan ukuran alat tangkap. Penggunaan alat tangkap insang semakin pesat dengan ukuran yang beragam. Ukuran jaring insang yang ada yaitu ukuran 3/8, 5/9, 5/8, dan ¾ inchi. Alat tangkap anco pada tahun 2010 tidak terlihat lagi beroperasi akibat hasil tangkapan yang terus menurun dan nol. Didisen masih beroperasi namun berkurang 95 persen pada tahun 2010 yang aktif beroperasi hanya tinggal tiga didisen.

Jumlah unit penangkapan ikan di Danau Laut Tawar yaitu terdiri dari: tanpa perahu 92 unit (pancing 39 unit dan jermal 14 unit), jukung 252 unit (jaring insang tetap 228 unit dan bubu 24 unit), dan motor temple 197 unit (jaring insang tetap 184 unit dan bubu 13 unit). Jumlah tangkapan jaring insang untuk ikan *R. tawarensis* 16.44 ton dan 0.57 ton dari didisen tahun 2009.

Berdasarkan wawancara terhadap 40 nelayan ikan *R. tawarensis* yang menggunakan alat tangkap jaring insang bahwa masyarakat melakukan pemasangan jaring dengan rata-rata panjang jaring 200 m. Melakukan penangkapan dalam sebulan rata-rata 20 hari. Banyaknya pengangkatan jaring dalam satu malam yaitu 1-10 kali dengan nilai rata-rata 2 kali per hari. Hasil tangkapan tergantung pada musim dan bulan namun tangkapan berkisar antara 0 hingga 7 Kg (Hasri *et al.* 2010).

Nelayan di kabupaten Aceh Tengah terdiri dari Nelayan Penuh (tetap) 44 orang, nelayan sambilan utama 239 orang dan nelayan tambahan 69 orang (Bappeda Kab. Aceh Tengah 2009). Jumlah nelayan di Danau Laut Tawar pada tahun 2006 sebanyak 596 orang, pada tahun 2007

turun menjadi 225 orang. Jumlah nelayan mengalami penurunan akibat dari jumlah hasil tangkapan yang mulai berkurang sehingga banyak masyarakat yang beralih mata pencaharian nelayan berubah menjadi petani. Hasil tangkapan utama ikan depik dan nila.

Rumah Tangga Perikanan (RTP), merupakan satuan rumah tangga nelayan yang didasarkan pada satuan unit penangkapan ikan diukur dari kepemilikan armada penangkapan. Pada penelitian ini satuan unit armada sebagai acuan RTP, dibagi atas 2 kelompok yakni RTP dengan perahu tanpa motor dan RTP dengan motor tempel.

1. Perikanan Budidaya

Kegiatan keramba jaring apung di Danau Laut Tawar terdiri dari keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Kegiatan ini setiap tahunnya meningkat. Sampai tahun 2011 jumlah keramba jaring apung sebanyak 146 unit atau setara dengan 0,65 Ha dan keramba jaring tancap 571 unit setara dengan 29 Ha. Komoditas yang dominan dikembangkan adalah ikan nila.

2. Potensi Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.116
Jumlah Produksi Ikan tahun 2007-2012 di kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Produksi Ikan (Ton)			
	Budidaya		Tangkapan	
	Mas	Nila	Depik	Mas, Nila dll
2007	21,2	48,6	18,4	56,1
2008	32,0	40,8	15,0	64,1
2009	24,3	90,5	12,8	112,8
2010	18,8	169,9	14,6	222,5
2011	48,68	268,26	32,2	245,1
2012	0,69	2,9	69,97	238,6

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Aceh Tengah, 2013

Tabel 2.117
Jumlah Produksi Benih Ikan tahun 2007-2012 di Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Produksi Benih (ekor)			
	Ikan Mas		Ikan Nila	
1	2		3	
	BBI	UPR	BBI	UPR
2007	60.000	120.000	125.000	456.000
2008	40.000	224.000	234.000	1.460.000
2009	46.000	480.000	467.000	1.680.000
2010	54.600	488.000	488.000	1.760.000
2011	15.000	489.000	85.000	1.770.000
2012	11.000	950.000	45.000	1.770.000

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Aceh Tengah, 2013

E. Ketahanan Pangan

1. Kerawanan Pangan

Dilihat dari segi kerawanan Pangan terdapat beberapa kecamatan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 dan prioritas 5. Penyebab utama kerawanan pangan prioritas 1 yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi, tidak ada akses listrik, kasus berat badan kurang pada balita masih tinggi, tidak ada akses jalan untuk kendaraan roda empat, tidak ada sumber air bersih, dan rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan sereal masih meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.118
Sebaran Kecamatan yang masuk dalam Daerah Rawan Pangan Prioritas 1 s/d 6
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

No.	Kecamatan	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6
1.	Lut Tawar				✓		
2.	Kute Panang			✓			
3.	Jagong Jeget			✓			
4.	Kebayakan				✓		
5.	Rusip Antara			✓			
6.	Ketol				✓		
7.	Atu Lintang				✓		
8.	Linge					✓	
9.	Celala					✓	
10.	Bebesen					✓	
11.	Bintang					✓	
12.	Angkup					✓	
13.	Silih Nara					✓	
14.	Pegasing					✓	

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kabupaten Aceh Tengah;2012

Ket : Rentan (Rawan Pangan):

- Prioritas 1 : Sangat Rentan
- Prioritas 2 : Rentan
- Prioritas 3 : Kurang rentan
- Prioritas 4 : Kurang Tahan
- Prioritas 5 : Tahan
- Prioritas 6 : Sangat Tahan

Permasalahan utama di bidang ketahanan pangan antara lain adalah: 1) belum lancarnya distribusi pangan; 2) harga pangan yang tidak stabil; 3) dukungan regulasi tentang ketahanan

pangan belum tersedia; 4) kurangnya data dan informasi yang akurat; 5) rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung; dan 6) rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan.

Belum lancarnya distribusi pangan disebabkan oleh: 1) dukungan infrastruktur sarana jalan dan jembatan untuk memperlancar distribusi pangan; 2) sarana transportasi yang belum memadai; 3) sistem transportasi, yakni sistem transportasi yang masih kurang efektif dan efisien; 4) kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan; serta 5) masalah keamanan dan pungutan liar. Harga pangan yang tidak stabil disebabkan oleh: 1) kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan; 2) peningkatan biaya distribusi pangan; dan 3) rendahnya produktivitas pangan.

Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang ketahanan pangan disebabkan oleh tidak tersedianya pengelola data (SDM dan kelembagaan) yang terkait dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan cadangan pangan untuk dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan distribusi, stabilisasi harga dan pasokan pangan serta kondisi cadangan pangan. Selanjutnya, rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung tergambar dari terbatasnya sarana dan prasarana transportasi distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar dan konsumen. Rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan disebabkan oleh: 1) kemampuan masyarakat yang relatif rendah; 2) kebiasaan makan; 3) ketersediaan pangan ditingkat lokal; 3) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap gizi dan kesehatan relatif rendah.

Untuk mengatasi permasalahan dibidang ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus melakukan upaya antara lain: 1) pengembangan desa mandiri pangan; 2) penanganan daerah rawan pangan; 3) pemberdayaan lumbung pangan masyarakat; 4) penguatan lembaga ekonomi pedesaan (LUEP); 5) penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM); dan 6) percepatan penganeekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan harga, kualitas dan distribusi pangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan: 1) koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang terkait dalam stabilisasi harga, pasokan pangan dan cadangan pangan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri; 2) pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan pasokan pangan serta harga yang terjangkau; 3) pemantauan dan pengembangan terhadap cadangan pangan masyarakat dan pemerintah; dan 4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM).

2. Penyuluhan

Tenaga Penyuluh Pertanian (PPL) di Kabupaten Aceh Tengah saat ini sebanyak 210 orang yang terdiri dari 67 orang PNS dan 143 orang Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB) yang tersebar di 14 Kecamatan. Ketersediaan penyuluh disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.119
Jumlah Penyuluh Pertanian PNS-THL, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Perikanan, BPP, Kec, Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 (Per Juli)

No	Penyuluh	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Penyuluh Pertanian	-	57	57	57	53	53
2.	Penyuluh Kehutanan	-	8	8	8	8	8
3.	Penyuluh Perikanan	-	2	2	5	5	5
4.	THL-TB	-	121	121	120	120	118
5.	BPP	-	14	14	14	14	14
6.	Kecamatan	-	14	14	14	14	14

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, 2012

Permasalahan utama dalam hal penyuluhan adalah: 1) penempatan tenaga penyuluh tidak sesuai dengan profesinya; 2) belum maksimalnya koordinasi antar dinas yang menangani urusan penyuluhan dengan lembaga penyuluhan; 3) penempatan tenaga penyuluh tidak sesuai proporsi berdasarkan potensi; 4) banyaknya tenaga penyuluh senior banyak beralih status dari fungsional ke struktural dan juga mulai memasuki masa usia pensiun; 5) belum optimalnya proses pendampingan dan pembinaan kelompok-kelompok tani; 6) kurangnya kapasitas penyuluh; 7) terbatasnya jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 8) belum tersedianya pos penyuluh; dan 9) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengatasi permasalahan kepenyuluhan antara lain : 1) peningkatan koordinasi antar dinas yang menangani urusan penyuluhan; 2) penyediaan regulasi untuk mempertahankan status tenaga penyuluh sebagai tenaga fungsional; 3) Mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan kelompok-kelompok tani; 4) peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan-pelatihan dan study banding; 5) penerimaan penyuluh baru diutamakan yang mempunyai keahlian Perikanan, kehutanan dan peternakan; 6) pembentukan pos-pos penyuluhan di kampung-kampung; dan 7) menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.

2.4.1.2. Produktivitas Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja per sektor ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun, dari konteks produktivitas tenaga kerja per sektor, sektor pertanian memiliki nilai tambah

yang sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan memperhitungkan migas, produktivitas tenaga kerja untuk sektor pertanian adalah 2,42 persen (Rp.10.941.135) di tahun 2010 dan turun menjadi 2,36 persen (Rp. 10.409.419) pada tahun 2011 (Tabel 2.115).

Tabel 2.120
Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Tahun 2010 dan 2011
Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Total Tenaga Kerja		PDRB				Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor				
		2010	2011	2010		2011		2010		2011		Nilai Tambah
		Orang	Orang	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	
1	Pertanian	62.101	64.631	508643,52	42,84	514882,65	41,33	8.190.638	6,44	7.966.447	6,11	-224.190
2	Pertambangan & Pengalihan	518	539	7730,93	0,65	8041,72	0,65	14.938.851	11,74	14.930.922	11,45	-7.929
3	Industri Pengolahan	2.846	2.962	27788,89	2,34	28875,15	2,32	9.763.240	7,67	9.747.635	7,48	-15.605
4	Listrik, Gas & Air Bersih	3.105	3.232	8042,52	0,68	8924,5	0,72	2.590.159	2,04	2.761.661	2,12	171.502
5	Konstruksi	7.245	7.540	138613,11	11,68	150769,48	12,10	19.132.059	15,04	19.995.077	15,34	863.018
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	10.350	10.772	146989,47	12,38	159618,17	12,81	14.201.744	11,16	14.818.014	11,37	616.271
7	Pengangkutan & Komunikasi	2.588	2.693	76828,12	6,47	82358,53	6,61	29.691.740	23,34	30.582.731	23,46	890.991
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4.347	4.524	17942,49	1,51	18955,18	1,52	4.127.517	3,24	4.189.733	3,21	62.216
9	Jasa - jasa	10.350	10.772	254659,91	21,45	273374,47	21,94	24.604.584	19,34	25.378.482	19,47	773.897
Jumlah				1.187.239	100,00	1245799,9	100,00	127.240.532	100,00	130.370.702	100,00	3.130.170

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Rendahnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian secara umum adalah disebabkan oleh: 1) rendahnya nilai tambah yang di hasilkan oleh produk pertanian; 2) rendahnya kualitas sumberdaya petani maupun petugas di lapangan; 3) terbatasnya teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas; dan 4) belum optimalnya pemilihan produk yang berbasis kebutuhan atau permintaan pasar.

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah: 1) peningkatan nilai tambah produk pertanian; 2) peningkatan kualitas sumberdaya petani dan petugas; 3) penyediaan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas; dan 4) mengoptimalkan pemilihan produk yang berbasis kebutuhan atau permintaan pasar.

2.4.1.3. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) merupakan lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi daerah. ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika

kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM.

A. Koperasi

Tabel 2.121
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007 s.d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah koperasi aktif	159	162	162	197	218	223
2	Jumlah koperasi	350	368	377	396	416	445
3	Persentase koperasi aktif	45,43	44,02	42,97	49,75	52,40	50,11

Sumber : *Disperindagkop, ESDM, 2012*

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif semakin meningkat dari tahun ketahun baik dari jumlah koperasi maupun persentase yang pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif berjumlah 223 koperasi dari 445 koperasi yang terdaftar atau 50,11 persen, diharapkan kedepan jumlah koperasi akan semakin bertambah baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Tabel 2.122 menunjukan jumlah koperasi menurut jenis keanggotaanya.

Tabel 2.122
Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut jenisnya
Kabupaten Aceh Tengah 2007 s/d 2012

No	Jenis Koperasi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KUD	15	15	15	15	15	15
2	Koperasi Pegawai Negeri (KPRI)	48	48	48	49	49	50
3	Koperasi Karyawan	8	8	9	9	9	9
4	Koperasi Pasar	7	3	13	13	14	15
5	Koperasi Wanita	19	29	30	32	32	33
6	Koperasi Serba Usaha	73	83	94	104	119	134
7	Koperasi Industri Kerajinan	6	7	6	6	6	6
8	Koperasi Pondok Pesantren	5	5	4	5	6	14
9	Koperasi Pertanian	43	47	46	50	51	49
10	Koperasi Peternakan	11	12	12	12	12	13
11	Koperasi Perikanan	6	6	6	6	6	5
12	Koperasi Perkebunan	6	7	6	6	6	7
13	Koperasi Sekunder	17	10	10	10	11	10
14	Koperasi Lainnya	86	88	78	79	80	65
JUMLAH		350	368	377	396	416	425

Sumber: *SPKD Kab. Aceh Tengah 2012, (diolah)*

Jenis koperasi yang terbanyak jumlah nya adalah koperasi serba usaha berjumlah 134 unit, kemudian koperasi pegawai negeri (KPRI) 50 unit, semetara koperasi industri kerajinan 6 unit, pondok pesantren 14 unit, koperasi perikanan 5 unit dan koperasi perkebunan berjumlah 7 unit.

B. Jumlah UMKM Aktif dan BPR

Disamping Koperasi di Kabupaten Aceh Tengah, terdapat sejumlah usaha kecil dan menengah yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat. Tidak kurang dari 4 jenis bidang UKM yang telah berkembang di daerah ini seperti di bidang perdagangan, industri, non industri, dan di bidang aneka jasa. Data yang tersedia, memperlihatkan bahwa pada tahun 2009 tercatat sebanyak 702 UKM, dan pada tahun 2012 jumlah UKM telah mencapai 967 unit. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.123
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007-2012

No.	Bidang Usaha	Jenis Usaha	Tahun (unit)					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Industri	Kilang Kopi	44	44	55	52	54	58
		Kilang Tebu	82	89	95	121	129	127
		Tukang Jahit	57	57	65	106	113	114
		Tukang Emas	17	20	27	26	25	26
		Penjahit Kerawang	21	21	21	29	29	29
		Tukang Perabot	18	18	20	35	39	40
		Pengetaman Kayu	10	15	18	12	12	39
		Reparasi Sepeda Motor	19	19	39	100	100	104
		Penggilingan Kopi	10	10	10	37	45	58
		Tukang Tahu	4	5	5	14	13	16
2	Perdagangan	Rempah-rempah	1.085	1.109	1.133	1.150	126	1300
		Kelontong	393	399	425	425	80	500
		BBM	337	341	357	363	189	189
		Jual Beli Hasil Bumi	287	314	354	362	130	175
		Warung	189	191	197	199	29	145
		Penjual Pakaian/Tk. Jahit	106	125	161	166	72	80
		Eksportir Kopi	30	30	32	32	3	5
		Penjual Pupuk	30	30	35	35	11	20
		Lainnya	208	234	403	441	1.129	1.225

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Non-Industri	Reproduksi Media Rekam			2	2	4	7
		Industri Furniture dari Logam			47	8	8	9
		Industri Alat Pemotong dan Alat – alat Lain yang Digunakan dalam Rumah Tangga			4	4	4	4
		Industri Pupuk Lam/Non Sintesis Hara Makro Primer			1	1	1	2
		Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia			18	26	26	28
		Industri Barang-barang dari semen dan Kapur untuk Kontruksi			6	6	7	7
		Industri Batu Bata dari Tanah Liat			15	38	38	39
		Industri Bordir/Sulaman			21	29	29	29
		Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan			5	6	5	7
		Industri Furniture dari Kayu			26	38	39	39
		Industri Gula Merah			110	121	127	127
		Industri Kacamata			2	3	2	4
		Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat			3	3	3	4
		Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furniture			6	2	6	6
		Industri Kerupuk dan Sejenisnya			15	16	16	18
		Industri Kosmetik			8	9	15	16
		Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe			8	14	16	16
		Industri Makanan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain			3	7	6	6
		Industri Makaroni Kantor, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya			7	9	7	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik			7	9	10	12
		Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengelasan			8	8	8	9
		Industri Minuman Ringan			20	20	24	24
		Industri Barang-barang dari Semen			3	3	3	4
		Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi			2	2	2	3
		Idustri Pakaian Jadi dari tekstil			86	106	110	113
		Industri Penempaan, Pengepresan dan Pengunggulan Logam			3	3	3	4
		Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainnya			7	10	13	13
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging			1	1	1	1
		Industri Pengolahan Teh dan Kopi			24	37	40	43
		Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi			47	52	58	59
		Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan Kedokteran Gigi			1	1	1	3
		Industri Percetakan			75	86	87	88
		Industri Roti dan Sejenisnya			6	11	11	13
		Industri Tempe			9	12	12	14
4	Aneka Jasa	Industri Jasa Penunjang Percetakan			5	5	3	3
		Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam			16	5	7	7
		Jasa Penunjang Industri			16	25	26	26
		Pemeliharaan dan Reparasi Mobil			31	49	50	50
		Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor			82	100	104	106
		Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi dan Komputer			3	3	3	3
Jumlah					702	887	933	967

C. Perbankan

Tabel 2.124 Perbankan Kabupaten Aceh Tengah

BANK	TAHUN	Bank Aceh	Bank Aceh Syari'ah	BRI	BTPN	BPRS	MANDIRI	DANAMON	BNI	JUMLAH
PUSAT	2007									0
	2008					1				1
	2009					1				1
	2010					1				1
	2011					1				1
	2012					1				1
CABANG	2007	1		1						2
	2008	1		1						2
	2009	1		1						2
	2010	1		1						2
	2011	1		1						2
	2012	1		1						2
CAPEM	2007	2								2
	2008	3						1		4
	2009	4						1		5
	2010	4			1			1		6
	2011	4	1		2			1	1	9
	2012	4	1		2			1	1	9
KAS	2007				1					1
	2008				1					1
	2009				1		1			2
	2010						1			1
	2011						1			1
	2012						1			1
UNIT	2007			4						4
	2008			4						4
	2009			6						6
	2010			6						6
	2011			6						6
	2012			6						6
ATM	2007	1		1						2
	2008	2		2			2			6
	2009	2		7			2			11
	2010	2		7			2			11
	2011	2		8			3		2	15
	2012	2		11			3		3	19

Sumber: Data Pokok Kabupaten Aceh Tengah, 2012

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

A. Fasilitas Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat, saat ini terdapat 79 kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah yang belum terjangkau jaringan listrik, Kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak yang belum dialir listrik terdapat di Kecamatan Ketol, kemudian Kecamatan Silih Nara sedangkan kampung dalam kecamatan secara keseluruhan telah di aliri listrik adalah Kecamatan Linge, sebaran kampung yang telah dialiri listrik dapat dilihat pada tabel disamping.

.Tabel 2.125
Distribusi Jaringan Listrik Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah Kampung di aliri listrik	Jumlah Kampung tidak di aliri listrik	Jumlah Pelanggan
1	Linge	26	26	-	1.631
2	Bintang	24	23	1	1.471
3	Laut Tawar	18	15	3	5.474
4	Kebayakan	20	19	1	4.317
5	Pegasing	31	21	10	3.186
6	Bebesan	28	27	1	9.542
7	Kute Panang *) (Data pada PT. PLN Bener Meriah)	24	1	23	142
8	Silih Nara	33	21	12	5.425
9	Ketol	25	6	19	520
10	Celala	17	16	1	1.524
11	Jagong Jeget	10	7	3	1.663
12	Atu Lintang	11	9	2	2.116
13	Bies	12	11	1	894
14	Rusip Antara	16	14	2	821
Jumlah		295	216	79	39.392

Sumber: Aceh Tengah Dalam Angka ; 2012

B. Air Minum

Dilihat dari data yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Aceh Tengah, umumnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum menggunakan air minum kemasan dan air ledeng dan sebagian masyarakat terutama di daerah pedesaan menggunakan sumber-sumber air yang tersedia dan langsung dialirkan ke pemukiman penduduk, penggunaan air bersih Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di samping :

Tabel 2.126
Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2008 - 2012

No	Jenis Pelayanan Air Bersih	Kecamatan	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelanggan PDAM (KK):						
	- Golongan Sosial (GS)	Takengon	106	101	96	81	55
	- Instansi Pemerintah (IP)	Takengon	73	89	132	125	61
	- Niaga Kecil (NK)	Takengon	585	737	827	769	904
	- Rumah Tangga (RT)	Takengon	6553	7370	7594	6450	6578
	- POLRI	Takengon	16	15	15	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		SilihNara	670	587	597	571	611
		Pegasing	796	862	880	718	531
		Bintang	327	325	335	240	240
		Toweren	359	0	0	1058	1134
		Ketol	196	297	307	255	306
JUMLAH			9681	10383	10783	10287	10441

Sumber : PDAM Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah, 2012

Pelayanan air minum masih belum mencakup seluruh rumah tangga, sampai saat ini di Kabupaten Aceh Tengah jumlah pelanggan PDAM Tirta Tawar sebanyak 9.053 pelanggan dengan jumlah pelanggan aktif berjumlah 6.155 pelanggan dan pelanggan non aktif berjumlah 997 pelanggan. Sejumlah 1.029 pelanggan mengalami kerusakan meteran dan 1.519 pelanggan belum memiliki *water meter*. Klasifikasi pelanggan PDAM Tirta Tawar adalah 102 pelanggan kategori golongan sosial, 59 pelanggan instansi pemerintah, 509 pelanggan niaga kecil dan 5.472 pelanggan rumah tangga.

C. Perhubungan

1. Jumlah Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana yang mutlak diperlukan dalam transportasi darat. Jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi suatu indikasi bahwa masyarakat semakin membutuhkan sarana transportasi sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.127
Jumlah Kendaraan Tahun 2007 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Kendaraan (Unit)	18.694	18.378	18.868	19.612	21.088	26.102

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan yang belum diikuti dengan jumlah panjang jalan secara memadai sehingga mengakibatkan peningkatan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi.

Tabel 2.128
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2007 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan (Km)	648	648,16	648,57	648,57	694,97	694,97
2.	Jumlah Kendaraan (Unit)	18.694	18.378	18.868	19.612	21.088	26.102
3.	Rasio	28,8	28,6	29	30,2	30,3	37,56

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2007 mencapai 1 : 28,8, ini artinya bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km, dapat diakses kendaraan kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 28,8 kendaraan. Tidak berbeda jauh dengan kondisi tahun 2011 ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1 : 30,3, yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 30,3 kendaraan. Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah panjang jalan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan kendaraan rasio panjang jalan dengan pertumbuhan kendaraan semakin besar.

2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Orang/barang yang terangkut angkutan umum dindikasikan sebagai berkembangnya transportasi massal di suatu daerah. Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum dapat dilihat pada tabel disamping.

Data di disamping menggambarkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum meningkat stabil setiap tahunnya, dari 323,813 yang terangkut di tahun 2011 menjadi 477,750 yang terangkut di tahun 2012. Permasalahan dari angkutan umum ini antara lain: 1) kondisi pelayanan sistem angkutan umum; 2) ketidak berpihakan pada angkutan umum; 3) meningkatnya jumlah kendaraan pribadi.

Tabel 2.129
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2007 s/d 2012
Kabupaten Aceh Tengah

Uraian	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Orang/barang yang Terangkut/angkut selama 1 tahun.	-	317,756	319,756	321,756	323,813	477,750

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jumlah orang/barang yang menggunakan angkutan umum antara lain: 1) standarisasi pelayanan pada pengelola angkutan umum; 2) perlunya keberpihakan pada angkutan umum; 3) membatasi jumlah kendaraan pribadi.

3. Jumlah Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek di Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas jaringan trayek antarkota antarprovinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, dan jaringan trayek perdesaan. Tabel berikut merupakan jumlah izin trayek di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 2.130
Jumlah Izin Trayek Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 s/d 2012

Uraian	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Izin Trayek	-	-	74	225	225	255

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Jumlah izin trayek pada tahun 2012 tidak berbeda dengan jumlah izin trayek tahun 2011. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan izin trayek pada tahun 2012. Hal ini berbeda dengan data izin trayek tahun 2009 yang hanya 74 izin dan meningkat pesat pada tahun 2012 sebanyak 225 izin.

Permasalahan dari izin trayek ini antara lain: 1) masih adanya angkutan umum yang tidak memiliki legalitas operasional; 2) banyaknya angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan seperti persyaratan teknis jalan, menggunakan SIM umum dan menggunakan asuransi. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan izin trayek ini antara lain: 1) setiap angkutan umum harus memiliki legalitas operasional; 2) setiap angkutan umum harus memenuhi persyaratan minimal angkutan.

4. Jumlah Kir Angkutan Umum

Kir sebagai serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Kir ini wajib pada kendaraan plat nomor kuning seperti : mobil rental, mobil penumpang umum, bus dan truk.

Gambar 2.7
Jumlah Angkutan yang Melakukan Pengujian
Tahun 2007-2012



Sumber: Dinas perhubungan, 2013 (diolah)

Jumlah angkutan yang melakukan pengujian di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2007 sampai 2012 disajikan pada gambar disamping. Data di samping menunjukkan angkutan umum yang melakukan pengujian relatif stabil terutama untuk mobil barang dan bus. Sedangkan untuk mobil penumpang terjadi kecenderungan penurunan pengujian.

Permasalahan dari pengujian angkutan ini antara lain: 1) pelaksanaan uji kir belum maksimal; 2) adanya dugaan uji kir hanya dilakukan sebagai formalitas saja.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain: 1) pelaksanaan uji kir dimaksimalkan; 2) uji kir dilakukan dengan sebenarnya meliputi: sistem pengereman dan daya pengereman, lampu-lampu dan daya pancar lampu utama, emisi gas buang, dimensi dan bobot kendaraan, sistem kemudi beserta kaki-kakinya, dan speedometer.

5. Jumlah Terminal Bus

Terdapat tujuh terminal di Kabupaten Aceh Tengah, enam diantaranya adalah terminal bus dengan berbagai tipe. Data terminal ini ditampilkan pada tabel di samping ini.

Tabel 2.131
Jumlah Terminal Bus Tahun 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Terminal	Tipe	Lokasi
1.	Terminal Bus Kota Takengon	B	Kecamatan Bebesen
2.	Terminal Bus Mini Bale Atu		Kecamatan Lut Tawar
3.	Terminal Angkup	C	Kecamatan Silih Nara
4.	Terminal Pegasing	C	Kecamatan Pegasing
5.	Terminal Bus Terpadu Paya Ilang	A	Kecamatan Bebesen
6.	Terminal Bongkar Muat Paya Ilang	B	Kecamatan Bebesen
7.	Terminal Celala	C	Kecamatan Celala

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari data di atas terlihat terminal bus di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup lengkap mulai dari tipe A: Terminal Bus Terpadu Paya Ilang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan; tipe B: Terminal Bus Kota Takengon yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan; serta tipe C: terminal Angkup, Pegasing dan Celala yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Permasalahan dari jumlah terminal bus ini antara lain: 1) minimnya kesadaran penumpang terhadap kebersihan dan ketertiban terminal; 2) minimnya kesadaran penumpang untuk membayar retribusi (peron); 3) minimnya kesadaran terhadap peraturan dan tata tertib terminal; 4) banyaknya kendaraan umum yang tidak membayar retribusi terminal; 5) Pengelolaan terminal yang tidak profesional; 6) Lemahnya pengawasan terhadap peraturan dan tata tertib terminal; 7) kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas: 1) meningkatkan kesadaran penumpang terhadap kebersihan dan ketertiban terminal; 2) meningkatkan kesadaran penumpang dalam membayar retribusi; 3) adanya ketegasan peraturan dan tata tertib terminal dan kendaraan umum; 4) membuat manajemen pengelolaan terminal yang profesional; 5) mengawasi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat; 6) pemeliharaan terminal yang berkelanjutan.

6. Jumlah Dermaga

Pada tahun 2011, Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki empat unit dermaga di tiga kecamatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132
Jumlah Dermaga Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011

No	Nama Dermaga	Jumlah	Lokasi
1.	Dermaga Tetunjung	1 unit	Kecamatan Bebesen
2.	Dermaga Boom	1 unit	Kecamatan Lut Tawar
3.	Dermaga Toweren	1 unit	Kecamatan Lut Tawar
4.	Dermaga Pante Menye	1 unit	Kecamatan Bintang

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Berdasarkan pengertiannya, dermaga merupakan bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan naik turunnya penumpang, namun fungsi dermaga di Kabupaten Aceh Tengah ini antara lain tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai dermaga baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.

Upaya yang harus dilakukan dari permasalahan di atas adalah memfungsikan keberadaan dermaga sebagaimana mestinya dan melakukan pemeliharaan yang maksimal terhadap bangunan yang ada untuk menghindari kerusakan baik ringan, sedang maupun berat.

D. Komunikasi dan informatika

Jumlah Jaringan Komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah. Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu jaringan dan sebaliknya, beberapa operator dapat menggunakan hanya satu jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah.

Tabel 2.133
Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2012
Kabupaten Aceh Tengah

No	Kecamatan	Jumlah
1	2	3
1.	Linge	4 unit
2.	Atu Lintang	1 unit
3.	Jagong Jeget	1 unit
4.	Bintang	1 unit
5.	Laut Tawar	1 unit
6.	Kebayakan	3 unit
7.	Pegasing	7 unit
8.	Bies	2 unit
9.	Bebesen	8 unit
10.	Kute Panang	1 unit

1	2	3
11.	Silih Nara	3 unit
12.	Ketol	4 unit
13.	Celala	3 unit
14.	Rusip Antara	1 unit
Total		40 Unit

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Tengah, 2013

Secara keseluruhan, Kabupaten Aceh Tengah memiliki jaringan komunikasi sebanyak 40 unit yang menyebar di seluruh kecamatan, meski penyebarannya tidak merata. Besarnya ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi ini menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

2.4.2.2. Penataan Wilayah

1. Struktur Ruang

Pola struktur ruang yang dibentuk berdasarkan sistem pusat kegiatan dan pusat pelayanan di Kabupaten Aceh Tengah adalah :

A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW yang ditetapkan dalam RTRWN adalah PKW Takengon, yang dibentuk untuk melayani Provinsi Aceh bagian tengah. PKW Takengon merupakan kumpulan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di Kecamatan Kebayakan, LautTawar dan Bebesen.

B. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)

PKLp yang ditetapkan dalam RTRWK Aceh Tengah adalah:

- PKLp Isaq di Kecamatan Linge, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Linge, Jagong Jeget dan Atu Lintang.
- PKLp Angkup di Kecamatan Silih Nara, mempunyai jangkauan pelayanan paling tidak mencakup Kecamatan Silih Nara, Celala, Kute Panang, Ketol dan Rusip Antara.

C. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang ditetapkan di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

- PPK Simpang Kelaping, di Kecamatan Pegasing.
- PPK Rejewali, di Kecamatan Ketol.
- PPK Jeget Ayu, di Kecamatan Jagong Jeget.
- PPK Bintang, di Kecamatan Bintang.
- PPK Ratawali, di Kecamatan Kute Panang.
- PPK Celala, di Kecamatan Celala.

-
- g. PPK Pantan Tengah, di Kecamatan Rusip Antara.
 - h. PPK Atang Jungket, di Kecamatan Bies.
 - i. PPK Merah Mege, di Kecamatan Atu Lintang.

D. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

- a. PPL Simpang III Uning di Kecamatan Linge.
- b. PPL Ketapang di Kecamatan Linge.
- c. PPL Nosar di Kecamatan Bintang.
- d. PPL Paya Tampus di Kecamatan Rusip Antara.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang di Kabupaten Aceh Tengah meliputi kawasan lindung seluas 273.623,92 Ha atau 63,96 % dari total luas kabupaten dan kawasan budidaya seluas 171.780,21 Ha atau 38,57% dari total luas kabupaten.

A. Kawasan lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Aceh Tengah meliputi:

- Kawasan hutan lindung seluas 179.300,166 Ha,
- Sempadan sungai seluas 2.882,15 Ha;
- Sempadan danau seluas 264,46 Ha;
- Kawasan lindung geologi, berupa kawasan lindung karst dengan luas 21.567,43 Ha;
- Kawasan lindung lainnya berupa Taman Buru memiliki luas 85.352,79 Ha;
- Kawasan rawan bencana banjir dengan luas 93,48 Ha;
- Kawasan bencana sesar memiliki luas 2.707,47 Ha.

B. Kawasan Budidaya

- Kawasan hutan produksi seluas 67.337,59 Ha;
- Kawasan hutan produksi terbatas seluas 6.253,42 Ha;
- Kawasan Hutan produksi konversi seluas 2.335,74 H;
- Kawasan Tanaman lahan basah seluas 9.110,37 Ha;
- Kawasan Tanaman Lahan Kering seluas 10.320,01 Ha;
- Kawasan Peternakan seluas 13.553,17Ha;
- Kawasan Perikanan Budidaya Perairan Umum Danau seluas 20,26 Ha;
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) seluas 25.877,80 Ha;

-
- Kawasan dan Objek Wisata Budaya seluas 22,66 Ha;
 - Kawasan Wisata Alam seluas 271,44 Ha;
 - Kawasan permukiman perkotaan seluas 2.012,21 Ha;
 - Kawasan permukiman perdesaan seluas 4.822,77 Ha;
 - Kawasan Trasmigrasi seluas 1.950,70 Ha;

3. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Nasional yang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) sebagai Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dimana sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL) yang meliputi wilayah Kecamatan Jagong Jeget, Linge dan Kecamatan Bintang. Selain itu juga terdapat Wilayah Sungai Jambo Aye dan Wilayah Sungai Woyla-Seunagan yang merupakan kawasan strategis nasional yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dalam RTRW Provinsi Aceh. Kawasan Strategis Provinsi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan tersebut adalah Kawasan Daerah Aliran Sungai Peusangan (DAS Peusangan) yang meliputi beberapa kecamatan yang dilalui aliran Sungai Peusangan, yaitu: Kecamatan Lut Tawar, Bebesen, Bies, Silih Nara dan Ketol.

Kawasan Strategis dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari kawasan strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan.

A. KSK Kawasan Perkotaan PKW Takengon

Kawasan perkotaan Takengon merupakan pusat ibukota Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengembangannya, fungsi kegiatan yang ada di PKW Takengon yang meliputi beberapa wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan Lut Tawar, Bebesen dan Kebayakan.

Fungsi yang ditetapkan pada wilayah di PKW Takengon ini adalah:

1. Pusat pemerintahan Kabupaten;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Permukiman;
4. Pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan);
5. Terminal regional;
6. Industri Kecil dan Menengah;
7. Rekreasi.

B. KSK Kawasan Perkotaan PKLp Isaq

Kawasan Strategis Perkotaan Isaq merupakan pusat pelayanan yang dipromosikan menjadi PKL (PKLp) dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kawasan ini mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan untuk wilayah bagian Timur. Kegiatan utama dari Kawasan Perkotaan Isaq ini adalah pelayanan pemerintahan, perkantoran swasta, pasar, perumahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten.

C. KSK Kawasan Perkotaan PKLp Angkup

Kawasan Strategis Perkotaan Angkup merupakan pusat pelayanan yang dipromosikan menjadi PKL (PKLp) dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kawasan ini mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan untuk wilayah bagian Barat. Kegiatan utama dari Kawasan Perkotaan Isaq ini adalah pelayanan pemerintahan, perkantoran swasta, pasar, perumahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten. Pola pengembangan Perkotaan Angkup ini diarahkan dengan kegiatan utama terdiri dari pelayanan pemerintahan, perkantoran swasta, pasar komoditi, perumahan, perdagangan dan jasa skala kabupaten, fasilitas umum dan sosial.

D. KSK Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Jagong Jeget - Atu Lintang

Kawasan Strategis Pengembangan Agropolitan dikembangkan pada wilayah Kecamatan Jagong Jeget - Atu Lintang yang merupakan basis perekonomian pada bidang pertanian dan perkebunan. Wilayah tersebut diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

E. KSK Pengembangan Peternakan Ketapang di Kecamatan Linge

Kawasan Strategis Pengembangan Peternakan Ketapang dikembangkan pada wilayah Kecamatan Linge yang merupakan kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan kegiatan peternakan yang didukung dengan ketersediaan lahan dan sumber daya manusia yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

F. KSK Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Ketol

Kawasan Strategis Pengembangan Agropolitan dikembangkan pada wilayah Kecamatan Ketol yang merupakan kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan kegiatan perkebunan khususnya komoditi tebu, kopi, kakao, durian dan lain – lain yang didukung dengan ketersediaan lahan dan sumber daya manusia yang memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Rencana pengembangan kegiatan Agropolitan berupa pembangunan sarana dan prasarana industri pengolahan hasil perkebunan yang menyebar dalam wilayah Kecamatan Ketol.

G. KSK Pengembangan Pariwisata Danau Laut Tawar

Kawasan Strategis Kabupaten pengembangan kegiatan sektor Pariwisata Danau Laut Tawar yang merupakan ikon pariwisata Kabupaten Aceh Tengah beserta objek-objek pariwisata lainnya. Pengembangan kegiatan pariwisata di sekitar danau seperti kegiatan wisata air dan kegiatan wisata lainnya dengan objek unggulan berupa panorama alam danau dan gunung/perbukitan disekitar kawasan. Selain berperan sebagai kawasan pariwisata, kawasan danau dan sekitarnya berperan besar (fungsi dominan) dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan fungsi sebagai kawasan lindung.

H. KSK Pengembangan Pariwisata Budaya

Kawasan Strategis Kabupaten pengembangan kegiatan sektor pariwisata budaya dikembangkan di beberapa kecamatan. Wisata budaya ini memiliki obyek unggulan berupa wisata sejarah yang menjelaskan tentang Suku Gayo, suku mayoritas yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah. Obyek wisata tersebut meliputi:

1. KSK Situs Kerajaan Linge di Kecamatan Linge;
2. KSK Situs Arkeologi Mendale di Kecamatan Kebayakan; dan
3. KSK Situs Sejarah Kampung Serule di Kecamatan Bintang.

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dilayani oleh PDAM Tirta Tawar melalui jaringan air bersih Lelabu, Atu Gajah, Bebuli, Ulung Gajah, Bur Jenjani, Asir-Asir, Paya Reje, Paya Serngi an Wih Kuli, Kenawat dan SPAM Oregon Mendale. Untuk sebagian masyarakat diluar Kota Takengon penyediaan air minum melalui penyediaan air bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan) sebanyak 8 IKK yaitu IKK Silih Nara, IKK Pegasing, IKK Bintang, IKK Unit Toweren, IKK Ketol, IKK Jagong, IKK Unit Kute Panang dan IKK Linge.

Penyediaan air bersih dilayani melalui sistem penyediaan air bersih yaitu sistem jaringan Lelabu, Atu Gajah, Bebuli, Ulung Gajah, Burjenjani, Asir-asir, Paya Reje, Paya Serngi dan Wih Kuli Namun pelayanan tersebut belum mampu melayani kebutuhan masyarakat kota Takengon karena sistem jaringan tersebut belum sempurna sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan air bersih di kawasan perkotaan, termasuk belm maksimalnya kualitas air minum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang akan dilakukan adalah dengan memperbaharui sisem instalasi dan sistem pengolahan air baku menjadi air bersih sehingga kualitas air lebih higienis sekaligus dapat melayani kebutuhan air minum di kota Takengon, termasuk untuk kota-kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk sebagian

masyarakat diluar kota Takengon penyediaan air minum melalui Penyediaan air bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan); Terdapat 8 (delapan) IKK yaitu IKK silih Nara, IKK Pegasing, IKK Bintang, IKK Unit Toweren, IKK Ketol, IKK Jagong, IKK Unit Kute Panang dan IKK Linge. Dari IKK yang ada hanya mampu melayani kebutuhan air minum masyarakat sebanyak 2.050 pelanggan. Jumlah pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Produksi air minum untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah dikelola oleh PDAM Tirta Tawar. cakupan Pelayanan PDAM Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.134
Rekapitulasi Produksi Air dan Cakupan Pelayanan
PDAM Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	Tahun							
		2008	2009	2010		2011		2012	
				Kota Tkn	IKK	Kota Tkn	IKK	Kota Tkn	IKK
1.	Produksi air (M ³)	2.448.658	419.904	1.799.994	339.904	1.338.163	512.266	1.293.977	644.241
2.	Air terjual (M ³)	1.791.620	368.849	1.412.957	267.858	928.033	228.921	867.983	196.054
3.	Kehilangan air (%)	26,16	12,16	21,50	21,20	30,65	55,31	32,92	69,57
4.	Kapasitas terpasang (Lt/Dt)	126	26,0	127,5	26,0	74,0	24,5	111,5	36,0
5.	Kapasitas produksi (Lt/Dt)	18	13,5	77,0	13,5	64,0	24,5	64,5	22,5
6.	Jumlah penduduk daerah pelayanan (jiwa)	34.023	35.825	62.859	34.717	66.837	28.156	70.725	21.055
7.	Jumlah sambungan (pelanggan)	9.681	10.383	10.783		10.287		10.441	
8.	Jumlah penduduk yang dilayani (jiwa)	11.650	14.454	51.984	14.820	38.700	15.618	30.438	15.234
9.	Jumlah penduduk kabupaten (jiwa)	113.738	118.389	72.231	117.067	76.094	124.877	81.935	132.232
10.	Cakupan daerah pelayanan (%)	34,24	40,35	82,70	42,69	57,90	55,47	43,04	72,35
11.	Cakupan pelayanan se kabupaten (%)	10,24	12,21	71,97	12,66	50,86	12,51	37,15	11,52

Sumber: PDAM Tirta Tawar Takengon, 2013

Data di atas menunjukkan pada tahun 2012 produksi air meningkat menjadi 1.293.977m³, air yang terjual 867.983m³, jumlah sambungan meningkat menjadi 10.441 pelanggan, kapasitas produksi meningkat menjadi 24,5 lt/dt, jumlah penduduk yang dilayani menjadi 15.618 jiwa dan cakupan daerah pelayanan meningkat menjadi 37,157%, sementara cakupan pelayanan pada IKK hanya 11,52%. Permasalahan dari air minum ini adalah tahun 2012 PDAM Tirta Tawar kehilangan air sebanyak 32,92% menurun dari tahun sebelumnya yang hanya 21,20%, kapasitas terpasang menurun menjadi 24,5 dan cakupan pelayanan se kabupaten menurun menjadi 12,51%. Upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan hal di atas antara lain dengan: 1) meningkatkan pelayanan air minum dengan optimal untuk mencegah terjadinya kehilangan air; 2) meningkatkan kapasitas terpasang; 3) meningkatkan cakupan pelayanan se kabupaten. Permasalahan dari IKK yang ada di Kabupaten Aceh Tengah antara lain: 1) Sumber air tidak

cukup melayani pelanggan; 2) Jaringan pipa distribusi bagi banyak yang sudah rusak; 3) sumber air sewaktu-waktu menghilang; 3) debit air masih kurang; 4) adanya jaringan pipa yang dibiayai PNPM; 5) tidak tersedianya jaringan pipa secara merata.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Angka kriminalitas

Tabel 2.135
Angka Kriminalitas

No	Jenis Kriminal	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah kasus narkoba	41	56	48	56	
2	Jumlah kasus pembunuhan	4	28	3	28	
3	Jumlah kejahatan seksual	1	10	1	10	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	15	14	19	14	2
5	Jumlah kasus pencurian	29	14	35	14	31
6	Jumlah kasus penipuan					37

Sumber : ATDA, 2011

2. Lama proses perizinan

Proses perizinan di Kabupaten Aceh Tengah khususnya yang mendukung iklim usaha dewasa ini semakin mudah karena dilayani oleh pusat pelayanan terpadu satu pintu, dimana semua perizinan cukup diurus di tempat ini dengan waktu yang relatif cepat. Berikut merupakan gambaran lamanya proses perizinan dan biaya resmi di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 2.136
Lama Proses Perizinan
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp.)
1.	SIUP	3	8	Rp. 0
2.	TDP	3	8	Rp. 0
3.	SITU	3	10	Rp. 0
4.	TDI	5	10	Rp. 0
5.	IUI	5	13	Rp. 0
6.	IMB	15	9	150.000/koefesien
7.	HO	5	9	1000/m ²

Sumber: KPPTSP Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari uraian tabel dapat dilihat rata-rata pengurusan perizinan hanya memakan waktu 5 hari tanpa biaya kecuali pada pengurusan izin mendirikan bangunan.

3. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

Perda yang mendukung iklim usaha meliputi perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa serta ketenagakerjaan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.137
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	6	4	1	2	-
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	1	-
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	1	-	-	3	-

Sumber: Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, 2013

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio lulusan S1/S2/S3

Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal di berbagai jenjang kelulusan kecendrungan yang semakin tinggi hal ini dapat dilihat dari komposisi kelulusan tingkat pendidikan. Lulusan S1 dan S2 di Kabupaten Aceh Tengah tercatat pada tahun 2011 lulusan S1 sebanyak 6.806 orang dan S2 sebanyak 312 orang, sedangkan lulusan S3 mencapai 11 orang, sama seperti tahun 2010 dapat dilihat pada tabel disamping.

Tabel 2.138
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah lulusan S1	4.413	5.387	5.922	6.372	6.806
2.	Jumlah lulusan S2	210	250	271	292	312
3.	Jumlah lulusan S3	3	4	7	11	11
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.626	5.641	6.200	6.675	7.129
5.	Jumlah penduduk	106.067	146.536	168.835	192.350	206.030
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0.044	0.038	0.037	0.035	0.035

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Tengah, 2012

Permasalahan dari jumlah lulusan S1/S2/S3 di atas antara lain: 1) Kualitas lulusan kurang memuaskan; 2) kurangnya jiwa kewirausahaan generasi muda; 3) kurangnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran semakin bertambah.

Upaya yang harus dilakukan dari persoalan di atas antara lain: 1) meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi; 2) mensosialisasikan kewirausahaan yang mandiri bagi lulusan perguruan tinggi; dan 3) menambah lapangan pekerjaan.

2. Rasio ketergantungan

Tabel 2.139
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2009 s/d 2012

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	30,670	33,200	33,190	59.696
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	3,900	3,330	3,330	9.848

1	2	3	4	5	6
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	34,570	36,530	36,520	69.544
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	65,440	63,470	63,480	146.615
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	52,83	57,55	57,53	47,3

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Tengah, 2012

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara . Dari tabel tersebut diatas, angka rasio ketergantungan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 rasio ketergantungan menunjukn angka 47,30% , lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 57,53%.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa penyebab rasio ketergantungan tinggi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk usia tidak produktif sehubungan dengan meningkatnya angka harapan hidup di kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBK, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBK dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2011 yang lalu, pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara, dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut terbitlah Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

Selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2011, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam APBK Aceh Tengah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari perkembangan APBK Aceh Tengah maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode tahun tersebut.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2012 sampai dengan 2017 masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, khususnya dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2012-2017. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Aceh Tengah dari dana pusat semakin berkurang yang bisa menjadikan Kabupaten Aceh Tengah lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Derajat otonomi fiskal daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2007 s/d 2012

Tahun	PAD (Rp)	APBK	DOFD (%)
2007	15,871,245,889	399,549,064,862	3.97
2008	16,580,990,641	442,150,005,198	3.75
2009	21,969,535,764	432,349,550,842	5.08
2010	18,535,162,504	470,553,001,229	3.94
2011	20,834,397,526	612,461,253,667	3.40
Rata-rata	18,758,266,464.80	471,412,575,160	4.03

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2012 (diolah)

Diharapkan pada periode tahun 2012-2017, DOFD Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan berimplikasi menurunnya terjadinya ketergantungan yang tinggi Kabupaten Aceh Tengah terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun dana bagi hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Laju penambahan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBK. Pada tahun 2011-2016 diharapkan peran PAD dalam membiayai sisi pengeluaran pada APBK semakin besar, sedangkan peran dana perimbangan dalam pengeluaran APBK semakin mengecil.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, perkembangan APBK Aceh Tengah mengalami perubahan yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBK seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007 s/d Tahun 2011 Kabupaten Aceh Tengah

NO	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	399.549.068.862	442.150.005.198	432.349.550.842	470.553.001.229	612.461.523.677	11,86
1.1	Pendapatan Asli Daerah	15.871.245.889	16.580.990.641	21.969.535.764	18.535.162.504	20.834.397.526	8,44
1.1.1.	Pajak Daerah	940.546.161	1.208.415.323	1.582.600.904	2.098.647.070	4.000.506.268	45,67
1.1.2.	Retribusi Daerah	5.584.164.131.	6.036.543.296	6.600.6639.373	8.628.659.515	8.909.909.452	12,86
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisah kan	991.432.882	978.083.091	1.075.678.309	2.320.500.761	1.758.157.071	25,03
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	8.355.102.535	8.357.948.958	12.710.617.178	5.487.355.158	6.165.824.735	1,91
1.2	Dana Perimbangan	348.274.907.702	390.814.694.204	390.528.040.440	389.198.637.437	457.883.952.383	7,36

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	31.554.907.302	38.321.414.868	31.905.931.440	40.685.736.437	31.764.158.383	2,57
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	274.186.000.400	300.339.533.000	317.747.109.000	316.232.601.000	388.635.894.000	9,44
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	42.534.000.000	52.153.746.336	40.875.000.000	32.280.300.000	37.483.900.000	-0,98
1.3	Lain-Lain pendapatann Daerah yang sah	35.402.915.271	34.754.320.353	19.851.974.638	62.819.201.288	133.743.173.768	71,16
1.3.1.	Hibah	-	3.500.000.000	1.000.000.000	-	-	-42,86
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	4.161.102.566	6.618.770.082	9.717.148.863	6.423.818.490	7.628.079.835	22,68
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus ****)		6.607.071.995	7.275.450.000	45.227.453.600	106.331.597.320	176,58
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lain nya		4.242.806.000	-	10.000.000.000	13.580.260.728	-37,05
1.3.6.	Pendapatan yang sah lain nya		13.785.672.276	1.859.375.775	1.167.929.198	6.203.235.885	76,86

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2011 mengalami perkembangan yang baik, seiring dengan perkembangan APBK Aceh Tengah pada periode tersebut, terutama terkait dengan belanja Kabupaten Aceh Tengah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007 s/d Tahun 2011 Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3
1	ASET	
1.1	ASET LANCAR	
1.1.1	Kas	44,60
1.1.2	Piutang	-
1.1.3	Persediaan	(27,27)
1.2	ASET TETAP	7,78
1.2.1	Tanah	2,00
1.2.2	Peralatan dan mesin	4,20
1.2.3	Gedung dan bangunan	8,98
1.2.4	Jalan, irigasi dan jaringan	9,36

1	2	3
1.2.5	jalan, irigasi dan jaringan	15,89
1.2.6	Konstruksi dan pengerjaan	-
1.3	ASET LAINNYA	-
1.3.1	Tagihan penjualan angsuran	-
1.3.2	Tagihan tuntutan gaji kerugian daerah	-
1.3.3	Kemitraan dengan pihak kedua	-
1.3.4	Aset tak berwujud	-
1.3.5	dst...	-
	JUMLAH ASET DAERAH	
2	KEWAJIBAN	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ke tiga	(55,40)
2.1.2	Uang muka dari kas daerah	
2.1.3	Pendapatan diterima di muka	
2.1.4	dst.....	
3	EKUITAS DANA	
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1	SILPA	19,80
3.1.2	Cadangan piutang	-
3.1.3	Cadangan persediaan	27,27
2.1.4	dst.....	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1	Diinvestasikan dalam aset tetap	7,78
3.2.2	Diinvestasikan dalam aset lainnya	
3.2.3	dst.....	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Tabel berikut merupakan analisis rasio keuangan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2009-2011.

Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2009(%)	2010(%)	2011 (%)
1	Rasio Lancar (Current ratio)	63,00	73,02	13,62
2	Rasio quick (quick ratio)	43,00	43,19	8,24
3	Rasio total hutang terhadap total aset	159,00	137,00	1,00
4	Rasio hutang terhadap modal	1,00	1,00	
5	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6	Rata-rata umur persediaan	-	-	-
Dst	Rasio..... (lainnya)			

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Dalam menganalisis neraca Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 digunakan beberapa analisis rasio, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Aceh Tengah adalah rasio lancar dengan rumusan seperti dibawah ini:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah ini, sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Rasio Lancar Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011
Aset Lancar	13.269.736.458	8.517.283.191	7.829.803.722
Kewajiban Lancar	21.054.975.698	11.664.924.938	86.112.120
Rasio Lancar	0,6302	0,7302	90,9257

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2012 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang. Rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam *Rasio Leverage* adalah:

a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas):

Merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 3.6
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011
Kewajiban	21.407.791.594	11.970.698.716	344.843.778
Ekuitas	1.604.234.520.763	1.724.834.302.522	1.891.716.876.439
Total Debt to equity Ratio	0,0133	0,0069	0,0002

Sumber: DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2012 (diolah)

b. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to total asset ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Total Aktiva}}$$

Tabel 3.7
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2011

Uraian	2009	2010	2011
Kewajiban	21.407.791.594	11.970.698.716	344.843.778
Aktiva	1.625.642.312.357	1.736.805.001.238	1.892.061.720.217
<i>Total Debt to Total Asset Ratio</i>	0,0132	0,0069	0,0002

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2012 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva (aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya entitas. Dikarenakan adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, maka dalam laporan keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang dapat dilihat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumber daya entitas dalam menggali PAD. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam mengukur rasio aktivitas laporan keuangan Kabupaten Aceh Tengah, yaitu :

1. Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*). Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva Tetap}}$$

Tabel 3.8

Rasio Perputaran Aktiva Tetap
Kabupaten Aceh Tengah, 2009-2011

Aktiva	2009	2010	2011
PAD	21.969.535.764	18.535.162.504	20.780.854.963
Aktiva Tetap	1.589.595.746.818	1.705.010.888.966	1.838.433.372.249
Rasio Perputaran aktiva tetap	0.0138	0,0109	0,0113

Sumber: DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2012 (diolah)

2. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*). Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Total Aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}}$$

Tabel 3.9

Rasio Perputaran Total Aktiva
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2011

Aktiva	2009	2010	2011
PAD	21.969.535.764	18.535.162.504	20.780.854.963
Aktiva	1.625.642.312.357	1.736.805.001.238	1.892.061.720.217
Rasio Perputaran Total Aktiva	0.0135	0,0107	0,0110

Sumber: DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2012 (diolah)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2005-2009, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun 2009, setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti SKPK tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada SKPK, yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPK.

Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2007-2010, Laporan keuangan yang disusun oleh DPKKD sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPK dan dikoordinir oleh DPKKD yang mengembanfungsi sebagai SKPK.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPKD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKD. Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

3.2.1 Proporsi penggunaan Anggaran

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif tidak stabil dari waktu ke waktu, tahun 2009 persentasenya sebesar 60,31%; tahun 2010 persentasenya sebesar 62,75%; dan tahun 2011 persentasenya sebesar 59,31% seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Aceh Tengah

NO	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2009	271.973.385.935.00	450.970.040.068.00	60,31
2	Tahun Anggaran 2010	298.271.536.668.00	475.457.471.875.00	62,75

NO	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
3	tahun Anggaran 2011	363.677.538.936.00	613.204.504.748.00	59,31

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur lebih besar proporsinya terhadap APBK dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan. Diharapkan pada tahun yang akan datang dapat dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBK.

3.2.2 Analisis pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan Daerah 2009-2011

Kebijakan dan realisasi pembiayaan daerah 2009-2011 dianalisis dengan memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Aceh Tengah

No.	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2010 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Realisasi pendapatan daerah	432.349.550.842.00	470.553.001.229.00	612.461.523.677.00
	Dikurangi realisasi :			

No.	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2010 (Rp)
1	2	3	4	5
2	Belanja daerah	440.938.997.948.00	474.810.429.755.00	609.372.962.00
3	Pengeluaran Pembiayaan daerah	10.031.042.120.00	547.042.120.00	3.831.542.120.00
	Defisit riil	(18.620.489.226.00)	(4.804.470.646.00)	(742.981.071.00)

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	Sisa lebih Perhutangan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,00	100,00	100,00
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2009		2010		2011	
		(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah SILPA	8.683.512.497	100,00	3.750.798.195	100,00	3.007.817.115	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	3.389.092.947	39,3	-	0,00	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	0,00	999.218.477	33,22
4	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	0,00	-	-
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	-	-	-	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	0,00	-	-
7	Kegiatan lanjutan	10.085.732.939	116,15	337.882.350	9,01	10.275.016.279	341,61

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dari analisis di atas, permasalahan yang dihadapi daerah dalam analisis pembiayaan kurun waktu tahun 2007-2011 adalah

1. Masih tingginya SILPA daerah, hal ini menunjukkan program tidak berjalan dengan baik pada tataran operasional. Hal ini dapat mengakibatkan visi dan misi kepala daerah tidak tercapai.
2. Daerah masih mengalami defisit anggaran, meski dari tahun ke tahun semakin menurun.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2012-2017 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2007-2011), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2012-2017. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Aceh Tengah mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah yang besar dan juga didukung oleh Dana Perimbangan yang menjanjikan serta bagi hasil migas yang sangat besar.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Aceh Tengah

No	Uraian	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	280.327.048.564.00	12,55
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	252.998.350.889.00	13,96
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Oprasional KDH/WKDH	6.212.111.352.00	11,75
3	Belanja Bunga	46.246.323.00	-10,28
4	Belanja Bagi Hasil	21.070.340.000.00	-0,30
	Dst....		
B	Belanja Langsung	4.568.611.511.00	2,23
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk guru dan tenaga medis	-	0,00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	811.500.000.00	-13,95
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenis nya)	3.757.111.511.00	7,59
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjang nya)	-	0,00
5	belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjang nya)	-	0,00
	Dst....		
C	Pembiayaan Pengeluaran	3.831.542.120.00	252,93
1	Pembentukan dana cadangan	-	0,00
2	Pembayaran pokok utang	47.042.120.00	0,00
3	Penyertaan modal pemerintah daerah	3.784.500.000.00	280,95
	Dst....		
	TOTAL (A+B+C)	288.727.202.195.00	10,77

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah, 2013

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.3.2 Proyeksi data masa lalu

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara

optimal, dalam hal ini PDRB. Perkembangan daya pajak (*tax effort*) Kabupaten Aceh Tengah periode tahun 2007-2011, dapat dilihat pada tabel berikut.

3.3.3 Penghitungan kerangka pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan memperhatikan kerangka penerimaan dan kerangka belanja, sebagai dasar penghitungan kapasitas riil pengelolaan keuangan daerah.

a. Kerangka Penerimaan

Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012-2017. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kerangka Belanja

Untuk menentukan kerangka belanja tidak langsung ini, perlu mngetahui proyeksi jumlah pegawai negeri sipil (PNS/CPNS) dan jumlah pegawai tidak tetap (PTT) selama 5 tahun perencanaan. Perkiraan jumlah PNS/CPNS dan PTT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 15
Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Aceh Tengah, 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PNS	6.072	6.159	6.305	6.460	6.543	6.608
PTT	1.289	1.243	932	621	310	-
JUMLAH	7.361	7.402	7.237	7.081	6.853	6.608

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah 2012 (diolah)

Dari data-data diatas, dapat dilakukan perhitungan, bahwa perkiraan belanja gaji dan tunjangan untuk PNS/CPNS Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Aceh Tengah, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Prediksi Gaji dan Tunjangan PNS	325.360.811.022	357.896.892.124	393.686.581.337	433.055.239.470	476.360.763.417

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah 2012 (diolah)

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah, adalah dimana dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan yang penghitunganya adalah total penerimaan dikurangi belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengingkat. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.17
Estimasi Penerimaan Kabupaten ACEH TENGAH, 2012-2017

Uraian	2012 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN	681.583.157.180		728.033.147.247	955.817.960.786	1.029.382.548.365	1.109.150.261.877	1.196.499.780.363
Pendapatan Asli Daerah	66.378.694.707		73.668.285.472	81.213.150.177	87.473.986.935	93.683.038.068	100.565.072.943
Pajak daerah	5.327.794.000	10-30%	5.327.794.000	6.926.132.200	8.311.358.640	9.142.494.504	10.056.743.954
Retribusi daerah	13.523.579.200	12,86%	15.111.444.000	17.054.775.698	19.248.019.853	21.723.315.206	24.516.933.542
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.600.000.000	25,03%	2.600.000.000	3.250.780.000	4.064.450.234	5.081.782.128	6.353.752.194
Zakat	5.000.000.000	10,00%	6.000.000.000	8.500.000.000	9.500.000.000	10.500.000.000	11.500.000.000
Lain-lain PAD yang sah	39.927.321.507	1,91%	44.629.047.472	45.481.462.279	46.350.158.208	47.235.446.230	48.137.643.253
Dana Perimbangan	527.956.676.053		585.918.747.138	634.795.231.939	688.274.931.434	746.790.598.028	810.815.804.770
Dana bagi hasil pajak	25.628.444.514	2,57%	20.539.698.095	21.067.568.336	21.609.004.842	22.164.356.267	22.733.980.223
Dana bagi hasil bukan pajak/SDA	6.357.977.539	2,57%	9.712.704.043	9.962.320.537	10.218.352.175	10.480.963.826	10.750.324.596
Dana alokasi umum	449.223.044.000	9,44%	513.863.035.000	562.371.705.504	615.459.594.504	673.558.980.225	737.142.947.958
Dana alokasi khusus	46.747.210.000	-0,98%	41.803.310.000	41.393.637.562	40.987.979.914	40.586.297.711	40.188.551.993
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	87.247.786.420		68.446.114.637	239.809.578.670	253.633.629.995	268.676.625.781	285.118.902.650
Hibah	-	0,00%	-	-	-	-	-
Dana darurat	-	0,00%	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	10.498.666.989	22,68%	10.498.666.989	12.879.764.662	15.800.895.287	19.384.538.339	23.780.951.634
Dana penyesuaian	64.636.899.000	5,00%	47.633.947.648	50.015.645.181	52.516.427.440	55.142.248.812	57.899.361.253

1	2	3	4	5	6	7	8
Dana Otonomi Khusus	-	5,00%	-	151.548.782.608	159.126.221.738	167.082.532.825	175.436.659.467
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	11.630.751.200	0,00%	10.313.500.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Tambahan Dana Bagi Hasil Migas*)	-	5,00%	-	14.989.186.218	15.738.645.529	16.525.577.805	17.351.856.696
Pendapatan yang sah lainnya	481.469.231	20,00%	-	376.200.000	451.440.000	541.728.000	650.073.600
JUMLAH PENDAPATAN	681.583.157.180		728.033.147.247	955.817.960.786	1.029.382.548.365	1.109.150.261.877	1.196.499.780.363

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Tengah, 2013

Keterangan :

*) Tambahan dana bagi hasil migas tidak dianggarkan dalam APBK Kabupaten Aceh Tengah (Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Aceh nomor 2 Tahun 2008)

Tabel 3.18
Perkiraan Kapasitas Riil
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun (Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Total Penerimaan (Dana Tersedia)	728.033.147.247	955.817.960.786	1.029.382.548.365	1.109.150.261.877	1.196.499.780.363
Sisa lebih riil perhitungan anggaran	25.000.000.000	10.000.000.000	9.500.000.000	9.025.000.000	8.573.750.000
Total Penerimaan	753.033.147.247	965.817.960.786	1.038.882.548.365	1.118.175.261.877	1.205.073.530.363
Jumlah Belanja Gaji & Tunjangan PNS Belanja Wajib dan Mengikat	325.360.811.022	357.896.892.124	393.686.581.337	433.055.239.470	476.360.763.417
Kapasitas Riil	427.672.336.225	607.921.068.662	645.195.967.028	685.120.022.407	728.712.766.946

Sumber : DPKKD Kab. Aceh Tengah 2012 (diolah)

Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program pembangunan daerah yang terkait langsung dengan Visi dan Misi Bupati.
2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program penyelenggaraan urusan lainnya.
3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.

Tabel 3.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Aceh Tengah
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proyeksi				
		2013	2014	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	427.672.336.225	607.921.068.662	645.195.967.028	685.120.022.407	728.712.766.946
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	287.716.598.984	458.632.334.246	488.471.213.035	520.240.104.792	555.417.655.473
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					

1	2	3	4	5	6	7
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	50.415.389.828	51.749.875.000	53.123.000.000	54.529.375.000	55.980.195.000
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	2.547.042.120	4.047.042.120	5.047.042.120	6.047.042.120	7.547.042.120
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	234.754.167.036	402.835.417.126	430.301.170.914	459.663.687.671	491.890.418.353
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	192.918.169.189	205.085.651.535	214.894.796.115	225.456.334.736	236.822.348.592
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	142.021.421.833	153.065.627.715	161.568.717.843	170.749.684.703	180.693.441.247
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	37.620.003.312	39.658.415.875	41.659.467.061	43.736.286.760	45.926.818.085
III	Total rencana pengeluaran prioritas II	104.401.418.521	113.407.211.840	119.909.250.782	127.013.397.943	134.766.623.162
IV	Total rencana pengeluaran prioritas III	88.516.750.668	91.678.439.695	94.985.545.333	98.442.936.793	102.055.725.430
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III-IV)*	-	-	-	-	-

Sumber :DPPKD, BAPPEDA 2012 Kab. Aceh Tengah

Tabel 3.20
Pendanaan Prioritas
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Prioritas I	234.754.167.036	402.835.417.126	430.301.170.914	459.663.687.671	491.890.418.353
Prioritas II	104.401.418.521	113.407.211.840	119.909.250.782	127.013.397.943	134.766.623.163
Prioritas III	88.516.750.668	91.678.439.695	94.985.545.333	98.442.936.793	102.055.725.430
JUMLAH	427.672.336.225	607.921.068.661	645.195.967.029	685.120.022.407	728.712.766.946

Sumber :DPPKD, BAPPEDA 2012 Kab. Aceh Tengah (diolah)

Setelah prioritas I dan II ditetapkan, maka untuk penetapan prioritas III untuk belanja tidak langsung yang kemampuan pendanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah diajabarkan lagi tiap tahunnya selama 5 (lima) tahun perencanaan RPJMD. Sehingga

pengalokasian pada prioritas III untuk belanja tidak langsung tersebut lebih jelas, transparan, akuntabel dan pengelokasiannya sesuai dengan perencanaan. Untuk lebih rinci pengalokasian belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Belanja Tidak Langsung Untuk Prioritas III
Kabupaten Aceh Tengah 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Hibah	4.210.900.000	4.000.355.000	3.800.337.250	3.610.320.388	3.429.804.368
Tambahan Penghasilan	84.305.850.668	87.678.084.695	91.185.208.083	94.832.616.406	98.625.921.062
JUMLAH	88.516.750.668	91.678.439.695	94.985.545.333	98.442.936.793	102.055.725.430

Sumber :DPPKD, BAPPEDA 2012 Kab. Aceh Tengah (diolah)

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Aceh Tengah untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017.

4.1 Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Aceh Tengah

4.1.1. Belum optimalnya pelaksanaan dan implementasi Syariat Islam dan Pengembangan Budaya

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam merupakan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertuang dalam bentuk undang-undang yang hanya berlaku di Aceh. Adanya qanun ini seharusnya mampu merubah paradigma tatanan sosial masyarakat di Aceh pada umumnya dan di Aceh Tengah pada khususnya untuk dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, munakahat maupun jinayah, dimana seseorang dapat melaksanakannya sesuai apa yang terkandung di dalam Alquran, Sunnah Rasulullah serta pendapat para ulama. Namun sejauh ini suasana dan pemahaman keagamaan dimasyarakat masih rendah yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran syariat Islam seperti tingginya angka perceraian, tingginya penyalahgunaan media internet, kekayaan agama yang tidak terdata dan belum dimanfaatkan.

4.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan tatakelola pemerintahan

Belum sesuainya penempatan SDM sesuai dengan bidang keahlian, belum optimalnya dalam pelayanan kepada masyarakat, belum optimal dalam penggunaan anggaran, distribusi pegawai yang belum merata, SDM Aparatur yang masih rendah, pemberian *reward* dan *punishment*, penegakan Qanun kabupaten yang belum optimal. Peningkatan hirarki koordinasi tingkat pemerintahan.

4.1.3. Belum optimalnya upaya pemahaman wawasan kebangsaan

Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat masih lemah, khususnya terhadap empat pilar kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap empat pilar wawasan kebangsaan tersebut. Demikian juga halnya dengan masih kurangnya sosialisasi Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

4.1.4. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan harga konstan, pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah pada tahun 2011 sebesar 4,93 persen, masih tergolong rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian (41,33%), jasa (21,94%) dan perdagangan, hotel dan restoran (12,81 %). Namun, dari sisi laju pertumbuhan kontribusi sektor pertanian (1,23) terhadap PDRB lebih rendah dan cenderung mengalami penurunan setiap tahun dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh nilai tambah produk pertanian dan perkebunan masih rendah dan nilai tukar petani relatif masih rendah.

4.1.5. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata

Pengelolaan wisata di Aceh Tengah belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada baik panorama alam, seni budaya, olah raga wisata, agro wisata, kuliner dan lain-lain dikarenakan minimnya infrastruktur serta promosi wisata di dalam negeri dan luar negeri. Selain itu juga belum terciptanya sinergisitas antara pihak-pihak terkait. Permasalahan lainnya adalah minimnya pelaksanaan event seni, budaya dan olahraga yang belum dikemas secara profesional dengan memanfaatkan potensi yang ada. Masalah lain, pembinaan SDM belum dilakukan berkaitan dengan usaha pariwisata.

4.1.6. Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana

Belum meratanya pembangunan jalan dan infrastruktur dasar lainnya dalam rangka membuka keterisolan daerah, sentra-sentra produksi dan kawasan pinggiran. Hal ini dicirikan dengan masih adanya daerah-daerah yang terisolir, terbatasnya ketersediaan listrik, teknologi informasi, jaringan irigasi dan drainase. Demikian juga sarana dan prasarana air bersih yang masih terbatas dan belum meratanya ketersediaan pasar kecamatan.

4.1.7. Rendahnya kualitas pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyebaran guru yang tidak merata di semua

kecamatan dan fasilitas pendidikan yang juga belum merata sehingga terbatasnya akses pendidikan bagi anak usia sekolah. Luas wilayah serta penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan sulitnya pemerataan akses pendidikan.

4.1.8. Pelayanan kesehatan belum optimal

Pelayanan kesehatan yang belum optimal dicirikan oleh masih kurangnya Dokter Spesialis, jumlah fasilitas kesehatan yang belum mencukupi, masih kurangnya alat kesehatan, kualitas SDM medis dan para medis yang masih kurang, distribusi tenaga medis dan para medis yang belum merata serta belum tersedianya pelayanan kesehatan unggulan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit rujukan regional untuk wilayah tengah Aceh.

4.1.9. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi

Tingkat kemiskinan di Aceh Tengah masih tergolong tinggi sebesar 19,58 persen pada tahun 2011 yang masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional sebesar 17,68 persen. Dari 14 kecamatan yang ada di Aceh Tengah, angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kecamatan Silih Nara dan yang terendah di Kecamatan Bies (informasi status kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Aceh Tengah; *Sumber : Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial*).

4.1.10. Belum mantapnya ketahanan pangan

Permasalahan utama di bidang ketahanan pangan antara lain adalah: 1) belum lancarnya distribusi pangan; 2) hargapangan yang tidak stabil; 3) dukungan regulasi tentang ketahanan pangan belum tersedia; 4) kurangnya data dan informasi yang akurat; 5) rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung; dan 6) rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan. Kabupaten Aceh Tengah terdapat 6 kecamatan yang memiliki desa rawan pangan yaitu: Kecamatan Lut Tawar (Kampung Kenawat), Bintang (Kampung Serule), Linge (Kampung Jamat, Pertik, Nasoh, Delung Sekinel, Mungkur, Gewat), Pegasing (Kampung Berawang Baru), Ketol (Kampung Kekuyang, Bergang, Karang Ampar, Bintang Pepara) dan Rusip Antara (Kampung Merandeh Paya, Tanjung, Kuala Rawa, Blang Tampu, Kemlut dan Blang Polem).

4.1.11. Produktivitas dan nilai tambah pertanian dan perkebunan masih rendah

Produktivitas komoditas unggulan kopi, tebu, kakao, ternak besar kerbau dan sapi, ternak kecil kambing dan unggas masih rendah. Demikian juga dengan nilai tambah komoditas unggulan tersebut masih rendah. Beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas produk unggulan

tersebut antara lain : 1) rendahnya sumberdaya petani/peternak; 2) sarana dan prasarana pendukung masih terbatas; 3) belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit; 4) sistem pengelolaan usaha tani yang masih tradisional; 5) menurunnya kemampuan lahan; 6) terbatasnya ketersediaan bibit unggul; 7) tidak stabilnya harga pasar.

Demikian juga dengan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan masih rendah, disebabkan oleh: 1) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen; 2) masih berlangsungnya praktek ijon; 3) terbatasnya modal petani/peternak; 4) kurangnya minat investor; dan 5) belum adanya *pilot project* untuk *processing*.

4.1.12. Rendahnya pengelolaan lingkungan

Rendahnya kualitas lingkungan disebabkan oleh: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan; 2) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesadaran lingkungan; 3) terbatasnya teknologi daur ulang persampahan; 4) meningkatnya alih fungsi lahan dari hutan menjadi areal pertanian; 5) meningkatnya lahan kritis disebabkan perambahan hutan; 6) belum optimalnya upaya konservasi lingkungan; 7) belum optimalnya pengawasan pencemaran lingkungan.

4.2. Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil analisa tersebut menghasilkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan dalam membangun Aceh Tengah 5 (lima) tahun ke depan, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Analisis SWOT

Pada analisis SWOT ini ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di Kabupaten Aceh tengah yang terdiri dari empat aspek yaitu: kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Keempat aspek tersebut diuraikan dalam tabel identifikasi SWOT di bawah ini.

Tabel 4.1
Analisis SWOT

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;	(+) Peluang 1. Tingginya distribusi barang dan jasa strategis sektor perkebunan dan pertanian;

Internal	Eksternal
2. Letak geografis yang berada di tengah Provinsi Aceh/regional tengah; 3. Penerapan Syariat Islam; 4. Objekwisata alam/panorama yang potensial dan indah; 5. Memiliki Keanekaragaman sosial dan budaya; 6. Jaminan kesehatan yang menjamin seluruh masyarakat (<i>universal coverage</i>); 7. Potensi sumber daya alam, terutama perkebunan, pertanian, kehutanan; 8. Memiliki keanekaragaman sumber daya hayati 9. Memiliki Rumah Sakit Umum (RSU) Regional rujukan bagi wilayah tengah; 10. Memiliki sistem resi gudang dan pasar lelang yang terintegrasi.	2. Daerah Aliran Sungai yang potensial untuk pembangkit listrik dalam skala besar; 3. Adanya Alokasi Dana Otonomi Khusus bagi peningkatan sektor infrastruktur; 4. Undang-undang RI no. 40 tahun 2006 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 5. Undang-undang RI no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 6. Adanya alokasi dana pendidikan sebesar 30 persen dari APBK; 7. Adanya dukungan dari Lembaga Donor untuk pendidikan; 8. Adanya beasiswa bagi peningkatan SDM aparatur dan dosen; 9. Adanya dana kesejahteraan guru; 10. Masih tingginya minat investor untuk berinvestasi di bidang agroindustri dan agrowisata 11. Pencapaian MDGs 2015 dan keberlanjutan kerjasama dengan masyarakat internasional. 12. Tingginya perhatian dari berbagai pihak dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh. 13. Pengembangane konomi berbasis syariah.
(-) Kelemahan 1. Infrastruktur dasar belum memadai terutama di daerah perbatasan dan jalan alternatif; 2. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang <i>clean and clear (good</i>	(-) Ancaman 1. Perubahan iklim global (<i>climate change</i>); 2. Beredarnya produk luar (impor) terutama sektor perkebunan dan pertanian; 3. Infiltrasi budaya asing yang negatif; 4. Instabilitas perekonomian global yang

Internal	Eksternal
<i>governance</i>); 3. Kualitas SDM dan mutu pendidikan relatif masih rendah; 4. Secara umum kualitas guru dan distribusi penyebaran guru rendah; 5. Masih lemahnya manajemen dan tata kelola pendidikan; 6. Terbatasnya peluang kerja di daerah; 7. Terbatasnya ruang publik dan ruang terbuka hijau; 8. Terbatasnya fasilitas olah raga; 9. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama di sektor Perkebunan, pertanian dan kehutanan; 10. Rendahnya produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditas perkebunan dan pertanian; 11. Masih rendahnya kesadaran terhadap sistem perlindungan anak; 12. Belum berkembangnya agro wisata dan kepariwisataan; 13. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta belum merata dan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan; 14. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum; 15. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah; 16. Belum optimalnya penguatan keberlangsungan perdamaian;	menyebabkan tingginya inflasi; 5. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular dan kasus HIV-AIDS secara nasional khususnya di provinsi-provinsi terdekat; 6. Dampak globalisasi masuknya pelaku ekonomi dari luar dan memiliki modal besar yang dapat mempengaruhi pedagang lokal dengan membentuk koperasi di tingkat lokal dan regional.

Internal	Eksternal
17. Terbatasnya pelibatan para pihak dalam pencegahan dan pengelolaan konflik. 18. Tidak maksimalnya penerapan syariat Islam	

4.2.2. Isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di atas, maka yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Tengah 5 tahun ke depan (2012 – 2017) adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan dan implementasi Syariat Islam dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

Peningkatan dan pemerataan pemahaman masyarakat terhadap Syari'at Islam, pengurangan pelanggaran syari'at Islam dan penambahan sarana peribadatan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap syari'at Islam dilaksanakan dengan peningkatan kemampuan anak-anak dalam membaca Al-Qur'an, pemakmuran meunasah dengan shalat berjamaah, pengajian rutin, penambahan guru agama, penyuluhan untuk penurunan angka perceraian, penunjukan wali secara resmi untuk anak yatim, optimalisasi pengelolaan zakat dan infaq, serta inventarisasi harta waqaf,

Pengurangan pelanggaran dilaksanakan dengan penambahan personil WH, peningkatan kemampuan WH, penyusunan Qanun keterpaduan WH, Satpol PP dan PPNS. Pengendalian izin pengusaha warnet, pembekalan calon pengantin, penyuluhan tentang pemahaman agama yang benar dan ciri-ciri pemahaman yang keliru dan sesat.

Penambahan sarana peribadatan terutama fasilitas wudhu (MCK) dan bahan bacaan keagamaan untuk kampung.

Begitu juga dengan peningkatan pengamalan Nilai-nilai Pancasila secara benar melalui peningkatan pemahaman 4 (empat) pilar kebangsaan yang dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi terhadap semua elemen masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

2. Optimalisasi Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi

Belum sesuai penempatan SDM sesuai dengan bidang keahlian, belum optimalnya dalam pelayanan kepada masyarakat, belum optimal dalam penggunaan anggaran, distribusi pegawai yang belum merata, SDM Aparatur yang masih rendah, pemberian reward dan

punishment, penegakan Qanun kabupaten yang belum optimal. Peningkatan hirarki koordinasi tingkat pemerintahan.

3. Optimalisasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang empat pilar kebangsaan dapat dilaksanakan dengan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan. Demikian juga dengan pemahaman masyarakat tentang Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu ditingkatkan.

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah pada sektor pertanian dapat ditingkatkan dengan cara:

- a. peningkatan nilai tambah komoditi unggulan pertanian dan perkebunan melalui peningkatan pengolahan pasca panen;
- b. peningkatan nilai tukar petani;
- c. peningkatan akses dan jaringan pasar;
- d. peningkatan kualitas sumberdaya petani/peternak;
- e. peningkatan usaha agrobisnis.

5. Optimalisasi Pengelolaan Pariwisata

Optimalisasi pariwisata dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola pariwisata, upaya promosi pariwisata di dalam dan ke luar negeri, peningkatan kapasitas kemitraan dan koordinasi antara sektor, pengelolaan dan penataan objek-objek wisata baik wisata alam, wisata sejarah, religius maupun agrowisata secara profesional yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Pengembangan destinasi wisata dilakukan melalui penyelenggaraan event-event secara berkala seperti Festival Danau Lut Tawar, Pacuan Kuda dan event lainnya.

6. Integrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan infrastruktur dasar yang terintegrasi akan membukaketerisolasian daerah.Penyediaan sumberdaya dan jaringan listrik, telekomunikasi, jaringan irigasi dan drainase. Demikian juga pembangunan pasar di ibukota kecamatan tertentu dan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.

7. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas pendidik, dan perluasan akses pendidikan serta pemenuhan sarana

dan prasarana belajar mengajar sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembentukan lembaga pendidikan keahlian untuk menciptakan tenaga kerja mandiri.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan jumlah dan jenis spesialisasi Dokter Spesialis, penambahan Alat kesehatan dan peningkatan Kualitas SDM para medis. Percepatan pembangunan RS Rujukan regional. Peningkatan 3 puskesmas rujukan, jagung jeget, silih nara dan ketol. Peningkatan pustu dan polindes/poskesdes terutama untuk daerah-daerah yang marginal. Distribusi para medis yang merata, distribusi dokter untuk tiga puskesmas rujukan, penambahan puskesmas di kecamatan yang akan dimekarkan. Penyediaan dan penempatan bidan desa di setiap desa.

9. Penurunan Angka Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan di Aceh Tengah dilakukan dengan perluasan lapangan kerja, penyediaan rumah sehat sederhana, penyediaan modal usaha dan meningkatkan akses sentra produksi pertanian dengan pasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyuluhan, pelatihan, sekolah lapang dan magang bagi kelompok tani dan para penyuluh.

10. Pemantapan Ketahanan Pangan

Upaya untuk pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan:

- a. peningkatan kelancaran distribusi pangan;
- b. jaminan terhadap harga pangan;
- c. penyediaan regulasi tentang ketahanan pangan;
- d. penyediaan data dan informasi yang akurat;
- e. peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung;
- f. menjaga kualitas dan kuantitas konsumsi pangan; dan
- g. diversifikasi komoditi pangan.

11. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Tengah, dilakukan dengan:

- a) peningkatan sumberdaya petani/peternak;
- b) peningkatansarana dan prasarana pendukung;
- c) optimalisasi pengendalian hama dan penyakit;
- d) modernisasi sistem pengelolaan usaha tani;

-
- e) peningkatan kemampuan lahan;
 - f) penyediaan bibit unggul;
 - g) pengendalian harga pasar melalui resi gudang; dan
 - h) dukungan regulasi untuk pengendalian harga komoditas unggulan.

Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Aceh Tengah, dilakukan dengan cara:

- a) peningkatan teknologi pengolahan pasca panen;
- b) penyediaan resi gudang dan bantuan modal usaha melalui BPRS;
- c) peningkatan promosi investasi;
- d) penyediaan *pilot project* untuk *processing* pertanian dan perkebunan;
- e) pemberdayaan pasar kecamatan; dan
- f) peningkatan akses jaringan pemasaran.

12. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan

Peningkatan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan :

- a) peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- b) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesadaran lingkungan;
- c) penyediaan teknologi daur ulang persampahan;
- d) pengawasan alih fungsi lahan;
- e) rehabilitasi lahan kritis;
- f) optimalisasi konservasi lingkungan;
- g) optimalisasi pengawasan pencemaran lingkungan.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tengah tahun 2012 – 2017 adalah “TERWUJUDNYA KEMAKMURAN DAN TERHALAUNYA KEMISKINAN MENUJU MASYARAKAT ACEH TENGAH SEJAHTERA 2017”. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan ditetapkan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah diuraikan, dapat diciptakan beberapa strategi, yaitu:

- 1) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang,
- 3) Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
- 4) Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Strategi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui SWOT.

6.1.1. Kekuatan – Peluang (S - O)

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah;
2. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana terutama percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dari berbagai sektor;
4. Peningkatan kualitas pendidikan;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan secara optimal dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai hidup sehat;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian;
7. Peningkatan kawasan wisata Danau Lut Tawar sebagai investasi kepariwisataan;
8. Memajukan berbagai sektor strategis untuk pemantapan perekonomian rakyat.

6.1.2. Kekuatan – Ancaman (S - T)

1. Perketat izin masuknya produk impor;
2. Pemantapan rasa kebangsaan untuk meningkatkan nasionalisme terutama untuk generasi muda;
3. Peningkatan mutu kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan pengelolaan BLUD RSUD Datu Beru sebagai rumah sakit rujukan wilayah tengah.

6.1.3. Kelemahan – Peluang (W - O)

1. Peningkatan SDM Pendidikan, baik dari segi pemantapan kurikulum maupun dari segi kelembagaan;
2. Membuka peluang kerja dari berbagai sektor untuk mengurangi tingkat pengangguran;
3. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama sektor perkebunan dan pertanian untuk peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah.

6.1.4. Kelemahan – Ancaman (W - T)

1. Ciptakan peluang usaha bagi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pendidikan;
3. Peningkatan produktivitas dari sektor perkebunan dan pertanian;
4. Pengembangan dan peningkatan mutu produk serta keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif;
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penerapan regulasi yang maksimal;
6. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat.

6.2. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (2012-2017)

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui analisa SWOT dan kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Aceh Tengah

Visi : Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
Misi 1: Melanjutkan peningkatan pelaksanaan syariat Islam dan memantapkan peningkatan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Syariat Islam secara kaffah dan mantapnya penghayatan serta pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945	1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadah	1. Peningkatan sarana dan prasarana ibadah	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah
	2. Menurunnya pelanggaran syariat Islam	1. Peningkatan pelaksanaan syariat Islam	1. Pemberantasan kemungkaran, Peningkatan profesionalisme tenaga Wilayatul Hisbah(WH), Membudayakan perbuatan makruf dan Sosialisasi syariat Islam.
	3. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	1. Peningkatan Pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta menumbuhkan semangat kebangsaan (nasionalisme).

VISI : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
MISI 2: Melanjutkan Pemantapan Perekonomian Rakyat, Mengurangi Angka Pengangguran Dan Membuka Lapangan Kerja Di Berbagai Sektor			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya perekonomian rakyat yang mantap dan menurunkan angka pengangguran	1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Pemantapan perekonomian masyarakat	1. Peningkatan kualitas SDM petani/peternak, peningkatan populasi ternak dan penambahan areal kawasan pertanian/peternakan, penyaluran modal usaha
	2. Menurunnya pengangguran	2. Penciptaan lapangan kerja	1. Peningkatan iklim investasi

VISI : Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
MISI 2: Melanjutkan Pemantapan Perekonomian Rakyat, Mengurangi Angka Pengangguran Dan Membuka Lapangan Kerja Di Berbagai Sektor			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	3. Meningkatnya peran tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan		1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan tenaga penyuluh tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan
	4. Meningkatnya fungsi balai benih pertanian tanaman pangan, perikanan dan perkebunan		1. Peningkatan fungsi balai benih
	5. Meningkatnya pembinaan industri rumah tangga dan industri kecil		1. Meningkatnya pembinaan terhadap industri rumah tangga 2. Meningkatnya pembinaan terhadap industri kecil
	6. Meningkatnya sistem investasi yang mudah, serta pelayanan perizinan yang cepat		1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM petugas pelayanan perizinan
	7. Meningkatnya industri pengolahan dengan bahan baku produksi pertanian masyarakat	1. Pemantapan perekonomian masyarakat	1. Pemantapan perekonomian masyarakat

Visi : Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
Misi 3: Melanjutkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Strategis Serta Infrastruktur Lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya pembangunan sarana dan pasarana transportasi strategis serta infrastruktur lainnya.	1. Tersedianya infrastruktur dasar	1. Peningkatan infrastruktur dasar	1. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi menuju sentra produksi dan kawasan pinggiran 2. Pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pembangunan dan pemantapan kawasan perdagangan
	2. Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Pengembangan pariwisata	1. Pembangunan dan penataan objek wisata 2. Promosi objek wisata
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan	1. Peningkatan pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan pengelolaan persampahan 2. Peningkatan penataan pertamanan Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan penyelamatan hutan, tanah dan air
	4. Tersedianya sarana dan prasarana pengairan dan permukiman	1. Peningkatan sarana dan prasarana pengairan dan permukiman	1. Peningkatan dan penataan drainase di kawasan permukiman Peningkatan penataan serta pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman Peningkatan pembangunan irigasi dan pengairan
	5. Meningkatnya pengelolaan persampahan, penataan pertamanan, dan melestarikan lingkungan hidup	1. Peningkatan sarana dan prasarana dan SDM persampahan dan pertamanan 2. Peningkatan dan perluasan ruang terbuka hijau	1. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan 2. Penataan pertamanan dan pelestarian lingkungan hidup 3. Peningkatan kesejahteraan petugas persampahan dan pertamanan
	6. Meningkatnya areal/kawasan irigasi dan pengairan	1. Peningkatan rehabilitasi irigasi dan pembangunan pada kawasan potensial	1. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi 2. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap irigasi
	7. Meningkatnya pembukaan isolasi kawasan terpencil	1. Peningkatan sarana dan prasarana pada kawasan terpencil	1. Peningkatan infrastruktur dasar pada kawasan terpencil
	8. Meningkatnya perlindungan hutan, tanah dan air	1. Peningkatan pengawasan hutan	1. Peningkatan reboisasi dan penghijauan. 2. Peningkatan kapasitas petugas pengawas hutan

Visi : Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
Misi 4 : Melanjutkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Pengetahuan Dan Mampu Menguasai Teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
. Terciptanya kualitas pendidikan masyarakat yang berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan teknologi.	1. Meningkatnya mutu pendidikan	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan	1. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah 2. unggul Kurikulum pendidikan 3. yang relevan Peningkatan Tenaga pendidik yang handal Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik/tenaga pendidik Penyediaan beasiswa untuk peserta didik dan mahasiswa yang kurang mampu atau yang berprestasi
	2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat	1. Peningkatan minat baca masyarakat	1. Membangun perpustakaan kampung Pengadaan buku buku perpustakaan kampung
	3. Meningkatnya akses informasi	1. Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan	1. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah, instansi pemerintah dan kampung Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi informasi untuk tenaga pendidik, siswa, mahasiswa, aparatur pemerintah dan masyarakat

Visi : Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
Misi 5 : Melanjutkan Peningkatan dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	1. pembangunan sarana prasarana pelayanan kesehatan 2. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kemandirian dan profesional BLUD 3. RSUD Datu Beru Penyediaan pelayanan kesehatan gratis.
	2. Meningkatnya program penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan	1. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan kesehatan 2. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan 2. kesehatan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan
	3. Meningkatnya program pendidikan dokter umum menjadi dokter spesialis dalam rangka memperkuat dan memperluas pelayanan BLU RSUD Datu Beru pada masyarakat	1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan	1. Peningkatan bantuan tugas belajar bagi dokter umum
	4. Meningkatnya pementapan peran RSUD Datu Beru sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang mandiri dan profesional	1. Peningkatan kewenangan dan kemandirian BLUD Datu Beru	1. Memberikan kewenangan BLUD Datu Beru secara penuh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
	5. Meningkatnya keterampilan tenaga medis dan para medis dalam mendukung pelayanan prima	1. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis	1. Meningkatkan mutu dan penyelenggaraan diklat bagi tenaga medis dan paramedis
	6. Meningkatnya pemberian tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil	1. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil	1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di daerah terpencil

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	7. Meningkatnya program bebas biaya pelayanan kesehatan dasar di setiap pusat kesehatan masyarakat.	1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas

Visi : Terwujudnya Kemakmuran Dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera 2017			
Misi 6 : Melanjutkan Pemantapan Perwujudan Iklim Kehidupan Masyarakat Yang Damai, Tertib, Kreatif, Inovatif dan Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya iklim kehidupan masyarakat yang damai, tertib, kreatif, inovatif dan mandiri	1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan tatakelola pemerintahan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan 2. Memfungsikan kantor pemerintahan kampung 3. Penempatan aparatur sesuai dengan keahliannya.
	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1. Melaksanakan pemantapan peran perempuan 2. Melaksanakan penanganan masalah-masalah sosial 3. Melaksanakan penyantunan anak yatim piatu Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang kreatif dan inovatif
	3. Meningkatnya aktifitas sosial, budaya dan olahraga masyarakat	1. Pengembangan sosial, budaya dan olahraga	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas seniman dan budayawan 2. Melakukan pelestarian budaya dan adat istiadat daerah Mengutamakan penghargaan kepada masyarakat yang mengharumkan nama daerah

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, selama periode RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah dapat diuraikan setiap tahunnya sebagai berikut.

6.3.1. Arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2013)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan untuk segera ditangani, antara lain: kemiskinan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran juga difokuskan melalui pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Disamping itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan perdamaian, mengatasi permasalahan sosial dan budaya serta penerapan nilai-nilai syariat Islam menjadi fokus prioritas pada tahun pertama.

6.3.2. Arah kebijakan pembangunan tahun kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Demikian juga pengembangan ekonomi masyarakat lokal terus dilanjutkan secara konsisten untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik yang mendukung keberlanjutan perdamaian. Pada tahap ini, peletakan dasar untuk mendukung pengembangan agroindustri telah dilakukan dengan memfasilitasi berkembangnya investasi sesuai dengan komoditi unggulan daerah.

6.3.3. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti kemiskinan dan pengangguran, permukiman layak huni, pangan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi,) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah harus menunjukkan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah tersebut. Agroindustri komoditas unggulan daerah sudah berkembang sehingga dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Kabupaten Aceh Tengah.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga dan lebih profesional untuk pencapaian target pembangunan milenium pada tahun 2015. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di ibukota provinsi melainkan dapat diakses di regional melalui pembangunan rumah sakit di 4 (empat) regional. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah diapresiasi oleh masyarakat yang terlihat dari penyelenggaraan even budaya baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata. Demikian juga dengan karakter budaya yang dimiliki oleh masyarakat sudah menjadi jati diri dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan. Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah.

Pada tahun ketiga ini investasi telah berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan Badan usaha milik Kabupaten Aceh Tengah yang dikelola secara profesional. Selanjutnya investasi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya alam terbarukan sebagai potensi energi untuk mengatasi krisis energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

6.3.4. Arah kebijakan pembangunan tahun keempat (2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang terintegrasi.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah ditekankan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi yang melibatkan para pemangku kepentingan termasuk dukungan terhadap kemudahan investasi yang terkait dengan pengembangan agroindustri. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendorong bagaimana penataan dan revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Aceh Tengah di tingkat global dan regional. Pada tahap ini, angka kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Aceh Tengah diharapkan telah mengalami penurunan yang signifikan dan daerah-daerah yang mengalami rawan pangan sudah teratasi. Nilai tambah produk komoditas unggulan sudah menunjukkan hasil yang nyata. Akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir sudah dapat diselesaikan secara baik. Selain itu, pencapaian target tujuan pembangunan milenium khususnya pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan tidak hanya dijaga agar tetap konsisten, melainkan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar dan dalam Kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat menambah pendapatan Asli Kabupaten Aceh Tengah.

6.3.5. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima (2017)

Pada tahun kelima pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan

jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode ketiga pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Tengah 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian targetnya. Pada tahun kelima ini, target pembangunan Kabupaten Aceh Tengah sudah dapat dicapai secara menyeluruh sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program secara konsisten dan spesifik. Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang akan diterjemahkan dengan program-program pembangunan. Prioritas pembangunan Aceh Tengah Tahun 2012-2017 adalah: 1) Syari'at Islam; 2) Tatakelola Pemerintahan; 3) Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi; 4) Pendidikan; 5) Kesehatan; 6) Perdamaian; 7) Penanggulangan Kemiskinan; 8) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian dan Perkebunan; 9) Sosial, Budaya dan Pariwisata; dan 10) Lingkungan dan Kebencanaan.

Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMK yang akan dituangkan kedalam rencana strategis masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).Selanjutnya, penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017 dijelaskan secara rinci pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	SYARI'AT ISLAM								
	1 Peningkatan syiar dan pelaksanaan Syariat Islam	1 Program pelaksanaan Syariat Islam	Menurunnya pelanggaran terhadap syariat Islam	40	Persen	15	Persen	Wajib	Dinas Syari'at Islam dan 14 Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Majelis Permusyawaratan Ulama, Baitul Mal.
		2 Program peningkatan sarana dan pra sarana ibadah	Meningkatnya pembinaan masjid dan menasah	295	Mesjid/ Meunasah	295	Mesjid/ Meunasah	Wajib	Dinas Syariat Islam/Sekretariat daerah bagian Kesra
		3 Program pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah	Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah	75	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Program peningkatan kualitas SDM Imam, Khatib, Bilal, Qari, Qariah dan penyuluh	Meningkatnya kualitas pelaksanaan syariat Islam	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Syariat Islam
		5 Program pembinaan Hukum adat dan hukum syariat	Meningkatnya pemahaman hukum adat dan hukum syariah	70	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Syariat Islam
		6 Program peningkatan kemakmuran masjid	Meningkatnya suasana keislaman	70	Persen	90	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Bagian Kesra
		7 Program optimalisasi peran dan fungsi Ulama	Meningkatnya suasana keagamaan ditengah masyarakat melalui peningkatan peran dan fungsi Ulama	25	Persen	75	Persen	Wajib	Majelis Permusyawaratan Ulama
		8 Program Pembinaan dan peningkatan sumber daya Ulama	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ulama	108	Orang	295	Orang	Wajib	Majelis Permusyawaratan Ulama
		9 Program peningkatan pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian.	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian	80	Persen	100	Persen	Wajib	Baitul Mal
		10 Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan Kelembagaan.	Meningkatnya Pendapatan ZIS untuk PAD	60	Persen	90	Persen	Wajib	Baitul Mal
II	TATA KELOLA PEMERINTAHAN								
	1 Peningkatan kualitas pelayananan aparatur	1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas database kependudukan	60,31	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	Meningkatnya pelayanan pindah/purnah tugas aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
		3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekdakab. Umum, Humas dan Tapem

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4	Program Pengelolaan Pelayanan perizinan Publik Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik	0	Kecamatan	14	Kecamatan	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem	
		5	Program pengembangan wilayah perbatasan	Meningkatnya tertib administrasi batas wilayah kabupaten dan kecamatan	7	Kasus	0	Kasus	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem	
		6	Program Pemekaran wilayah Administrasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan	14	Kecamatan	19	Kecamatan	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem	
		7	Program Pemberian penghargaan dan tanda jasa	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Umum	
		8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan legislatif	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat DPRK	
		9	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik	50	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		10	Program Pengelolaan Pelayanan perijinan Publik Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik di kecamatan	0	Kecamatan	14	Kecamatan	Wajib	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah	
	2	Peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Program peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
			2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur sesuai dengan SOP	0	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi
					Meningkatnya profesionalisme pelayanan aparatur	70	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi
			3	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya profesionalisme pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi
			4	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	70	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
			5	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	Persen	100	Persen	Wajib	BKPP
	3	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya kapasitas aparatur di bidang kearsipan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Tapem, Umum, dan Inspektorat
			2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	65	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Organisasi dan DPKKD
			3	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas kinerja legislatif	70	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat DPRK
			4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah		WTP		WTP	Wajib	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
			5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah		WTP		WTP	Wajib	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
					Meningkatnya pendapatan asli daerah	100	persen	100	Persen	Wajib	Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Peningkatan tertib administrasi kearsipan	6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya informasi pembangunan daerah	100	persen	100	Persen	Wajib	BAPPEDA/BKB&PP/Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Pembangunan
		1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya kualitas administrasi kearsipan	100	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	100	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya kelestarian arsip daerah	100	persen	100	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	5 Penegakan supremasi hukum	1 Progam penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan perundang-undangan	100	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian hukum
		2 Progam pembinaan dan fasilitasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	100	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian hukum
		3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya produk hukum yang disahkan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat DPRK
		4 Program Peningkatan sistem internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah	Meningkatnya advokasi hukum bagi aparaturnya dan masyarakat	100	persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian hukum
III	INFRASTRUKTUR DASAR YANG TERINTEGRASI								
	1 Penyediaan infrastruktur daerah yang teritegrasi	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan sentra produksi	694,97	km	741,77	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas jalan dan jembatan di Kabupaten	40	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang jalan kondisi baik	358,1	km	694,97	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang jalan kondisi rusak ringan	44,43	km	-	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Panjang jalan kondisi rusak berat	147,48	km	46,80	km	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan yang rusak	5	dokumen	10	dokumen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Terjaminnya aksesibilitas antar wilayah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		5 Program pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas informasi dan database jalan dan jembatan	5	Dokumen	5	Dokumen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		6 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kebinamargaan	50	Persen	75	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Meningkatnya umur guna jalan dan kualitas lingkungan	40	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		9 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tersedianya turap/talud/beronjong pada daerah rawan longsor	2,33	KM	7,33	KM	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Peningkatan produktivitas komoditi pertanian	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
	3 Peningkatan pemanfaatan dan konservasi sumberdaya air	1 Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Meningkatnya ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat	45	Persen	65	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya air	4.020	Meter	5131	Meter	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum/Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan
			Tersedianya dokumen uji baku mutu air	1	dokumen	1	dokumen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Tersedianya infrastruktur penampung air	5	embung	10	embung	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya akses air minum yang aman, cukup dan sehat bagi masyarakat	29	Persen	69	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Tersedianya system air limbah setempat yang memadai	10	Persen	35	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			Tersedianya system air limbah skala komunitas/ kawasan/kota	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
	4 Pengembangan perdesaan, wilayah strategis dan cepat tumbuh sesuai tata ruang	4 Program Pengendalian Banjir	Menurunnya dampak bencana banjir	60	Persen	85	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		1 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh yang menjadi domain kesosialan dan ketenagakerjaan	50	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja
		2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan	17	Unit	32	Unit	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan wilayah sesuai dengan pola dan struktur ruang	0	Dokumen	5	Dokumen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum
		4 Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pemanfaatan wilayah sesuai dengan pola dan struktur ruang	2	Dokumen	6	Dokumen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum
		5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	30	Persen	90	Persen	Wajib	BAPPEDA/Dinas Pekerjaan Umum
		6 Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya koordinasi antar penyelenggara pembangunan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Pembangunan/ BAPPEDA
		7 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar wilayah perbatasan dalam Kabupaten Aceh Tengah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Pembangunan/ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
		5 Peningkatan kualitas perencanaan daerah	1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	100	Persen	100	Persen	Wajib

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB			
				AWAL		AKHIR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	100	Persen	Wajib	Bappeda		
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	5	Dokumen	20	Dokumen	Wajib	Bappeda		
				Cakupan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan dokumen kebijakan dan perencanaan publik	25	Persen	50	Persen	Wajib	Bappeda		
		3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah	50	Persen	75	Persen	Wajib	Bappeda		
		4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial dan budaya daerah	50	Persen	75	Persen	Wajib	Bappeda		
		5	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur daerah	50	Persen	75	Persen	Wajib	Bappeda		
		6	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	0	Dokumen	4	Dokumen	Wajib	Badan Penanggulan Bencana Daerah		
		7	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Bappeda dan 14 Kecamatan		
	6	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			2	Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan	30	Persen	55	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan kelancaran arus barang dan jasa	30	Persen	55	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	60	Persen	95	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya keamanan berlalu lintas dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	40	Persen	75	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		6	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelayakan kendaraan	30	Persen	75	Dokumen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
		7	Penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya status kepemilikan lahan pemma	75	Persen	80	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Tata Pemerintahan
				Menurunnya angka perselisihan kepemilikan lahan masyarakat		100	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Tata Pemerintahan	
		2	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya kualitas database pertanahan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Tata Pemerintahan		
		3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tersedianya areal pemakaman	6	Areal	16	Areal	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum, BLHK & P		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8 Peningkatan akses informasi masyarakat terhadap pembangunan berbasis teknologi informasi	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya minat masyarakat menggunakan media informasi secara online	10	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, BAPPEDA
		2 Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap ICT	1	Unit	1	Unit	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Humas
		3 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) di bidang komunikasi informasi	25	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Humas /Sekretariat Daerah Kabupaten Bag.Tata Humas
		4 Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya informasi pembangunan kepada masyarakat	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Humas
		5 Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	75	Persen	100	Persen	Wajib	BAPPEDA, dan Sekdakab. Bagian Adm. Pembangunan
	9 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan	1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan pertambangan	75	Persen	100	Persen	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Perekonomian, Disperindagkop & ESDM
		2 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya jumlah penambangan liar	0	Persen	40	Persen	Wajib	Disperindagkop & ESDM
		3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber energi listrik	75	Persen	100	Persen	Wajib	Disperindagkop & ESDM
IV	PENDIDIKAN								
	1 Peningkatan akses pendidikan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	30	Persen	40	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya akses pendidikan dasar	60	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
			APK SD/MI	114,01	indeks	115,05	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan
			APK SMP/MTs	101,60	indeks	101,60	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan
			APM SD/SDLB/ MI	96,99	indeks	100,00	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			APM SMP	76,86	indeks	100,00	indeks	Wajib	Dinas Pendidikan
			Angka Kelulusan SD/MI	100	persen	100,00	persen	Wajib	Dinas Pendidikan
			Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs	99,95	persen	100,00	persen	Wajib	Dinas Pendidikan
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,008	persen	0,003	persen	Wajib	Dinas Pendidikan
			Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs	0,019	persen	0,003	persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		3 Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya akses pendidikan menengah	70	Persen	100,00	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
			APK SMA/SMK/MA	92,06	Persen	100,00	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Meningkatnya Proses Pembelajaran di Dayah	60	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		5 Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dayah	60	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		6 Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	Meningkatnya SDM Santri	60	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		7 Program Pembinaan Manajemen Dayah	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Dayah	50	Persen	70	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		8 Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	Terwujudnya Pengembangan Dayah	25	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		5 Program Pendidikan luar biasa	Meningkatnya akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	51	Persen	81	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat dan pelayanan perpustakaan	10	Persen	60	Persen	Wajib	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	2 Peningkatan kualitas pendidikan	1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	51	Persen	84	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
	KESEHATAN	2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya profesionalisme manajemen pelayanan pendidikan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan
		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur Pendidikan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pendidikan/ Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1 Peningkatan pelayanan kesehatan secara profesional	1 Program peningkatan sarana/ prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	85	Persen	100	Persen	Wajib	Rumah Sakit Umum Daerah
		2 Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD RSU	Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan pada BLUD RSU	75	Persen	100	Persen	Wajib	Rumah Sakit Umum Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		Berkurangnya anggaran sharing dari pemerintah daerah	25	Persen	0	Persen	Wajib	Rumah Sakit Umum Daerah
		1 Program pelayanan kesehatan penduduk Miskin	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin	75	Persen	85	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan /BKB & PP
		2 Program Obat dan Perbekalan	Meningkatnya ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan	80	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya angka kesakitan masyarakat	80	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		4 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya jaminan penggunaan obat dan makanan berbahaya	25	Persen	75	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	55	Persen	95	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya angka gizi buruk	25	Persen	0	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
			Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,7	Persen	02	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
			Cakupan MPASI untuk masyarakat miskin	64	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	25	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kematian akibat penyakit menular	10	Persen	0	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya standarisasi pelayanan kesehatan sesuai SPM	90	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS/PUSKESMAS Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1,12	Rasio	1,19	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
		11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya angka kematian balita	22	Rasio	18	Rasio	Wajib	Dinas Kesehatan
		12 Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Meningkatnya usia harapan hidup	90	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan
13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Menurunnya angka kesakitan masyarakat akibat keracunan makanan	65	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan		
14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	25	Persen	20	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan		
15 Program pembinaan dan pengembangan pendidikan kesehatan	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	85	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Kesehatan		
VI	PERDAMAIAN								
	1 Peningkatan rasa aman terhadap masyarakat	1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan bagi masyarakat	50	Persen	75	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat /Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Program Pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya penegakan supremasi hukum	50	Persen	75	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat /Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
		3 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	40	Persen	75	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya penanganan norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat	100	Persen	100	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	2 Peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	1 Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	80	Persen	95	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan antar pemangku kepentingan	0	Koordinasi	20	Koordinasi	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		3 Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	60	Persen	85	Persen	Wajib	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
VII	PENANGGULANGAN KEMISKINAN								
	Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menurunkan angka kemiskinan	1 Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	295	Unit	927	Unit	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat perumahan masyarakat miskin	1	Dokumen	5	Dokumen	Wajib	BAPPEDA/ Dinas Pekerjaan Umum/ Badan Pemberdayaan
	1								Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Dinas Kesehatan
		3 Program pemberdayaan komunitas perumahan	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan perumahan	1	Fasilitasi	5	Fasilitasi	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
	2 Penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin	1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	20	Persen	80	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2 Program Peningkatan kesempatan kerja	Angka pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan	20	Persen	45	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya angka penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		4 Program Pembinaan kreativitas, inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya ekonomi kreatif masyarakat	0	Persen	100	Persen	Pilihan	BKB & PA, BPM & PK dan 14 Kecamatan Lingkup Pemerintah Aceh Tengah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	3	Peningkatan pengelolaan lembaga koperasi dan UMKM secara profesional	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya profesionalisme koperasi dan UKM	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
			2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi kampung	20	Persen	85	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
	4	Peningkatan profesionalisme lembaga kampung dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya profesionalisme lembaga desa	50	Persen	95	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
			2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	10	Persen	50	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
			3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kampung	50	Persen	90	Persen	Wajib	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
	5	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	1	Dokumen	6	Dokumen	Pilihan	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal	258	KK	600	KK	Pilihan	Dinsosnakertrans, Disnakkan, Distan TP
VIII	KETAHANAN PANGAN DAN NILAI TAMBAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN										
	1	Peningkatan minat investor untuk menanam modal dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan peningkatan PAD	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Aceh Tengah	4	Event	20	Event	Wajib	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm.Perekonomian / BAPPEDA
	2	Peningkatan nilai tambah pertanian	2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian	961	kelompok	1.151	kelompok	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
					Meningkatnya pendapatan petani yang dibantu	6.075	Orang	6.475	Orang	Pilihan	Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			3	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian /perkebunan	Menurunnya daerah rawan pangan	70	Persen	95	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan /Dinas Perkebunan dan Kehutanan
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.277	Ton	59052,00	Ton	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan /Dinas Perkebunan dan Kehutanan
					Peningkatan Infrastruktur Pertanian	36	Km	55,8	Km	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan /Dinas Perkebunan dan Kehutanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Rehabilitasi Kebun Kopi Rakyat	5.836	Ha	836	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan / Dinas Perkebunan dan Kehutanan		
			Perluasan / Pembukaan Lahan Kebun Rakyat	10.138	Ha	13.658	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan / Dinas Perkebunan dan Kehutanan		
		3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan, peternakan / perikanan	Meningkatnya akses informasi pasar	10	Komoditas	10	Komoditas	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan / Dinas Perkebunan dan Kehutanan	
		4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan	20	Persen	45	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
				Ketersediaan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	39	Unit	41,00	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
			Peningkatan penelitian teknologi pertanian tepat guna	2	Ha	19	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		
			Pengendalian serangan hama penyakit tanaman kopi	12.693	Ha	4.693	Ha	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		
			Jumlah unit pengolahan pasca panen kopi (pulper)	86	Unit	286	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		
			Jumlah unit pengolahan pasca panen tebu	28	Unit	36	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		
			Persentase peningkatan produktifitas kopi	1	Ton / Ha / T hn	1	Ton / Ha / Th n	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		
			Ketersediaan penelitian pertanian					Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan		
			5	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Meningkatnya produksi produk pertanian / perkebunan	60	Persen	85	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian / Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya penyuluh pertanian	25	Persen	70	Persen	Pilihan	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan / Dinas Peternakan dan Perikanan
		7	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produktivitas peternakan	30	Persen	70	Persen	Pilihan	Dinas Peternakan dan Perikanan	
				Peningkatan populasi ternak							
				- Ternak besar	21.893	ekor	32.843	ekor	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Ternak kecil	12.985	ekor	15.615	ekor	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
			- Ternak unggas	319.935	ekor	319.935	ekor	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Peningkatan areal/kawasan peternakan	651	Ha	1.011	Ha	ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan
		8 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan bagi hasil untuk daerah	30	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	3 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan	1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka penyakit ternak	100	Persen	100	Persen	Pilihan	Dinas Peternakan dan Perikanan
		2 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif	10	Persen	50	Persen	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Disbunhut
		3 Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung pertanian	2	Unit	8	Unit	Pilihan	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	4 Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dan peternakan	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan danau Lut Tawar	6,5	Ha	31,5	Ha	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		2 Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	587	Unit	675,05	Unit	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		3 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya Kawasan Budidaya Air Tawar	1	Kawasan	18	Kawasan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		4 Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya akses pasar produksi perikanan	25	Persen	35	Persen	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Peningkatan Produksi Benih	200.000	ekor	490.0000	ekor	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produksi perikanan	28	unit	120	unit	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
		5 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya Kawasan Budidaya Air Tawar	1	kawasan	20	kawasan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
	5 Peningkatan peran pemerintah dalam pengendalian pasar	1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya angka kelangkaan BBM dan pupuk bersubsidi	14	Kecamatan	14	Kecamatan	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Perekonomian/ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Tersedianya resi gudang bagi petani	1	Unit	1	Unit	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		3 Program Penataan Struktur Industri	Tersedianya kawasan industri sesuai dengan keunggulan komparatif daerah	14	Kecamatan	14	Kecamatan	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	Meningkatnya fasilitas pemasaran produk	9	Pasar	17	Pasar	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	6 Peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri	1 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	60	Persen	72	Persen	Pilihan	Sekdakab. Bagian Ekonomi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri	65	Persen	85	Persen	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Perekonomian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
	7 Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD, Koperasi dan UMKM	1 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya fasilitasi bagi pedagang kaki lima/ asongan untuk memperoleh lapangan usaha	2	Fasilitasi	6	Fasilitasi	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	50	Persen	80	Persen	Pilihan	Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Adm. Perekonomian / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
		3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah	14	Kecamatan	14	Kecamatan	Pilihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
IX	SOSIAL BUDAYA DAN PARIWISATA								
	1 Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak	10	Persen	50	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	20	Persen	70	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	100	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	50	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keluarga sehat sejahtera	1 Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Kualitas dan cakupan Pelayanan Keluarga Berencana	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Program Pelayanan Kontrasepsi	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya partisipasi akseptor KB/KR	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan Ibu dan anak	908	Orang	908	Orang	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatnya akses informasi terhadap pertumbuhan anak	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendamping keluarga sejahtera	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8 Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya profesionalisme pelayanan posyandu	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		9 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi	24	Kelompok	24	Kelompok	Wajib	BKB dan PP
	3 Peningkatan penanggulangan permasalahan sosial dalam masyarakat	1 Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan penyakit masalah sosial	24	Kelompok	24	Kelompok	Wajib	BKB dan PP
		2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin, adat terpencil dan penyandang masalah sosial	60	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Setdakab. Bag. Ekonomi
		3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya layanan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dan penanganan masalah strategis yang menyangkut rencana tanggap darurat/kejadian luar biasa	50	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		4 Program Pembinaan Anak Terlantar	Mengurangi jumlah anak terlantar	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pemberdayaan terhadap penyandang cacat dan trauma	10	Persen	50	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Meningkatnya pelayanan terhadap lansia dan anak yatim piatu	14	Panti	20	Panti	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		7 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial	50	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				AWAL		AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Pengembangan dan pelestarian nilai, kekayaan dan keragaman budaya	8 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberadaan masyarakat miskin	50	Persen	90	Persen	Wajib	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	1	event budaya / tahun	5	event budaya / tahun	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan budaya	1	Buku	5	Buku	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya	1	Event Gebyar Seni dan Budaya	6	Event Gebyar Seni dan Budaya	Wajib	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	5 Peningkatan minat masyarakat terhadap olah raga dan kepariwisataan	1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Meningkatnya minat masyarakat terhadap olah raga	3	Kegiatan	20	Kegiatan	Wajib	Disbudparpora
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya prestasi atlet daerah pada event daerah dan nasional	60	Persen	75	Persen	Wajib	Disbudparpora
		3 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan	60	Persen	90	Persen	Wajib	Disbudparpora
		4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya penyebaran informasi wisata tingkat nasional dan internasional	50	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		5 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri	50	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		6 Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya koordinasi antar pelaku kepariwisataan	1	Koordinasi	6	Koordinasi	Pilihan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	X	LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN							
	1 Peningkatan kualitas lingkungan secara lestari	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kesehatan lingkungan	10,4	Persen	30	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan	45	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		3 Program Perlindungan konservasi dan sumber daya alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam	30	Persen	10	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
		4 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam	45	Persen	25	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan / Dinas perkebunan Kehutanan dan BPBD
		5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses informasi terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan / BPBD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN / KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA				BIDANG URUSAN	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				AWAL		AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan/ BAPPEDA/ Dinas Pekerjaan Umum	
		7	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Menurunnya luas lahan kritis	40	Ha	600	Ha	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Menurunnya praktek illegal logging	30	Persen	10	Persen	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		9	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan	6	KM	52	KM	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
		10	Program Peningkatan pengendalian polusi	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	45	Persen	20	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	
	2	Peningkatan nilai tambah sumber daya hutan, ekowisata dan jasa lingkungan	1	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Meningkatnya Pendapata Asli Daerah melalui ekowisata dan jasa lingkungan	0	Kegiatan	4	Kegiatan	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
			2	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sumber daya hutan	10	Persen	50	Persen	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			3	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan industri hasil hutan	30	Persen	80	Persen	Pilihan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	3	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	1	Program pengendalian kebakaran hutan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan	45	Persen	25	Persen	Wajib	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
			2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelayanan tanggap darurat kebencanaan	100	Persen	100	Persen	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			3	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam /sosial	Rehabilitasi rumah korban bencana alam	100	Persen	100	Persen	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
			4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	50	Persen	75	Persen	Wajib	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPK terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunannya terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017.

Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) SKPK menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPK.

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk masing masing program. Maksud dari bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku dan memperhitungkan kapasitas riil, dimana maksu dari kapasitas riil adalah kemampuan keuangan sebenarnya setelah dikurangi anggaran belanja rutin pegawai. Proyeksi kapasitas riil keuangan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 untuk pembiayaan Prioritas-I dapat dilihat pada Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.

Untuk program yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPK/lintas SKPK maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPK terkait. Uraian program sesuai urusan pemerintah disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya disajikan pada Tabel 8.1.

TABEL VIII.1
PLAFON ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ACEH TENGAH
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH TAHUN 2013

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB																			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			URUSAN WAJIB										209.511				353.726				378.930				403.279				427.998				1.700.730			
1	1		PENDIDIKAN								23.026				41.306						44.995				47.690				53.891				210.807			
1	1	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	40	persen	5	100																										DISDIK		
1	1	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD	30	persen	2	475	2	500	2	515	2	530	2	546	40	2.567																DISDIK		
1	1	3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya akses pendidikan dasar	60	persen	8	12.806	8	25.000	8	27.500	8	29.000	8	32.000	100	126.306																DISDIK		
				APK SD/MI	114,01	indeks	114,05		115,00		115,09		115,01		115,05		115,05		115,05	-														DISDIK		
				APK SMP/MTs	101,60	indeks	101,60		101,60		101,60		101,60		101,60		101,60		101,60	-														DISDIK		
				APM SD/SDLB/ MI	96,99	indeks	97		98		99		100		100		100		100	-														DISDIK		
				APM SMP	76,86	indeks	80		85		90		95		100		100		100	-														DISDIK		
				Angka Kelulusan SD/MI	100	persen	100		100		100		100		100		100		100	-															DISDIK	
				Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs	99,95	persen	99,96		99,97		99,98		99,99		100		100		100	-															DISDIK	
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0,008	persen	0,007		0,006		0,005		0,004		0,003		0,003		0,003	-															DISDIK	
1	1	4	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya akses pendidikan menengah	70	persen	6	5.729,5	6	10.000	6	11.000	6	12.000	6	15.000	100	53.730																DISDIK		
				APK SMA/SMK/MA	92,06	indeks	94,02		96,03		98,05		98,06		100,00		100,00	-																DISDIK		
1	1	5	Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya akses pendidikan non formal	30	persen	8	220	8	1.500	8	1.545	8	1.591	8	1.639	70,00	6.495															DISDIK			

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	51	persen	6	3.015,00	7	2.605,45	7	2.683,61	6	2.764,12	7	2.847	84	13.915,23	DISDIK	
1	1	7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya profesionalisme manajemen pelayanan pendidikan	50	persen	10	680	10	700,40	10	721,41	10	743,05	10	765,35	100	3.610,21	DISDIK	
1	1	8	Program Pendidikan luar biasa	Meningkatnya akses pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus	56	persen	-	-	5	1.000	5	1.030	5	1.061	5	1.093	76	4.184	DISDIK	
			Program Peningkatan saran dan prasarana dayah	Meningkatnya proses pembelajaran dayah	60	persen	-	-	5	2.000	5	2.060	5	2.122	5	2.185	80	8.367	DISDIK	
			Program peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dayah	60	persen	-	-	5	500	5	515	5	530	5	546	80	2.092	DISDIK	
			Program pendidikan dayah dan pemberdayaan santri	Meningkatnya SDM santri	60	persen	-	-	5	500	5	515	5	530	5	546	80	2.092	DISDIK	
			Program pembinaan manajemen dayah	Meningkatnya manajemen pengelolaan dayah	50	persen	-	-	5	300	5	309	5	318	5	328	70	1.255	DISDIK	
			Program peningkatan kualitas dan pengembangan dayah	Terwujudnya pengembangan dayah	25	persen	-	-	5	700	5	721	5	743	5	765	45	2.929	DISDIK	
1	2		KESEHATAN				55.566		71.427		67.971		71.659		78.840		339.804			
			Program peningkatan sarana/ prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	85	persen	5	3.431,4	5	15.000,00	5	16.450,00	0	19.000,00	0	25.000,00	100	78.881	RSU	
			Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD RSU	Meningkatnya kualitas pelayanan pada BLUD RSU	75	persen	5	42.430	5	43.702,90	5	45.013,99	5	46.364,41	5	47.755,34	100	225.267	RSU	
				Berkurangnya anggaran sharing dari Pemerintah Daerah	25	persen	5	1.886,7	5	1.509,36	5	1.132,0	5	755	5	377,34	0	0	RSU	
			Program pelayanan kesehatan penduduk Miskin	Meningkatnya pelayanan untuk masyarakat miskin	75	persen	2	40	2	200	2	210	2	220	2	230	85	900	DINKES/ BKB & PP	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)												SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Program Obat dan Perbekalan	Meningkatnya Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan	80	persen	4	1.716	4	1.767	4	1.821	4	1.875	4	1.931	100	9110,48	DINKES
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	80	persen	4	2.117	4	2.181	4	2.246	4	2.313	4	2.383	100	11239,44	DINKES
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya jaminan terhadap obat dan makanan berbahaya	25	persen	10	30	10	30,90	10	31,83	10	32,78	10	33,77	75	159	DINKES
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	55	persen	8	20	8	20,60	8	21,22	8	21,85	8	22,51	95	106	DINKES
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Menurunnya angka gizi buruk	25	persen	5	77,8	5	370,00	5	381,10	5	392,53	5	404,31	-	1.626	DINKES
			Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,7	persen	0,10		0,10		0,20		0,10		0,00		-		DINKES
			Cakupan MPASI untuk masyarakat miskin	64	persen	36		0		0		0		0		100,00		DINKES
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat	25	persen	15	25	15	25,75	15	26,52	15	27,32	15	28,14	100	133	DINKES
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya angka kematian akibat penyakit menular	10	persen	6	255	3	262,65	1	270,53	0	278,65	0	287,00	-	1.354	DINKES
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya standar pelayanan kesehatan	90	persen	4	70	3	72,10	1	74,26	0	76,49	0	78,79	100	372	DINKES
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PUSKESMAS/PUSKES MAS Pembantu dan Jaringannya	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1,12	Indeks	0,00	3.342	0,02	6.003,7 2	0,02	3,72	0,02	3,72	0,01	1,86	1,19	9.355	DINKES
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Menurunnya angka kematian balita	22	rasio	1	30	1	70,00	1	72,10	1	74,26	0	76,49	18	323	DINKES
		Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap lansia	90	persen	2	15	2	15,45	2	15,91	2	16,39	2	16,88	100	80	DINKES

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB																			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Menurunnya angka kesakitan masyarakat akibat keracunan makanan	65	persen	7	25	7	25,75	7	26,52	7	27,32	7	28,14	100	133	DINKES																	
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	25	persen	1	55	1	70,00	1	72,10	1	74,26	1	76,49	20	348	DINKES																	
			Program pembinaan dan pengembangan pendidikan kesehatan	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	85	persen	0	0	3	100	5	103,00	5	106,09	3	109,27	100	418	DINKES																	
1	3		PEKERJAAN UMUM					68.066		141.000		143.018		154.195		167.367		673.646																		
1	3	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan sentra produksi	694,97	km	9,36	37.708	9,36	99.087	9,36	100.000	9,36	109.000	9,36	115.000	741,77	460.795	DINAS PU																	
				Jumlah Jembatan	81	unit	4		4		4		4		4		101																			
				Panjang jalan kondisi baik	358,1	km	33,6		67,37		84,22		84,22		67,37		694,97																			
			Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-orong	Meningkatnya umur guna jalan dan kualitas lingkungan	40	persen	8	8.285	8	8.000	8	7.000	8	7.210	8	8.000	90	38.495	DINAS PU																	
				Panjang Drainase kondisi baik	91,29	km	10,26		8,28		8,43		8,59		8,76		135,61		DINAS PU																	
1	3	2	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Tersedianya Turap/ Talud/ Bronjong pada daerah rawan longsor	2,33	km	1	1.389	1	5.000	1	5.000	1	6.037	1	6.000	7,33	23.426	DINAS PU																	
			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya pelayanan aksesibilitas jalan dan jembatan di Kabupaten	40	persen	10	3.505,6	10	6.000	10	6.180	10	6.365	10	6.556	90	28.607	DINAS PU																	
				Persentase panjang Jalan Lingkungan Baik	40,51	km	5		5		5		5		5		65,51	-	DINAS PU																	
			Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan yang rusak	5	dokumen	1		1		1		1		1		10	0	DINAS PU																	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Terjaminnya aksesibilitas antar wilayah	100	persen	100		100	150	100	155	100	159	100	164	100,00	628	DINAS PU	
			Program pengembangan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas informasi dan database jalan dan jembatan	5	dokumen			2	50	1	52	1	53	1	55	10	209	DINAS PU	
			Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kebinamargaan	50	persen		-	5	500	5	515	5	530	5	546	70	2.092	DINAS PU	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan	50	persen	10	6.836,0	10	7.041	10	8.000	10	8.240	10	10.000	100	40.117	DINAS PU	
			Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Meningkatnya ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat	45	persen			5	4.994	5	5.500	5	5.665	5	6.965	65	23.124	DINAS PU	
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya air	4.020	Meter	201	230,7	211	238	222	245	233	252	244	260	244,32	1.225	DINAS PU/ BLHK & P	
				Tersedianya dokumen uji baku mutu air	1	dokumen	1	50	1	52	1	53	1	55	1	56	6	265	BLHK & P	
				Tersedianya infrastruktur penampung air	5	embung	1	215	1	221	1	228	1	235	1	242	10	1.141	DISTAN & TP	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya akses air minum yang aman, cukup dan sehat bagi masyarakat	29	persen	8	2.860,1	8	2.946	8	3.000	8	3.090	8	6.000	69,0	17.896	DINAS PU/PDAM	
				Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	10	persen	5	1.335	5	900	5	927	5	955	5	983	35	5.100	DINAS PU	
				Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	10	persen	5	126,8	5,0	131	5,0	135	5,0	139	20,0	143	50,0	673	DINAS PU	
			Program Pengendalian Banjir	Menurunnya dampak bencana banjir	60	persen	5	715	5	736	5	1.000	5	1.030	5	1.061	5	4.542	DINAS PU	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2013		2014		2015		2016		2017			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3	4	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh yang menjadi domain kesosialan dan ketenagakerjaan	50	persen	6	499	6	514	6	529	6	545	6	562	80	2.649	DINAS PU/ DINSOSNAKER TRANS
1	3	5	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan	17	unit	3	4.311	3	4.440	3	4.500	3	4.635	3	4.774	32	22.660	DINAS PU
1	4		PERUMAHAN					905		9.152		16.270		21.319		15.692		61.138	
			Program Pengembangan Perumahan	Ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	295	unit		50	398,00	6.695	574	12.000	750	12.360	927	13.000	927	44.105	DINAS PU
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat perumahan masyarakat miskin	1	dokumen	1	125	1	129	1	133	1	137	1	141	5	664	DINAS PU, BPM & PK, DINKES, BAPPEDA
			Program pemberdayaan komunitas perumahan	Meningkatnya sertifikasi kepemilikan perumahan	1	fasilitasi			1	100	1	150	1	180	1	200	5	630	DINAS PU
			Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial	Rehabilitasi rumah korban bencana alam	100	persen	-		-		-		-		-		100		DINAS PU
			Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	50	persen	5	300	5	1.794	5	3.547	5	8.197	5	1.901	75	15.740	BPBD
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Cakupan ketersediaan areal pemakaman	100	persen	-	430	-	435	-	440	-	445	-	450	100		DINAS PU/ BLHK&P
				Tersedianya Areal Pemakaman	6	areal	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	16	-	DINAS PU/ BLHK&P
1	5		PENATAAN RUANG					625		1.394		1.433		1.473		1.513		6.438	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan wilayah sesuai dengan pola dan struktur ruang	-	dokumen	1	625	1	644	1	663	1	683	1	703	5	3.318	BAPPEDA/ DINAS PU

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB																			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pemanfaatan wilayah sesuai dengan pola dan struktur ruang	2	dokumen	1		2	150	1	150	1	150	1	150	6	600	BAPPEDA/ DINAS PU																	
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap pemanfaatan ruang	30	persen	20	0	10	600	10	620	10	640	10	660	90	2.520	BAPPEDA/ DINAS PU																	
1	6		PERENCANAAN PEMBANGUNAN					4.780		6.680		6.903		7.107		7.317		32.788																		
			Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	75	persen	5	760	5	1.683	5	1.733	5	1.785	5	1.839	100	7.800	BAPPEDA/ SETDAKAB. ADM .PEMBANGUNAN																	
			Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya koordinasi antar penyelenggara pembangunan	100	persen	-	1.100	-	1.233	-	1.270	-	1.308	-	1.347	100	6.258	SETDAKAB. ADM.PEMBANGUN AN /BAPPEDA																	
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar wilayah perbatasan dalam Kab. Aceh Tengah	100	persen	-	170	-	175	-	180	-	186	-	191	100	903	SETDAKAB. ADM.PEMBANGUN AN /BPM& PK																	
			Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan, penanggulangan dan penyelesaian dalam pengembangan kota-kota	100	persen	-		-	100	-	103	-	106	-	109	100	418	BAPPEDA																	
			Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	100	persen	-	100	-	115	-	120	-	125	-	130	100	590	BAPPEDA																	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah	100	persen	-	100	-	125	-	150	-	150	-	150	100	675	BAPPEDA																	
				Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	5	dokumen	4	255	5	700	4	721	4	743	4	765	26	3.184	BAPPEDA																	
				Cakupan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan dokumen kebijakan dan perencanaan publik	25	persen	5	985	5	1.000	5	1.030	5	1.061	5	1.093	50	5.169	BAPPEDA																	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi daerah	50	persen	5	315	5	324	5	334	5	344	5	355	75	1.672	BAPPEDA	
			Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial dan budaya daerah	50	persen	5	315	5	324	5	334	5	344	5	355	75	1.672	BAPPEDA	
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur daerah	50	persen	5	315	5	324	5	334	5	344	5	355	75	1.672	BAPPEDA	
			Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	-	dokumen	0	-	1	200	1	206	1	212	1	219	4	837	BPBD	
			Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	persen	0	365	0	376	0	387	0	399	0	411	0	1.938	BAPPEDA	
1	7		PERHUBUNGAN					2.800		6.467		4.932		4.950		4.928		24.078		
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan	50	persen	10	215	10	850	10	858	10	883	10	1.060	100	3.865	DISHUB KOMINFO	
1	7	2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan	30	persen	5	225	5	231,75	5	238,70	5	245,86	5	253,24	55	1.195	DISHUB KOMINFO	
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan kelancaran arus barang dan jasa	30	persen	35	529,0	40	500,00	45	515,00	50	530,45	55	546,36	55,00	2.621	DISHUB KOMINFO	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa	60	persen	7	650	7	3.129	7	1.556	7	1.516	7	1.560	95	8.412	DISHUB KOMINFO	
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya keamanan berlalu lintas dan menurunnya angka	40	persen	7	1.181	7	1.456	7	1.456	7	1.456	7	1.181	75	6.730	DISHUB KOMINFO	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB																			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
					kecelakaan lalu lintas																															
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelayakan kendaraan	30	persen	0	0	11,25	300	11,25	309,00	11,25	318,27	11,25	327,82	75	1.255															DISHUB KOMINFO	
1	8				LINGKUNGAN HIDUP					5.509		7.462		7.730		7.750		7.982																	36.434	
1	8	1			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kesehatan lingkungan	10,40	persen	1,60	2.337	3	2.407	5	2.479	5	2.554	5	2.630	30	12.407																BLHK & P
1	8	2			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan	45	persen	6	700	6	614	6	632	6	651	6	670	75	3.267																BLHK & P
1	8	3			Program Perlindungan konservasi dan sumber daya alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam	30	persen	4	110	4	313	4	323	4	120	4	124	10	990																BLHK & P
					Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam	45	persen	4	-	4	500	4	515	4	530	4	546	25	2.092																BLHK & P/ DISBUNHUT
1	8	4			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses informasi terhadap potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100	persen	-	308	-	317	-	327	-	337	-	347	100	1.635																BLHK & P/ BPBD
1	8	5			Program Peningkatan pengendalian polusi	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	45	persen	5	150	5	150	5	155	5	159	5	164	20	778																BLHK & P
					Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui ekowisata dan jasa lingkungan	-	kegiatan			1	200	1	250	1	258	1	265	4	973															BLHK & P	
					Program pengendalian kebakaran hutan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan	45	persen	5		5	1.000	5	1.030	5	1.061	5	1.093	25	4.184																BLHK & P

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50	persen	5	1.904	5	1.961	5	2.020	5	2.081	5	2.143	75	10.109	BLHK & P /BAPPEDA/ DINAS PU	
1	9		PERTANAHAN					3.925		4.043		10.239		10.546		10.862		39.615		
			Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya status kepemilikan lahan pemda	75	persen	1	3.700	1	3.811	1	10.000	1	10.300	1	10.609	80	38.420	SETDAKAB. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
				Menurunnya angka perselisihan kepemilikan lahan masyarakat	100	persen	-	125	-	129	-	133	-	137	-	141	100	664	SETDAKAB. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Meningkatnya kualitas database pertanahan	50	persen	10	100	10	103	10	106	10	109	10	113	100	531	SETDAKAB. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
1	10		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					1.030		500		515		530		546		3.122		
1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas database kependudukan	60,31	persen	65	1.030	70	500	80	515	100	530	100	546	100	3.122	DISDUKCAPIL	
1	11		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					778		1.301		1.702		1.754		1.806		7.341		
1	11	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak	10	persen	8	100	8	103	8	106	8	109	8	113	50	531	BKBPP & PA	
1	11	2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	20	persen	10	498	10	513	10	528	10	544	10	561	70	2.644	BKBPP & PA	
1	11	3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak	100	persen	0	50	0	552	0	568	0	585	0	603	100	2.357	BKBPP & PA	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)											SKPD PENANGGUNG JAWAB																
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp														
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	11	4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta perempuan dalam pembangunan	50	persen	10	130	10	134	10	500	10	515	10	530	10	1.809	BKBPP & PA															
1	12		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					1.793		1.946		2.005		2.065		2.498		10.306																
			Program Keluarga Berencana	Meningkatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	50	persen	5	949	5	977	5	1.007	5	1.037	5	1.068	100	5.038	BKBPP & PA															
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi	50	persen	5	25	5	26	5	27	5	27	5	28	75	133	BKBPP & PA															
			Program Pelayanan Kontrasepsi	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	50	persen	5	217	5	223	5	230	5	237	5	244	75	1.150	BKBPP & PA															
			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya partisipasi akseptor KB/KR	50	persen	5	45	5	46	5	48	5	49	5	51	75	239	BKBPP & PA															
			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan Ibu dan anak	908	orang	908	477	908	491	908	506	908	521	908	908	908	2.904	BKBPP & PA															
			Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Meningkatnya akses informasi terhadap pertumbuhan anak	50	persen	5	25	5	26	5	27	5	27	5	28	75	133	BKBPP & PA															
			Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga sejahtera	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendamping keluarga sejahtera	50	persen	5	25	5	26	5	27	5	27	5	28	75	133	BKBPP & PA															
			Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Meningkatnya profesionalisme pelayanan posyandu	50	persen	5	30	5	31	5	32	5	33	5	34	75	159	BKBPP & PA															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi	24	kelompok			24	50	24	52	24	53	24	55	24,00	209	BKBPP & PA	
			Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS	Menurunnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan penyakit masalah sosial	24	kelompok			24	50	24	52	24	53	24	55	-	209	BKBPP & PA	
1	13		SOSIAL					2.405		2.548		3.786		3.853		3.968		16.561		
1	13	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana publik	100	penyuluh sosial	125,00	16	150,00	16	175,00	17	200,00	17	225,00	18	225,00	85	BPBD	
1	13	2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin, adat terpencil dan penyandang masalah sosial	60	persen	6	808	6	853	6	1.372	6	1.367	6	1.407	90	5.807	DINSOS NAKERTRANS/ SETDAKAB. BAG. ADM. EKONOMI	
1	13	3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya layanan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dan penanganan masalah strategis yang menyangkup tanggap darurat/kejadian luar biasa	50	persen	8	250	8	258	8	343	8	354	8	364	90	1.568	DINSOS NAKERTRANS/ BPBD	
1	13	4	Program Pembinaan Anak Terlantar	Mengurangi jumlah anak terlantar	10	persen	8	30	8	31	8	50	8	52	8	53	50	215	DINSOS NAKERTRANS	
1	13	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pemberdayaan terhadap penyandang cacat dan trauma	10	persen	8	145	8	149	8	154	8	158	8	163	50	770	DINSOS NAKERTRANS	
1	13	6	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Meningkatnya pelayanan terhadap lansia dan anak yatim piatu	14	panti	14	1.025	15	1.056	15	1.500	20	1.545	20	1.591	20	6.717	DINSOS NAKERTRANS	
			program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)	Meningkatnya keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial	50	persen	0	0	10	50	10	150	10	155	10	159	90	514	DINSOS NAKERTRANS	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)											SKPD PENANGGUNG JAWAB		
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	50	persen	8	131	8	135	8	200	8	206	8	212	90	884	DINSOS NAKERTRANS	
1	14		KETENAGAKERJAAN					35		540		1.046		1.081		1.118		3.821		
1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang memenuhi kompetensi	20	persen		20	15	500	15	1.000	15	1.030	15	1.061	80	3.611	DINSOS NAKERTRANS	
			Program Peningkatan kesempatan kerja	Angka pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan	20	persen	5		5	25	5	30	5	35	5	40	45	130	DINSOS NAKERTRAN	
1	14	2	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatannya angka penyelesaian perselisihan tenaga kerja	100	persen	-	15	-	15	-	16	-	16	-	17	100	80	DINSOS NAKERTRANS	
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					115		500		500		525		551		2.191		
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya profesionalisme Koperasi dan UKM	10	persen	8	115	8	500	8	500	8	525	8	551	50	2.191	DISPERINDAG KOP & ESDM	
1	16		PENANAMAN MODAL					-		300		309		318		327		1.254		
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Aceh Tengah	4	Event		-	4	300	4	309	4	318	4	327	20	1.254	SETDAKAB. BAGIAN ADM PEREKONOMIAN/B APPEDA	
1	17		KEBUDAYAAN					2.400		700		770		850		910		5.630		
			Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	1	event budaya/ tahun	0	0	1	200	1	220	1	250	1	260	5	930	DISBUDPAR PORA	
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan budaya	1	Buku	1	150	3	100	5	100	7	100	18	100		550	DISBUDPAR PORA	
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya	1	Event Gebyar Seni dan Budaya	1	2.250	1	400	1	450	1	500	1	550	6	4.150	DISBUDPAR PORA	
1	18		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					1.410		1.451		1.495		1.539		1.586		7.481		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)												SKPD PENANGGUNG JAWAB		
					2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Meningkatnya minat masyarakat terhadap olah raga	3	Keg	3	975	4	1003	4	1033	2	1064	4	1096	20	5.171	DISBUDPAR PORA
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya prestasi atlet daerah pada event daerah dan nasional	60	persen	5	125	5	129	5	133	5	137	5	141	80	664	DISBUDPAR PORA
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan	60	persen	6	310	6	319	6	329	6	339	6	349	90	1.646	DISBUDPAR PORA
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					661		1.138		1.378		1.378		1.404		4.709	
			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keamanan bagi masyarakat	50	persen	5	50	5	52	5	53	5	55	5	56	75	265	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH
		2	Program Pencegahan Din dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Pelayanan tanggap darurat kebencanaan	100	persen	-	90	-	127	-	351	-	336	-	346	100		BPBD
			Program Pemeliharaan kantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya penegakan supremasi hukum	50	persen	5	75	5	77	5	80	5	82	5	84	75	398	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH
			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	80	persen	3	76	3	206	3	211	3	215	3	220	95	928	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH
			Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya koordinasi wawasan kebangsaan antar pemangku kepentingan	-	koordinasi			5	150	5	150	5	150	5	150	20,00	600	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH
			Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	40	persen	7	150	7	150	7	150	7	150	7	150	75	750	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH
			Program pendidikan poliitk masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	60	persen	5	-	5	150	5	150	5	150	5	150	85	600	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya penanganan angka pelanggaran norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat	100	persen	0	150	0	155	0	159	0	164	0	169	100	796	KESBANGPOL & LINMAS/ SATPOLPP & WH

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)											SKPD PENANGGUNG JAWAB																																
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp																														
1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17		
			Program Pelaksanaan syariat islam	Menurunnya pelanggaran terhadap syariat Islam	40	persen	5	70	5	72	5	74	5	76	5	79	15	372	DINAS SYARIAT ISLAM DAN 14 KECAMATAN LINGKUP PEMERINTAH KAB. ACEH TENGAH, SATPOL PP DAN WH, MPU DAN BAITUL MAL																															
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				19.367		24.274		25.144		25.605		26.267		120.506																																	
1	20	5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	persen	-	1.990	-	4.341	-	4.341	-	4.472	-	4.606	100	19.750	SETDAKAB. BAGIAN UMUM, TAPEM DAN HUMAS																															
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100	persen	0	1.550	0	1.597	0	1.644	0	1.694	0	1.745	100,00	8.229	SETDAKAB. UMUM, TAPEM, HUKUM/ INSPEKTORAT																															
			Program Pengelolaan Pelayanan Perijinan Publik Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan perizinan kepada publik	-	kecamatan	0		6	150	8	200	0	-	0	-	14	350	SETDAKAB. BAGIAN TAPEM																															
			Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya tertib administrasi batas wilayah kabupaten dan kecamatan	7	kasus			1	100	1	103	2	150	3	200	7	553	SETDAKAB. BAGIAN TAPEM																															
			Program Pemekaran Wilayah Administrasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kecamatan	14	0	0	0	0	0	4	200	1	100	0	0	19	300	SETDAKAB. BAGIAN TAPEM																															
			Progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur sesuai dengan SOP	-	persen	20	150,0	30	150	35	175	10	150	5	100	100	725	SETDAKAB BAGIAN ORGANISASI																															

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya profesionalisme pelayanan aparatur	70	persen	6	2.523,9	6	2.600	6	2.678	6	2.758	6	2.841	100	13.400	SETDAKAB. BAGIAN ORGANISASI/ BKPP	
			Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	65	persen	35	179,6	0	185	0	191	0	196	0	202	100,00	954	SETDAKAB. BAGIAN ORGANISASI/ DPKKD	
			Progam penataan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya ketaatan terhadap pelaksanaan perundang-undangan	50	persen	50	1.135	60	1.169	65	1.204	63	1.240	70	1.277	80	6.026	SETDAKAB. BAGIAN HUKUM/ KP2TSP	
			Progam pembinaan dan fasilitasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	50	persen	10		50		75		100	-	100	-	100	-	SETDAKAB. BAGIAN HUKUM	
			Program Pemberian penghargaan dan tanda jasa	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	persen	0	-	0	75	0	80	0	85	0	90	100	330	SETDAKAB. BAGIAN UMUM	
1	20	1 0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan legislatif	100	persen	100	57	0	58	0	60	0	62	0	64	100	301	SEKRETARIAT DPRK	
1	20	1 1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya produk hukum yang disahkan	50	persen	30	1.790	20	1.844	0	1.899	0	1.956	0	2.015	100,0	9.503	SEKRETARIAT DPRK	
1	20	1 2	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas kinerja legislatif	70	persen	6	50	6	52	6	53	6	55	6	56	100	265	SEKRETARIAT DPRK	
1	20	1 3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya intregrasi sistem pengelolaan keuangan daerah		WTP	WTP	60	WTP	65	WTP	70	WTP	75	WTP	80	WTP	350	SKPK DALAM LINGKUNGAN KAB. ACEH TENGAH	
1	20	1 4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah		WTP	WTP	5.304	WTP	5.463	WTP	5.626	WTP	5.795	WTP	5.969	WTP	28.157	DPKKD/ 14 KECAMATAN	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100	persen	-		-		-		-		-		100			

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)											SKPD PENANGGUNG JAWAB																		
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	20	18	Program Pelaksanaan Syariat Islam	Menurunnya pelanggaran terhadap syariat Islam	40	persen	3,00	4.428	3,00	4.561	3,00	4.698	3,00	4.839	3,00	4.984	65,00	23.509	DINAS SYARIAT ISLAM DAN 14 KECAMATAN, SATPOL PP DAN WH, BAITUL MAL, MPU, SETDAKAB. BAGIAN KESRA																	
			Program peningkatan sarana dan prasarana ibadah	Meningkatnya pembinaan masjid dan meunasah	295	masjid	0,00	-	0,00	295	0,00	304	0,00	313	0,00	322	0,00	1.234																		
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat ibadah	Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah	75	persen	3,00	-	3,00	1.030	3,00	1.061	3,00	1.093	3,00	1.126	90,00	4.309																		
			Program peningkatan kualitas SDM Imam, Khatib, Bilal, Qari, Qariah dan penyuluh	Meningkatnya kualitas pelaksanaan syariat Islam	100	persen	0,00	-	0	240	0	247	0	255	0	262	100	1.005																		
			Program pembinaan Hukum adat dan hukum syariat	Meningkatnya pemahaman hukum adat dan hukum syari'ah	70	persen	0,00	-	5	150	5	155	5	159	5	164	90	628																		
			Program peningkatan kemakmuran masjid	Meningkatnya suasana keislaman	70	persen	0,00	-	5	150	5	155	5	159	5	164	90	628																		
			Program optimalisasi peran dan fungsi Ulama	Meningkatnya suasana keagamaan di tengah masyarakat melalui peran dan fungsi Ulama	25	persen	35	150	45	170	55	190	65	210	75	230	75	950																		
			Progrma Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Ulama	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ulama	108	orang	143	200	178	220	213	240	248	260	295	280	295	1.200																		
			Program Peningkatan Pengelolaan Zakat, Harta Wakaf, Harta Agama, dan Perwalian	Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Zakat, Harta Wakaf, Harta Agama, dan Perwalian	80	persen	4		4		4		4		4		100																			
			Program Peningkatan ZIS dan Pembinaan kelembagaan	Meningkatnya pendapatan ZIS untuk PAD	60	persen	6		6		6		6		6		90																			
1	21		KEPEGAWAIAN					1.922		2.120		2.195		2.195		2.195		10.627																		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB																			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Meningkatnya pelayanan pindah/purnah tugas aparatur	100	persen	0	116	0	120	0	125	0	125	0	125	100	611	BKPP																	
			Program peningkatan kesempatan kerja	Menurunnya angka kemiskinan	39	persen	100	187	100	200	100	220	100	220	100	220	100	1.047	BKPP																	
			Program peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	persen	0	1.549	0	1.600	0	1.650	0	1.650	0	1.650	100	8.099	BKPP																	
			program pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	persen	0	70	0	100	0	100	0	100	0	100	100	470	BKPP																	
			Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	100	persen	0		0	100	0	100	0	100	0	100	100	400	BKPP																	
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.360		2.746		3.534		4.172		4.812		16.624																		
1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya profesionalisme lembaga desa	50	persen	9	1.210	9	1.246	9	1.284	9	1.322	9	1.362	95	6.424	BPM & PK																	
			Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi kampung	20	persen	0	-	35	200	20	300	5	350	5	400	85	1.250	BPM & PK																	
1	22	3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	10	persen	0,00		10	1.000	10	1.500	10	2.000	10	2.500	50	7.000	BPM & PK																	
1	22	4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kampung	50	persen	8	150	8	150	8	200	8	200	8	200	90	900	BPM & PK																	
1	22	5	Program Pembinaan kreativitas, inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya ekonomi kreatif masyarakat	-				25	150	25	250	25	300	25	350	100	1.050	BKBPP & PA, BPM & PK DAN 14 KECAMATAN LINGKUP PEMERINTAH ACEH TENGAH																	
1	23		STATISTIK					225		500		500		500		500		2.225																		
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya informasi pembangunan daerah	100	persen	0,00	225	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	100,00	2.225	BAPPEDA, BKBPP & PA, SETDAKAB ADM. BAGIAN PEMBANGUNAN																	
1	24		KEARSIPAN					170		210		230		255		280		1.144																		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)											SKPD PENANGGUNG JAWAB																		
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp																	
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	24	1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Meningkatnya kualitas administrasi kearsipan	100	persen	-	100	-	103	-	106	-	109	-	113	100	531	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																	
1	24	2	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	100	persen	-	10	-	20	-	30	-	40	-	50	100	150	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																	
1	24	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya kapasitas aparatur di bidang kearsipan	100	persen	-	60	-	62	-	64	-	66	-	68	100	319	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																	
1	24	4	Program penyelamatan dan pelelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya kelestarian arsip daerah	100	persen	-		-	25	-	30	-	40	-	50	100	145	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																	
1	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.402		3.495		5.440		3.940		3.940		18.217																		
1	25	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya minat masyarakat menggunakan media informasi secara online	10	persen	7	382	7	500	7	2.000	7	500	7	500	45	3.882	DISHUB KOMINFO/KP2TSP/ BAPPEDA/ SETDAKAB. BAGIAN HUMAS																	
1	25	3	Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap ICT	1	unit	0	-	1	50	0	-	0	-	0	-	1	50	DISHUB KOMINFO SETDAKAB. BAGIAN HUMAS																	
1	25	4	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya kapasitas SDM (aparatur dan masyarakat) di bidang komunikasi informasi	25	persen	0	-	5	100	5	200	5	200	5	200	45	700	DISHUB KOMINFO SETDAKAB. BAGIAN HUMAS																	
1	25	2	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Meningkatnya informasi pembangunan kepada masyarakat	100	persen	0	1.020	0	2.845	0	3.240	0	3.240	0	3.240	100,00	13.585	DISHUB KOMINFO SETDAKAB. BAGIAN HUMAS																	
1	26		PERPUSTAKAAN					665		1.385		1.576		1.778		1.832		7.082																		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	26	2	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	26	2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat dan pelayanan perpustakaan	10	persen	10	665	10	1.385	10	1.576	10	1.624	10	1.832	60	7.082	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
1	27		KETAHANAN PANGAN					8.573		19.139		23.314		24.249		25.064		37.141		
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian	961	kelompok	20	128	20	150	50	200	50	250	50	300	1151	1.028	DISTAN PANGAN/ BPKP	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	70	persen	5	192	5	250	5	250	5	300	5	300	95	1.292	DISTAN PANGAN/ BPKP	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi pertanian / perkebunan	Meningkatnya akses informasi pasar	30	persen	10	200	10	150	10	100	10	125	10	125	80	700	DISTAN PANGAN/ BPKP	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan	20	persen	5	45	5	115	5	250	5	350	5	395	45	1.155	DISTAN PANGAN/ BPKP	
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi produk pertanian/perkebunan	60	persen	5	3.717	5	5.000	5	7.000	5	7.210	5	7.426	85	30.353	DISTAN PANGAN/ BPKP/ DISBUNHUT	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya penyuluh pertanian	25	persen	9	140	9	150	9	180	9	220	9	250	70	940	BPKP/ DISNAKAN	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka penyakit ternak	118.504	Dosis unit Puskeswan	2370	100	2370 & 1 Unit Puskeswan	103	2370	106	2370 & 1 Unit Puskeswan	109	2370	113	17.755 & 6 unit Puskeswan	531	DISNAKAN	
			Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi peternakan	30	persen	5	3.836	5	13.000	5	15.000	5	15.450	5	15.914	55		DISNAKAN	
				Peningkatan produksi ternak														-		
				- Ternak besar	21.893	ekor	690		690		690		690		2190		32.843	-		
				- Ternak Kecil	12.985	ekor	526		526		526		526		526		15.615	-		
				- Ternak Unggas	319.935	ekor	3936		3936				3936		0		319.935	-		
				Peningkatan areal / kawasan peternakan	651	Ha	30		235		30		30		35		1.011	-		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan bagi hasil untuk daerah	40	ekor		84	215	75	221,45	75	228,09	75	234,94	75	241,98	424	1.141	DISNAKAN
2			URUSAN PILIHAN						22.439		38.292		36.606		37.089		38.588			
2	1		PERTANIAN						6.022		23.951		21.445		21.616		22.936		95.971	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pendapatan petani yang dibantu	6.075	Org		-		100	310	100	319	100	329	100	339	6.475	1.297	DISTAN PANGAN
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Menurunnya daerah rawan pangan	70	persen		3		3		3		3		3		95		DISTAN PANGAN
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.277	Ton		2.555	1.603	2.555	2.654	2.555	2.734	2.555	2.816	2.555	2.900	59.052	12.707	DISTAN PANGAN
				Peningkatan Infrastruktur Pertanian	36	Km		4		4		4		4,00		4		55,8	0	DISTAN PANGAN
				Rehabilitasi Kebun Kopi Rakyat	5.836	Ha		1.000		1.000	5.000	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	7.000	836	24.000	DISTAN PANGAN
				Perluasan/Pembukaan Lahan Kebun Rakyat	10.138	Ha		186		684	5.000	724	6.000	724	6.000	724	6.000	13.658	23.000	DISTAN PANGAN
			Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif	10	persen		0	0	10	500	10	550	10	550	10	550	50	2.150	DISTAN PANGAN/ DISBUNHUT
			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, peternakan/ perikanan	Meningkatnya akses informasi pasar	10	komoditas		-	1.327	-	1.367	2,00	1.408	1,00	1.450	-	1.494	10	7.045	DISTAN PANGAN/ DISBUNHUT/ DISNAKAN
			Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Meningkatnya nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan	25	persen		5	2.817	5	8.795	5	4.034	5	3.996	5	4.254	40	23.897	DISTAN PANGAN
				Ketersediaan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	39	Unit		39		2		-		-		-		41,00	0	DISTAN PANGAN
				Peningkatan penelitian teknologi pertanian tepat guna	2	Ha		-		8		3			8			19	0	DISTAN PANGAN
				Pengendalian serangan hama penyakit tanaman kopi	12.693	Ha		650		1.350		2.000		2.000		2.000		4.693	0	DISTAN PANGAN

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Jumlah unit pengolahan pasca panen kopi (pulper)	86	Unit	0,00		50		50		50		50		286	0	DISTAN PANGAN	
				Jumlah unit pengolahan pasca panen tebu	28	Unit	0,00		2		2		2		2		36	0	DISTAN PANGAN	
				Persentase peningkatan produktifitas kopi	1	Ton/Ha/Th n	0,72		1		1		0,90		1		1	0	DISTAN PANGAN	
				Ketersediaan penelitian pertanian													0	DISTAN PANGAN		
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya penyuluh pertanian	25	persen	9	60	9	75	9	100	9	125	9		70	360	DISTAN PANGAN	
			Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung pertanian	2	unit	1,00	215	2	250	1	300	1	350	1	400	8	1.515	DISTAN PANGAN	
2	2		KEHUTANAN					2.944		5.111		6.130		6.150		6.170		26.504		
			Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sumber daya hutan	10	persen	8	100	8	400	8	400	8	400	8	400	50	1.700	DISBUNHUT	
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Menurunnya luas lahan kritis	40	Ha	160	2.022	100	3.000	100	4.000	100	4.000	100	4.000	600	17.022	DISBUNHUT	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Menurunnya praktek illegal logging	30	persen		622	15	1.441	20	1.460	25	1.480	10	1.500	10	6.502	DISBUNHUT	
			Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan industri hasil hutan	30	persen	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	80	500	DISBUNHUT	
			Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan	6	KM	6	100	10	170	10	170	10	170	10	170	52	780	DISBUNHUT	
2	3		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					240		847		873		898		925		3.783		

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan pertambangan	75	persen	5	240	5	247	5	255	5	262	5	270	100	1.273	SETDAKAB. BAGIAN ADM.PEREKONOMI AN/DISPERINDAG KOP & ESDM	
			Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya jumlah penambangan liar	-	persen	0,00	-	10	100	10	103	10	106	10	109	40	418	DISPERINDAGK OP & ESDM	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber energi listrik	75	persen	5		5	500	5	515	5	530	5	546	100	2.092	DISPERINDAGK OP & ESDM	
2	4		PARIWISATA				2.450		4.410		3.978		4.047		4.127		19.013			
2	04	1 5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya penyebaran informasi wisata tingkat nasional dan internasional	50	persen	6	1.600	6	1.680	6	1.690	6	1.700	6	1.720	80	8.390	DISBUDPAR PORA	
2	04	1 6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri	50	persen	6	850	6	2605	6	2138	6	2172	6	2207	80	9.973	DISBUDPAR PORA	
2	04	1 7	Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya koordinasi antar pelaku kepariwisataan	1	koordinasi	1	100,8	1	125	1	150	1	175	1	200	6	650	DISBUDPAR PORA	
2	5		KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.889		3.027		3.094		3.212		3.183		15.405			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan danau Lut Tawar	6,5	ha	6,3	441	6,3	454,23	6,3	467,86	6,3	481,89	6,3	496,35	31,50	2341,328892	DISNAKAN	
			Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	587	unit	17,61	984	17,61	1.013,52	17,61	1.043,93	17,61	1.075,24	17,61	1.107,50	675,05	5.224,19	DISNAKAN	
			Program Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya akses pasar produksi perikanan	25	Persen	2	1.364	2	1.059	2	1.082	2	1.155	2	1.229	35	5.889,83	DISNAKAN	
				Peningkatan Produksi Benih	200.000	ekor	900.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		4.900.000	0	DISNAKAN	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
							2013		2014		2015		2016		2017				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produksi perikanan	28	unit	18		18		18		18		20		120	0	DISNAKAN	
			Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Meningkatnya Kawasan Budidaya Air Tawar	1	kawasan	1	100	5	500	5	500	5	500	3	350	20	1.950	DISNAKAN	
2	6		PERDAGANGAN					6.834		11.888		6.323		6.575		6.812		38.432		
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya angka kelangkaan BBM dan pupuk bersubsidi	14	kecamatan	0	170	0	175	0	180	0	185	0	191	14	901	SSETDAKAB. BAGIAN ADM. PEREKENOMIAN	
			Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	60	persen			3	150	3	160	3	180	3	200	72	690	DISPERINDAG KOP & ESDM, SETDAKAB. BAGIAN ADM EKONOMI	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Tersedianya resi gudang bagi petani	1	unit	0	1.752	0	5.942	0	200	0	250	0	300	1	8444	DISPERINDAGKOP & ESDM	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri	65	persen	5	4.412	5	4.571	5	4.723		4.890	5	5.041	85	23.637	SETDAKAB BAGIAN ADM. PEREKENOMIAN DISPERINDAGKOP & ESDM	
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatnya fasilitasi bagi pedagang kaki lima / asongan untuk memperoleh lapangan usaha	2	fasilitasi			3,00	50	4,00	60	5,00	70	6,00	80		260	DISPERINDAGK OP & ESDM	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar	Meningkatnya fasilitas pemasaran produk	9	pasar	1	500	2	1.000	2	1.000	2	1.000	1	1.000	17	4500	DISPERINDAGK OP & ESDM	
2	7		PERINDUSTRIAN					600		618		637		656		675		3.185		
			Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	50	Persen	6	520	6	536	6	552	6	568	6	585	80	2.760,75	DISPERINDAGK OP & ESDM	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (JUTA RUPIAH)											SKPD PENANGGUNG JAWAB																		
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp																
1			2		3		4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah	14	kecamatan		0	50	0	52	0	53	0	55	0	56	14	265,46	DISPERINDAGK OP & ESDM																
			Program Penataan Struktur Industri	Tersedianya kawasan industri sesuai dengan keunggulan komparatif daerah	14	kecamatan		0	30	0	31	0	32	0	33	0	34	14	159,27	DISPERINDAGK OP & ESDM																
2	8		TRANSMIGRASI						460		329		450		510		570		2.319																	
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi	1	dokumen		1	460	1	250	1	300	1	310	1	320	6	1.640	DINSOS NAKERTRANS																
			Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal	258	KK		42		100	79	100	150	0	200	100	250	600	679	DINSOSNAKERTRANS, DISNAKKAN, DISTANPANGAN																
			JUMLAH						231.950		392.018		415.536		440.368		466.586		1.946.459																	

Keterangan :

1. Target capaian dihitung kumulatif
2. Target capaian dalam satuan nol (0), diartikan sebagai target capaian program yang dimaksud telah 100% tercapai, angka nol (0) dimaksudkan tidak ada lagi target pencapaian yang harus dikejar, jika program masih dianggarkan dimaksudkan agar capaian sebelumnya dapat terjaga.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/* hasil) dari kegiatan (*output/* keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012 - 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Tengah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
I	Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan PDRB	persen	5.30	5.67	6.04	6.41	6.78	7.01	7.01
1.2	Laju Inflasi	persen	4,30	3,79	3,5	3,3	3,2	3,0	3,0
1.3	Persentase penduduk miskin	persen	17,98	16,34	14,78	13,18	11,58	9,98	9,98
1.4	Angka Pengangguran Terbuka	persen	3,98	3,5	3,2	3,0	2,5	2,2	2,2
II	Fakus Kesejahteraan Sosial								
2.1	Pendidikan								
2.1.1	Angka Melek Huruf	persen	92,99	92,99	93,0	93,5	94,0	95	95
2.1.2	Angka lama sekolah	tahun	9.52	9.60	9,70	9,80	10,00	11,00	11,00
2.1.3	APK PAUD	persen	25,29	28,99	32,69	36,01	38,05	40,00	40,00
2.1.4	APK SD	persen	114.01	114.05	115	115.09	115.01	115,05	115,05
2.1.5	APK SMP/ SMPLB/MTs	persen	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60
2.1.6	APK SMA/SMK/ MA	persen	92,06	94,02	96,03	98,05	98,06	100,00	100,0
2.1.7	APM SD/SDLB/ MI	persen	96,99	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,0
2.1.8	APM SMP	persen	76,86	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
2.1.9	APM SMA	persen	70,90	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
2.1.10	Angka Kelulusan SD/MI	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.11	Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs	persen	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99	100,00	100,00
2.1.12	Angka Kelulusan SMA/SMK/ MA	persen	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,97
2.1.13	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	0,008	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,003
2.1.14	Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs	persen	0,019	0,016	0,013	0,010	0,007	0,00	0,00
2.1.15	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ MA	persen	0,071	0,068	0,060	0,055	0,035	0,015	0,015
2.2	Kesehatan								
2.2.1	Angka Harapan Hidup	tahun	69,7	69,8	69,8	69,9	69,9	70	70
2.2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	persen	25	24	23	21	20	20	20

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	persen	22	21	20	19	18	18	18
2.2.4	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	persen	16	15	14	13	12	12	12
2.2.5	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	persen	0,70	0,6	0,40	0,30	0,20	0,20	0,20
III	Fokus Budaya, Kepemudaan dan Olahraga								
3.1.	Jumlah sarana olahraga	unit	98	99	99	99	99	99	99
3.2.	Jumlah sarana peribadatan masjid	unit	215	216	217	218	220	221	221
3.3.	Jumlah sarana peribadatan menasah	unit	539	541	543	545	546	548	548
3.4.	Cakupan organisasi olahraga	klub	31	31	31	31	31	31	31
3.5.	Capaian prestasi olahraga	kejuaraan	2	10	13	13	15	18	18
3.6.	Penyelenggaraan keolahragaan	even	1	1	2	2	2	2	2
3.7.	Misi keolahrgaaan	misi	2	2	2	2	2	2	2
3.8.	Cakupan kajian seni dan budaya	kegiatan	2	1	1	1	1	1	1
3.9.	Cakupan fasilitasi seni	unit	2	1	1	1	1	1	1
3.10.	Cakupan gelar seni	pergelaran	6	6	6	6	6	6	6
3.11.	Misi kesenian	misi	1	1	1	1	1	1	1
3.12.	Cakupan SDM kesenian	orang	14	15	15	15	16	16	16
3.13.	Cakupan tempat kesenian	unit	1	1	1	1	1	1	1
3.14.	Cakupan organisasi kesenian	grup	96	96	96	97	98	100	100
3.15.	Cakupan pembinaan kepemudaan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
3.16.	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	6	7	7	7	7	7	7
3.17.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
I	Urusan Wajib								
1.1.	Pendidikan								
1.1.1	Pendidikan Dasar								
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah	persen	98,87	99,00	99,50	100	100,20	100,50	100,50
1.1.1.b	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk	persen	91,19	92	94	95	98	100	100
1.1.1.c1	Rasio Guru terhadap murid SD/MI	persen	1:14	1:14	1:14	1:15	1:20	1:22	1:22
1.1.1.c2	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	persen	1:11	1:13	1:15	1:17	1:19	1:21	1:21
1.1.1.c3	Rasio Guru terhadap murid SMA/SMK/MA	persen	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28
1.1.1.d	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dari Kelompok Permukiman Permanen di daerah terpencil								
1.1.1.e	Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis		100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.f	Jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	siswa	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.f	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	sekolah	81	85	89	93	97	100	100
1.1.1.f	Di setiap SD/MI dan SMTP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan sta kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/ MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	persen	71	73	78	87	91	100	100
1.1.1.g	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	persen	70	76	81	87	93	100	100
1.1.1.h	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	persen	85	89	93	97	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.i	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 org guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	persen	55	65	78	87	96	100	100
1.1.1.j	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 % dan 20 %)	persen	32	49	66	82	94	100	100
1.1.1.k	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.l	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	persen	62	76	90	100	100	100	100
1.1.1.m	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	persen	80	95	98	100	100	100	100
1.1.1.n	Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	persen	38	50	70	90	100	100	100
1.1.1.o	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	persen	65	72	80	100	100	100	100
1.1.1.p	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	persen	81	90	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.q	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.	persen	31	50	80	100	100	100	100
1.1.1.r	Setiap SD/MI memiliki 100 judul bu pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.s	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2	Pendidikan menengah								
1.1.2.a	Angka Partisipasi Sekolah	persen	90,91	92	94	96	98	100	100
1.1.2.b	Rasio sekolah terhadap jumlah penduduk	persen	91;19	93	96	100	100	100	100
1.1.2.c	Rasio Guru terhadap murid	persen	1:28	1:28	1:28	1:30	1:32	1:34	1:34
1.1.3	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dan	persen	65	70	88	95	100	100	100
1.1.4	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 jam per minggu; b. Kelas III : 24 jam per minggu; c. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.7	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.8	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	persen	63	74	83	89	100	100	100
1.1.9	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.10	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.11	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.12	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Kesehatan								
1.2.1.	Rasio Posyandu per 1000 balita	rasio	15,05	15,07	15,09	15,10	15,12	15,14	15,15
1.2.2.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1,12	1,12	1,14	1,16	1,18	1,19	1,19
1.2.3.	Jumlah Rumah sakit persatuan penduduk	unit	2	2	2	2	2	3	3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4.	Persentase Subsidi APBK untuk Rumah Sakit (BLUD)	persen	39%	39%	37%	35%	33%	33%	33%
1.2.5.	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	270	260	240	220	200	180	180
1.2.6.	Rasio Tenaga medis persatuan penduduk	persen	6	6	6	6	6	6	6
1.2.7.	Cakupan Ibu Hamil K4	persen	81	90	90	95	95	95	95
1.2.8.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	persen	34	90	90	95	95	95	95
1.2.9.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	84	90	90	95	95	95	95
1.2.10.	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani	persen	7	90	90	95	95	95	95
1.2.11.	Cakupan kunjungan bayi	persen	73	90	90	95	95	95	95
1.2.12.	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	persen	89	90	90	95	95	95	95
1.2.13.	Cakupan pelayanan anak Balita	persen	24	90	90	95	95	95	95
1.2.14.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan Gakin	persen	64	100	100	100	100	100	100
1.2.15.	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.16.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100	90	95	95	95	98	98
1.2.17.	Cakupan peserta KB aktif	persen	89	90	95	95	95	98	98
1.2.18.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:								
1.2.19.	- AFP lebih besar atau sama dengan 2per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun	kasus	3	2	2	1	1	1	1
1.2.19.a.	- Penemuan penderita pneumonia balita	persen	0	90	95	100	100	100	100
1.2.19.b.	- Penemuan pasien baru TB BTA (+)	persen	27	90	95	100	100	100	100
1.2.19.c.	- Penemuan penderita DBD yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.19.d.	- Penemuan penderita Diare	persen	79	90	95	100	100	100	100
1.2.19.e.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	62	99	99	100	100	100	100
1.2.20.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.21.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.2.22.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam	persen	0	90	95	100	100	100	100
1.2.23.	Cakupan Desa Siaga aktif	persen	10	55	70	80	80	80	80
1.3.	Pekerjaan Umum								
1.3.1.	Panjang jalan	km	694.97	704.33	713.69	723.05	732.41	741.77	741.77
1.3.2.	Panjang jalan kondisi baik	km	358,10	391,79	459,16	543,38	627,60	694,97	694,97
1.3.3.	Panjang jalan kondisi rusak ringan	km	44,43	39,99	31,10	19,99	8,89	0	0
1.3.4.	Panjang jalan kondisi rusak berat	km	147,48	142,09	121,96	94,85	66,94	46,80	46,80
1.3.5.	Panjang jalan yang memiliki drainase	meter	737,94	743,94	749,94	755,94	761,94	707,94	707,94
1.3.6.	Panjang jembatan	meter	1.471	1.551	1.631	1.711	1.791	1.871	1.871
1.3.7.	Jumlah jembatan	unit	81	85	89	93	97	101	101
1.3.8.	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari	persen	45	50	55	60	65	70	70
1.3.9.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	ha	12.535	13.085	13.685	14.385	15.035	15.785	15.785
1.3.10.	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota	km	694.97	704.33	713.69	723.05	732.41	741.77	741.77
1.3.11.	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan	km	147.48	141.84	136.20	130.56	124.92	119.28	119.28
1.3.12.	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	km	547.49	562.24	591.73	628.60	665.47	694.97	694.97
1.3.13.	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	km	402.53	431.77	490.26	563.37	636.48	694.97	694.97
1.3.14.	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan dengan sesuai kecepatan rencana	km	358.10	391.79	459.16	543.38	627.60	694.97	694.97
1.3.15.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter per orang per hari	persen	37,15	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.16.	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	persen	10	15	20	25	30	50	50
1.3.17.	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	persen	10	15	20	25	30	50	50
1.3.18.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	persen	10,4	12	15	20	25	30	30
1.3.19.	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	persen	50	60	70	80	90	100	100
1.3.20.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	persen	10	15	23	35	50	75	75
1.3.21.	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	25	30	40	45	50	60	60
1.3.22.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota	Dokumen	137	137	151	166	182	201	201
1.3.23.	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	dokumen	5	1	1	1	1	1	5
1.3.24.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	dokumen	0	0	1	2	4	4	11
1.3.25.	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	kegiatan	0	0	1	1	1	1	4
1.3.26.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.	kegiatan	4	1	1	1	1	1	4

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.27.	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	kegiatan	2	1	1	1	1	1	4
1.3.28.	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	ha	3,6	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6	8,6
1.4.	Perumahan								
1.4.1.	Persentase perumahan yang belum memenuhi rumah sehat	persen	20	18	13	7	5	0	0
1.4.2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	rumah	2.131	1.831	1.531	1,231	931	631	631
1.5.	Lingkungan Hidup								
1.5.1.	Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	persen	20	25	30	40	50	60	60
1.5.2.	Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	persen	10	15	20	27	37	50	50
1.5.3.	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	0	10	15	30	50	75	75
1.6.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1.6.1.	Persentase wanita usia subur (15-49 th) bertatus kawin yang menggunakan alat KB	orang	35,000	31,409	49,751	21,053	26,853	33,448	33,448
1.6.2.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	persen	2,65	2,5	2,3	2	1,7	1,5	1,5
1.6.3.	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	persen	80	82	84	86	88	90	90
1.6.4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	persen	20	18	16	14	12	10	10
1.6.5.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	110 Orang (2 Kelompok BKB)	165 Orang (3 Kelompok BKB)	330 Orang (6 Kelompok BKB)	385 Orang (6 Kelompok BKB)	695 Orang (15 Kelompok BKB)	1.155 Orang (20 Kelompok BKB)	100%
1.6.6.	Cakupan PUS Peserta KB	persen	88,91	90	92	93	94	95	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.7.	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	Persen	22	25	30	35	40	50	50
1.6.8.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.6.9.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	20	25	30	50	70	90	50
1.6.10.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap tahun	persen	15	20	30	40	50	60	60
1.7.	Perhubungan								
1.7.1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	unit	116	126	136	146	156	166	166
1.7.2.	Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	unit	3	0	2	2	2	2	11
1.7.3.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	unit	3	5	6	7	8	9	9
1.7.4.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	unit	7		8	9	10	11	11
1.7.5.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1						1
1.7.6.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	orang	0	0	1	2	3	4	4

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.7.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	orang	4		5	6	7	8	8
1.7.8.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	Orang	0	0	1	2	3	4	4
1.7.9.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	orang	4		5	6	7	8	8
1.7.10.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	persen	50	60	70	80	90	100	100
1.7.11.	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	unit	1		2	3	4	5	5
1.7.12.	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	unit	4		4	4	4	4	4
1.7.13.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota	persen	0	0	0	50	75	75	75
1.7.14.	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	unit	1		2	3	4	5	5
1.7.15.	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	persen	0	0	0	50	75	75	75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.16.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	orang	0	0	1	2	3	3	3
1.8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.8.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.3.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.4.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.5.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.7.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.8.8.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.	Tenaga Kerja								
1.9.1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	160	320	480	640	800	1.368	1.368
1.9.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	160	320	604	652	832	1032	1032
1.9.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	160	180	200	200	220	240	240
1.9.4.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	20	25	30	35	40	45	45
1.9.5.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.9.6.	Besaran pemeriksaan perusahaan	perusahaan	10	10	15	55	115	175	175
1.9.7.	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	perusahaan	6	6	6	11	18	26	26
1.10.	Ketahanan Pangan								
1.10.1.	Ketersediaan energi dan protein per kapita	persen	50	55	60	65	70	75	75
1.10.2.	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	persen	20	25	50	75	80	100	100
1.10.3.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	50	55	60	70	80	85	85
1.10.4.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	10	15	20	25	30	50	50
1.10.5.	Penanganan daerah rawan pangan	persen	50	60	70	80	90	100	100
1.11.	Sosial								
1.11.1.	Persentase (%) Penyaluran Beras untuk Penduduk Miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.11.2.	Persentase (%) KAT skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	persen	10	10	20	30	40	50	50
1.11.3.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	panti	10	10	25	45	60	75	100
1.11.4.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	orang	50	50	60	75	90	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.5.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Orang	50	50	60	75	90	100	100
1.11.6.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	20	20	30	40	50	60	60
1.12.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.12.1.	Kualitas Akuntabilitas Pemerintahan	capaian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.12.2.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	60,31	65	70	80	100	100	100
1.12.3.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	73	73	80	90	100	100	100
1.12.4.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	persen	25	25	30	45	50	60	60
1.12.5.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	persen	10	15	20	25	30	50	50
1.12.6.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.12.7.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas), Pol-PP dan Wilyatul Hisbah (WH) di Kabupaten/Kota	rasio	137	137	138	139	140	141	141
1.12.8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	persen	40	40	50	60	70	80	80
1.12.9.	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	persen	10	20	25	30	35	40	40
1.12.10.	Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 6000 liter pada WMK	unit	6	8	9	10	11	12	12
1.12.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	persen	34	45	51	56	62	67	67
1.12.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	60	50	40	30	20	15	15
1.13.	Informasi dan Komunikasi								
1.13.1.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa, seperti majalah, radio, dan TV	hari	365	365	365	365	365	365	365

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.2.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (internet)	hari	365	365	365	365	365	365	365
1.13.3.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	persen	10	20	25	30	40	50	50
1.13.4.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya	persen	10	20	25	30	40	50	50
1.13.5.	Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang seperti buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	persen	10	20	25	30	40	50	50
1.14.	Penanaman Modal								
1.14.1.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	media	1	1	2	2	2	2	2
1.14.2.	Tersedianya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	persen	20	25	30	35	45	50	50
1.14.3.	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota	promosi	1	1	2	2	2	2	2
1.14.4.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	aplikasi	1	1	1	1	1	1	1
II	Fokus Urusan Pilihan								
2.1.	Pertanian								
2.1.1	Produksi padi (GKG)	ton	16,887.00	17,731.35	18,617.92	19,548.81	20,526.25	21,552	21,552
2.1.2	Produksi Jagung	ton	466	489.3	513.76	539.45	566.42	549.75	549.75
2.1.3	Produksi Ubi Kayu(umbi basah)	ton	1872	1965.6	2063.88	2167.074	2275.4277	2389.19	2389.19
2.1.4	Produksi Ubi Jalar (umbi basah)	ton	1805	1895.25	1990.0125	2089.5131	2193.9888	2303.69	2303.69
2.1.5	Produksi Sayuran	ton	15820	16611	17441.55	18313.63	19229.31	20190.77	20190.77
2.1.6	Produksi Buah-Buahan	ton	4525.8	3677.1	3860	4044.81	4247.05	4495	4495
2.1.7	Tanaman Rempah/Obat-obatan	ton	0	10	15	20	30	50	50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Peternakan								
2.2.1	Populasi Kuda	ekor	1.601	1.681	1.765	1.853	1.946	2.043	2.043
2.2.2	Populasi Kerbau	ekor	13.244	13.906	14.602	15.332	16.098	16.903	16.903
2.2.3	Populasi Sapi	ekor	7.042	7.394	7.764	8.152	8.560	8.988	8.988
2.2.4	Populasi Kambing	ekor	15.277	16.041	16.843	17.685	18.569	19.498	19.498
2.2.5	Populasi Domba	ekor	960	1.008	1.058	1.111	1.167	1.225	1.225
2.2.6	Populasi Ayam Ras	ekor	112.245	117.857	123.750	129.938	136.434	143.256	143.256
2.2.7	Populasi Ayam Buras	ekor	137.258	144.121	151.327	158.893	166.838	175.180	175.180
2.2.8	Populasi Itik	ekor	70.432	73.954	77.651	81.534	85.611	89.891	89.891
2.3.	Perikanan								
2.3.1	Ikan	ton	724	760	798	837	878	921	1000
2.4.	Perdagangan								
2.4.1	Persentase Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	persen	50	60	70	80	90	100	100
2.4.2	Cakupan pengawasan BBM dan pupuk bersubsidi	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.4.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	5	5	10	20	30	50	50
2.4.4	Meningkatnya volume produk yang dipasarkan ke luar daerah	ton	90	90	100	110	120	130	140
2.4.5	Cakupan resi gudang bagi petani	persen	0	0	10	20	30	50	50
2.4.6	Jumlah pasar yang terpelihara dan informasi harga	pasar	9	9	11	12	13	13	13
2.5.	Perindustrian								
2.5.1	Jenis industri	jenis	40	40	41	41	42	43	43
2.5.2	Jumlah Tenaga Kerja	orang	2.963	3111	3267	3430	3602	3782	3782
2.6	Energi dan Sumber Daya Mineral								
2.6.1	Cakupan akses masyarakat terhadap sumber daya listrik	persen	83	85	87	89	91	92	92
2.7	Transmigrasi								
2.7.1	Jumlah wilayah pengembangan transmigrasi	lokasi	2	4	5	6	6	7	7
Aspek Pelayanan Umum									
I	Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.30	5.67	6.04	6.41	6.78	7.01	7.01
1.2	Laju pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku	Rp (dlm jutaan)	3.382.319,66	3.792.933,27	4.253.395,36	4.769.757,56	5.348.806,13	5.998.151,19	5.998.151,19
1.3	PDRB Perkapita	Rp	8.725.566,80	9.784.850,61	10.972.731,47	12.304.821,07	13.798.626,35	8.725.566,80	9.784.850,61

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM tahun ke 0	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi kinerja Pada akhir Periode RPJM
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Jumlah Koperasi Aktif	persen	50,11	50,50	60	60,50	70	70,50	70,50
II	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur								
2.1.	Persentase Jalan kondisi baik	persen	51,50	60	65	70	75	80	80
2.2	Jumlah bank	unit	18	20	22	22	22	23	23
2.3	Jumlah Restoran	unit	10	10	14	15	17	20	20
2.4	Jumlah penginapan/ hotel/ guest house	unit	20	20	20	20	21	22	22
2.5	Jumlah kantor SKPD	unit	46	46	47	50	51	52	52
2.6	Proporsi RT dengan akses air bersih	persen	26,5	27	35	45	50	60	60
III	SDM								
3.1	IPM	Tahun	74,85	75,52	76,19	76,86	77,53	78,2	74,85
3.2	Rasio ketergantungan (dependency ratio)	persen	51,36	50	45	43	42	40	40

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah untuk masa bakti 2012-2017, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) masa transisi tersebut mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) RPJMK ini tetap digunakan menjadi pedoman untuk penyusunan RKPK dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBK masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) Penggunaan RPJMK ini sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMK dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati terpilih; dan
- 3) Selanjutnya RKPK masa transisi merupakan tahun pertama RPJMK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMK periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMK yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah (RPJMK) Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati masa bakti periode 2012-2017 serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

RPJMK Tahun 2012-2017 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya.

Misi Kabupaten Aceh Tengah menjadi acuan bagi semua SKPK dalam menjalankan program dan kegiatannya dan misi tersebut sekaligus sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun (2012-2017).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2012- 2017, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan RPJMK Tahun 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Aceh Tengah, dan Wakil Bupati Aceh Tengah membantu Bupati dengan cara melakukan pengawasan atas pencapaian berbagai target indikator pembangunan daerah, termasuk standar pelayanan minimal (SPM);
- 2) Sekretariat Daerah Kabupaten menjalankan fungsi Pelaksana Harian atas pencapaian berbagai indikator yang ditetapkan dalam dokumen RPJMK ini;
- 3) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Aceh Tengah;
- 4) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar melaksanakan program-program dalam RPJMK Tahun 2012-2017 dengan sebaik-baiknya;
- 5) Setiap SKPK, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Kabupaten lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPK (Renstra-SKPK) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK yang disusun dengan berpedoman pada RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017;
- 6) Khusus SKPK atau Unit Kerja yang sudah ditetapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD (Renstra Bisnis BLUD) yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017;
- 7) Penjabaran lebih lanjut RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK);
- 8) Penyusunan RKPK harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPK, dan Musrenbang Kabupaten;

-
- 9) RKPK setiap tahunnya harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
 - 10) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPK merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - 11) Renja-SKPK yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK (RKA-SKPK);
 - 12) Dalam pelaksanaan RPJMK Tahun 2012-2017, setiap SKPK perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMK Tahun 2012-2017 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, instansi terkait maupun masyarakat luas;
 - 13) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMK Tahun 2012- 2017, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK Tahun 2012- 2017, sebagai berikut:
 - a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPK;
 - b) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPK sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c) Kepala SKPK melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPK periode sebelumnya dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - d) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
 - 14) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMK, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta APBK setiap tahunnya.
 - 15) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluarkendali Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMK, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah di kembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRK Aceh Tengah untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan RPJMK Tahun 2012-2017 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Aceh dan nasional selama lima tahun mendatang.

Sebagai tanggung jawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu di kembangkan peran aktif seluruh *stakeholders* dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan DPRK Aceh Tengah, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan atau *stakeholders* di Kabupaten Aceh Tengah, diharapkan cita-cita Aceh Tengah sejahtera 2017 dapat terwujud.